

**IMPLEMENTASI *READINESS ACTION PLAN* NATO DALAM
MENGHADAPI RUSIA DI KAWASAN LAUT BALTIK TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi
Hubungan Internasional dengan Peminatan *International Security and Peace*



Disusun oleh :

Monika Permata Sari

NIM. 135120401111029

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI *READINESS ACTION PLAN* NATO DALAM MENGHADAPI RUSIA
DI KAWASAN LAUT BALTIK TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Monika Permata Sari

135120401111029

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal 21 Desember 2017

Ketua Majelis Pengujut

Sekretaris Majelis Penguji

Aswin Ariyanto Azis, S. IP., M.DevSt
NIP. 10780220201121001

Muhammad Riza Hanafi, S.IP., MIA
NIK. 2011028002071001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Ni Komang Desy S.A.P., S.IP., M.Si
NIK. 2011028412302001

Joko Purnomo, S. IP., MA
NIP. 197804012009121002

Malang, 15 Januari 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya


Prof. Dr. Unti L. Widodo, SE., M.Si., Ak/
NIP. 19690814199402100



HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI *READINESS ACTION PLAN* NATO DALAM MENGHADAPI RUSIA
DI KAWASAN LAUT BALTIK TAHUN 2014-2016**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Monika Permata Sari

135120401111029

Telah disetujui oleh pembimbing:

Pembimbing Utama

Ni Komang Desy S.A.P., S.IP., M.Si
NIK. 2011028412302001

Pembimbing Pendamping

Joko Purnomo, S. IP., MA
NIP. 197804012009121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201012001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama: Monika Permata Sari

NIM. 135120401111029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**"IMPLEMENTASI *READINESS ACTION PLAN* NATO DALAM
MENGHADAPI RUSIA DI KAWASAN LAUT BALTIC TAHUN 2014-
2016"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam skripsi tersebut telah diberi sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang
saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 15 Desember 2017



Penulis,

Monika Permata Sari

NIM. 135120401111029

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Adapun skripsi dengan judul **“Implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam Menghadapi Rusia di Kawasan Laut Baltik Tahun 2014-2016”** penulis buat dengan membahas mengenai *Readiness Action Plan* yang dilakukan oleh NATO sebagai respon atas tindakan kontroversi Rusia dan bagaimana implementasi dalam *Readiness Action Plan* tersebut dilakukan dengan menggunakan *conventional deterrence* sebagai salah satu strategi pencegahan menggunakan ancaman untuk mencegah tindakan Rusia guna kepentingan keamanan NATO. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi serta seluruh keluarga penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan demi kelancaran penulisan skripsi penulis selama ini.
2. Ibu Ni Komang Desy S.AP., S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing utama penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, masukan, saran yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih banyak karena kesabaran Ibu dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Joko Purnomo, S.IP., MA selaku dosen pembimbing pendamping penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan saran yang diberikan yang selama ini diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan lebih baik.

4. Bapak Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt dan Bapak Muhammad Riza Hanafi, S.IP., MIA selaku dosen penguji dalam ujian komprehensif skripsi penulis yang telah memberikan kritik dan saran positif untuk diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat menjadi skripsi yang lebih baik.

5. Mas Dadang dan segenap staf Program Studi Hubungan Internasional yang selalu membantu dalam menyelesaikan persyaratan administratif dan membantu penulis dalam menyusun skripsi secara tepat waktu.

6. Safira Nur Muchlisina, terima kasih banyak sudah membantu penulis selama masa perkuliahan terutama masa pembuatan skripsi dengan segala bentuk semangat, saran dan nasihat mengenai segala hal yang penulis khawatirkan. Tanpa dirimu mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, dan terlebih lagi tanpa kamu, mungkin penulis tidak akan *'survive'* untuk menjalani perkuliahan selama 4 tahun.

I've always got your back and sincerely, thank you so much for everything you've done.

7. Dicky Iqfan Hafid, terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan meskipun terhalang oleh jauhnya jarak tapi tidak menjadi penghalang untuk terus mendukung satu sama lain, terutama ketika penulis berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kamu disana juga selalu diberkahi dan makin sukses, *stay close*, kun!

8. Teman-teman micin Dewi Ratih Arisandy, Novita Ayu Anggraini, Nafiati

Indah yang sepenuh hati selalu menemani ketika dekat maupun ketika jauh, *you have a friend in me and I can't thankful enough for all the funny, stupid and even bad memories you gave.*

9. Teman perjuangan skripsi lainnya, Ni Made Wulandari, Jondit Gilang,

Annisa Eldina, Agung Mahardika, Nabila Putri dan lainnya yang turut memberikan dukungan dan menjadi tempat tukar pikiran mengenai skripsi, semoga kita ke depan bisa sukses bersama-sama.

10. Seluruh angkatan HI UB 2013 yang menjadikan masa perkuliahan selama

bertahun-tahun ini menjadi masa yang menyenangkan.

Malang, 11 Januari 2018

Penulis

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016. *Readiness Action Plan* merupakan sebuah rencana paling signifikan dari NATO semenjak Perang Dingin, sebagai suatu respon terhadap tindakan Rusia yang melakukan aneksasi terhadap Crimea. Aneksasi Rusia terhadap Crimea ini dilihat oleh NATO sebagai suatu ancaman terhadap aliansi, terutama bagi negara anggota yang memiliki perbatasan dekat dengan Rusia, yakni wilayah timur Eropa. Sehingga NATO dengan menggunakan *Readiness Action Plan* tersebut berusaha untuk mencegah Rusia melakukan agresi terhadap negara aliansi dengan menggunakan kekuatan ancaman. Penelitian ini menggunakan teori *conventional deterrence* milik Michael Gerson dan Daniel Whiteneck. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi *Readiness Action Plan* NATO dilakukan dengan mengimplementasikan *conventional deterrence*, yakni menggunakan ancaman untuk mencegah potensial lawan dalam melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : *Readiness Action Plan*, NATO, Rusia, *Conventional Deterrence*, Ancaman

ABSTRACT

This research examines the implementation of NATO's Readiness Action Plan in confront of Russia in the Baltic Sea region in 2014 to 2016. Readiness Action Plan is the most significant plan of NATO since the Cold War, as a response to the actions of Russia's annexation to the Crimea. The annexation of Russia to the Crimea was seen by NATO as a threat to the alliance, especially for member states that have close borders with Russia, namely eastern Europe. NATO using the Readiness Action Plan to prevent Russia from doing aggression against alliance states using the power of threats. This research uses conventional deterrence theory by Michael Gerson and Daniel Whiteneck. This research is a qualitative research using secondary data. The results of this research prove that the implementation of NATO's Readiness Action Plan is done by implementing conventional deterrence, which uses threats to prevent potential opponents in performing undesirable actions.

Keywords : *Readiness Action Plan, NATO, Russia, Conventional Deterrence, Threat*



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
ABSTRAKSI.....	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR BAGAN.....	XIV
DAFTAR GRAFIK	XV
DAFTAR SINGKATAN.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	8
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1. STUDI TERDAHULU	11
2.2. KERANGKA TEORITIS	17
2.2.1. Conventional Deterrence	17
2.2.1.1 Credibility	26
2.2.1.2 Strategic Communications	31
2.3. OPERASIONALISASI TEORI	35
2.2.2. Credibility	35
2.2.3. Strategic Communications.....	37
2.4. ALUR PEMIKIRAN	40
2.5. ARGUMEN UTAMA	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. JENIS PENELITIAN.....	43
3.2. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	43
3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	44
3.4. TEKNIK ANALISIS DATA	44
3.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	44
BAB IV DINAMIKA HUBUNGAN NATO DAN RUSIA.....	47



4.1. DINAMIKA HUBUNGAN NATO DAN RUSIA PRA ANEKSASI CRIMEA ... 48

4.2. INTERVENSI RUSIA DI UKRAINA 62

4.3. READINESS ACTION PLAN 67

BAB V IMPLEMENTASI READINESS ACTION PLAN NATO 78

5.1. CREDIBILITY 79

5.1.1. Military Capability 80

5.1.2. Political Resolve 107

5.2. STRATEGIC COMMUNICATIONS..... 118

5.2.1 Communication through words..... 119

5.2.2 Communication through actions..... 124

5.3. RESPON RUSIA MENGENAI READINESS ACTION PLAN..... 135

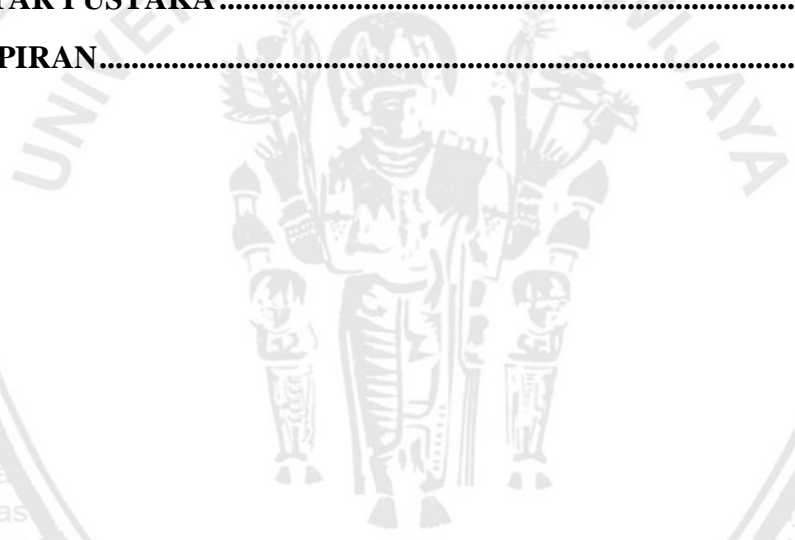
BAB VI PENUTUP 141

6.1. KESIMPULAN 141

6.2. SARAN..... 143

DAFTAR PUSTAKA 145

LAMPIRAN..... 157



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kawasan Laut Baltik.....	2
Gambar 2 <i>Working Structure</i>	51
Gambar 3 Negara-negara Baltik.....	56
Gambar 4 <i>Global Nuclear Weapons di Januari 2017</i>	58
Gambar 5 Etnis Rusia di Ukraina.....	64



DAFTAR TABEL

Table 1 Operasionalisasi Teori	39
Table 2 Assurance Measures	70
Table 3 Adaptation Measures	72
Table 4 Land Systems	82
Table 5 Aircraft	85
Table 6 Naval Systems	90
Table 7 Rockets and Missile	92
Table 8 Kontribusi Secara Tidak Langsung NATO	116



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pemikiran.....

41



DAFTAR GRAFIK

Data Grafik 1 Anggaran NATO dari GDP Tahun 2014 111
Data Grafik 2 Anggaran NATO dari GDP Tahun 2015 112
Data Grafik 3 Anggaran NATO dari GDP Tahun 2016 113



DAFTAR SINGKATAN

ACO	: <i>Allied Command Operations</i>
ACT	: <i>Allied Command Transformation</i>
AWACS	: <i>Airbone Warning and Control System</i>
DPC	: <i>Defense Planning Committee</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
NAC	: <i>North Atlantic Council</i>
NACC	: <i>North Atlantic Cooperation Council</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NDPP	: <i>NATO Defense Planning Process</i>
NFIU	: <i>NATO Force Integration Units</i>
NPG	: <i>Nuclear Planning Group</i>
NRC	: <i>NATO-Russia Council</i>
NRF	: <i>NATO Response Force</i>
PfP	: <i>Partnership for Peace</i>
PJC	: <i>Permanent Joint Council</i>
RAP	: <i>Readiness Action Plan</i>
SACEUR	: <i>Supreme Allied Commander Europe</i>
SAF	: <i>Singapore Armed Forces</i>
USAREUR	: <i>United States Army Europe</i>
VJTF	: <i>Very High Readiness Joint Task Force</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dinamika hubungan internasional dipenuhi dengan peran dan usaha suatu negara untuk mengamankan kedaulatan serta keamanan wilayahnya. Peran dan usaha suatu negara tersebut tidak terlepas dari pengaruh tindakan suatu negara lain yang dapat memberikan reaksi yang bersifat positif maupun negatif terhadap negara lainnya. Tindakan suatu negara yang berupa politik luar negeri serta kebijakan luar negeri negara dalam berbagai bidang, seperti militer, ekonomi bahkan budaya akan memberikan dampak dan reaksi terhadap negara lain.

Tindakan negatif suatu negara yang dapat berupa tindakan provokasi dan invasi dapat dianggap sebagai suatu ancaman oleh negara lain yang akhirnya akan berujung pada konflik, bahkan dalam skala besar mampu untuk menciptakan perang. Sehingga beberapa negara perlu untuk menyiapkan suatu strategi, rencana ataupun kebijakan tertentu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, terutama jika hubungan antar negara dalam suatu kawasan memiliki hubungan yang tidak stabil serta konfliktual.

Kawasan Laut Baltik merupakan salah satu kawasan di benua Eropa dengan dikelilingi oleh beberapa negara yakni Rusia, Estonia, Denmark, Polandia, Latvia, Finlandia, Lithuania, Norwegia, Jerman dan Swedia yang

memiliki sejarah konflik Perang Dingin, sehingga kawasan tersebut rentan dengan bentuk rivalitas dan isu *mutual trust* yang kemudian secara mudah dapat memicu konflik bahkan hingga perang di masa mendatang. Perang Dingin telah mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan yang memiliki aliansi terbesar saat ini, yakni NATO (*the North Atlantic Treaty Organization*) yang sebagian besar negara anggotanya berada dalam kawasan tersebut terkecuali Rusia, Swedia dan Finlandia.¹



Gambar 1 Kawasan Laut Baltik

(Sumber: Background Report Prague Student Summit NATO's Readiness Action Plan hal. 7)

Pasca Perang Dingin, aktor dalam kawasan tersebut berusaha untuk merubah ranah Perang Dingin dengan melakukan kerjasama dalam rangka membangun *mutual trust* yang dilakukan dengan menangani isu keamanan internasional antara NATO dan Rusia yang merupakan negara pecahan Uni

¹ *The North Atlantic Treaty Organization* merupakan aliansi keamanan yang terbentuk pada masa Perang Dingin tahun 1949 oleh Amerika Serikat, Kanada dan negara-negara Eropa Barat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan bersama melawan Uni Soviet.

Soviet yang terbesar. Kerjasama tersebut dilakukan dengan membentuk program bernama NACC (*North Atlantic Cooperation Council*) dan PFP (*Partnership for Peace*) pada tahun 1994 yang kemudian ditingkatkan secara intens dengan mendirikan NRC (*NATO-Russia Council*) pada 28 Mei 2002.²

NRC merupakan suatu wadah konsultasi dan kerjasama antara NATO dan Rusia dalam menangani masalah keamanan yang dianggap sebagai kepentingan bersama dengan tujuan untuk memajukan hubungan keduanya melalui dialog politik dalam mengetahui masalah, cara melakukan pendekatan bersama dan pelaksanaan operasi gabungan terhadap masalah keamanan.³ Namun pendirian NRC tersebut ternyata belum mampu untuk membangun *mutual trust* antara NATO dan Rusia yang kemudian terlihat secara terbuka pada tahun 2014 ketika NATO mengeluarkan keputusan untuk menanggukkan segala bentuk kerjasamanya dengan Rusia termasuk kerjasama NRC yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.

Tahun 2014 menjadi tahun kemunduran besar bagi hubungan NATO dan Rusia, dikarenakan sebelumnya belum pernah terjadi penanggukan kerjasama dalam jangka waktu yang lama antara kedua belah pihak semenjak konflik Rusia dan Georgia tahun 2008.⁴ Pihak NATO melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa penyebab keputusan NATO untuk menanggukkan

² NATO, "NATO-Russia Council", diakses dari: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 13.19 WIB.

³ Ibid.

⁴ Pada Agustus 2008, NATO menanggukkan segala bentuk kerjasama NATO dengan Rusia sebagai bentuk protes NATO mengenai konflik Rusia dan Georgia. Namun penanggukan kerjasama tersebut hanya berjalan hingga September 2008 ketika Perancis dan Jerman membangun kembali kerjasama personal dengan Rusia dan dilanjutkan secara resmi dengan NATO pada Maret 2009. Sedangkan penanggukan NATO pada Rusia tahun 2014 masih berlanjut hingga kini akibat dari Rusia menganeksasi Crimea yang dahulunya merupakan bagian dari Ukraina.

hubungan kerjasama kedua belah pihak ialah akibat tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina pada Maret 2014 yang dianggap telah melanggar hukum internasional, *the Euro Atlantic Partnership Council Basic Document*, *the NATO-Russia Founding Act* dan *Rome Declaration*.⁵ Atas dasar tersebut NATO memutuskan segala hubungan kerjasama dengan Rusia hingga waktu yang tidak ditentukan yang telah diungkapkan secara resmi dalam NATO Wales Summit pada April 2014.

Kedua belah pihak memiliki pernyataan berbeda terkait tindakan NATO dalam menanggihkan segala bentuk kerjasamanya dengan Rusia. Pihak Rusia memiliki penilaian tersendiri terkait penanggihan kerjasama antara NATO dan Rusia yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia pada April 2014 bahwa dengan adanya penanggihan tersebut justru akan meningkatkan ancaman non tradisional seperti terorisme di sekitar kawasan dan NATO hanya akan mengembalikan suasana *arguing and fighting* antara kedua belah pihak kembali seperti pada masa Perang Dingin terdahulu.⁶ Sedangkan NATO semakin menguatkan Rusia sebagai ancaman bagi NATO yang diungkapkan dalam NATO Wales Summit 2014 dan Warsaw Summit 2016 ketika Rusia menjadi agenda utama dalam kedua konferensi tersebut.

“The Alliance faces a range of security challenges and threats that originate both from the east and from the south; Russia's aggressive actions, including provocative military activities in the periphery of NATO territory and its demonstrated willingness to attain political goals by the threat and use of

⁵ NATO, “Statement by NATO Foreign Minister”, diakses dari: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_108501.htm pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 18.00 WIB.

⁶ Euractiv, “Russia Says Suspended NATO Ties Boosts Terrorists”, diakses dari <http://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-says-suspended-nato-ties-boosts-terrorists/> pada tanggal 29 April 2017 pukul 20.05 WIB.

*force, are a source of regional instability, fundamentally challenge the Alliance, have damaged Euro-Atlantic security, and threaten our long-standing goal of a Europe whole, free, and at peace..”*⁷

NATO Wales Summit 2014 menjadi konferensi tingkat tinggi terpenting dalam sejarah semenjak Perang Dingin menyangkut perubahan hubungan antara NATO dan Rusia, hal tersebut bukan saja akibat pernyataan dalam konferensi bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina dan beberapa tindakan provokasinya telah menyebabkan penangguhan kerjasama antara kedua belah pihak, tetapi adanya pengungkapan kebijakan baru NATO dalam menghadapi Rusia yang dibentuk dalam sebuah rencana bernama RAP (*Readiness Action Plan*). RAP merupakan rencana penguatan paling signifikan pasca Perang Dingin yang memuat rencana langkah-langkah signifikan yang dilakukan NATO sebagai respon atas tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina.⁸ Dengan kata lain RAP menjadi bentuk strategi yang dirancang untuk menjamin keamanan negara anggota NATO, meningkatkan respon serta keefektifitasan pasukan terhadap ancaman.

RAP dibuat dengan rangkaian dua langkah di dalamnya yang terdiri dari *assurance measures* dan *adaptation measures*. *Assurance measures* merupakan langkah untuk menjamin keamanan pertahanan darat, air dan udara negara anggota yang memiliki geografis dekat dengan Rusia sedangkan *adaptive measures* merupakan langkah dalam membentuk struktur pertahanan NATO untuk memperkuat kemampuan negara anggota dalam menanggapi

⁷ NATO, “Wales Summit Declaration 5 September 2014”, (pdf)

⁸ Louisa Brooke Holland, “NATO’S military response to Russia: November 2016 update”, (Number 07276, House of Commons Library), hal.7

krisis yang akan terjadi.⁹ Pembuatan RAP oleh NATO dalam merespon tindakan negatif Rusia, yang dianggap NATO sebagai ancaman, merupakan upaya NATO untuk mencegah segala bentuk tindakan negatif Rusia kepada negara anggota NATO yang telah diungkapkan sebelumnya dalam Wales Summit 2014. Tujuan NATO melakukan hal tersebut adalah untuk mencegah tindakan agresi di masa mendatang di wilayah Eropa oleh Rusia.¹⁰ Sesuai dengan pernyataan NATO yang menganggap bahwa tindakan Rusia dalam invasinya di Ukraina telah menjadi “*wake up call*” bagi NATO untuk meningkatkan kewaspadaan akan ancaman dan kemungkinan yang akan dilakukan Rusia di masa mendatang.¹¹ Tindakan tersebut meliputi tindakan agresif terhadap negara anggota seperti yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dan aktifitas serta provokasi Rusia yang bersifat militer di dekat perbatasan dan wilayah negara anggota NATO.

Terdapat 39 insiden militer atau tindakan provokasi yang melibatkan Rusia dan NATO selama 8 bulan pasca aneksasi Rusia di Crimea pada Maret 2014 yang memperlihatkan eskalasi militer di wilayah Eropa terutama di kawasan Laut Baltik yang membawa kembali suasana Perang Dingin kembali terjadi. *European Leadership Network* melaporkan bahwa beberapa tindakan beresiko tinggi yang melibatkan kedua pihak yakni ditangkapnya secara diam-diam petugas keamanan Estonia oleh agen Rusia dari pos perbatasan Estonia atas

⁹ Ibid.

¹⁰ The Guardian, 2016, “*NATO and Russia Playing Danger Game With Military Build-up*”, dapat diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2016/oct/27/military-build-up-along-russias-border-no-cause-for-alarm>, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 2.06 WIB.

¹¹ Brookings, 2014, “*NATO Seceretary General: Russia’s Annexation on Crimea is Illegal and Illegitimate*”, dapat diakses dari <https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2014/03/19/nato-secretary-general-russias-annexation-of-crimea-is-illegal-and-illegitimate/>, pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 2.25 WIB.

tuduhan *spionase* pasca kunjungan Presiden Barack Obama ke Estonia pada 5 September 2014, adanya kecurigaan aktivitas kapal selam perang milik Rusia di Stockholm, Swedia pada Oktober 2014 dan pada 19 September 2014 ketika pasukan Rusia menahan kapal pelayaran Lithuania di perairan internasional yang dianggap sebagai bentuk nyata intimidasi Rusia terhadap negara Baltik dan beberapa tindakan lainnya yang melibatkan kedua pihak.¹² Insiden tersebut memperlihatkan bahwa semenjak tahun 2014 hubungan kedua pihak semakin memanas terutama akibat adanya krisis Ukraina dan hal tersebut yang mendesak NATO akhirnya mengeluarkan kebijakan RAP sebagai respon atas tindakan Rusia untuk mengamankan negara anggotanya.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai bagaimana implementasi RAP NATO dalam menghadapi Rusia di tahun 2014 hingga 2016, dikarenakan tahun 2014 merupakan tahun pembuatan RAP yang dikemukakan dalam Wales Summit 2014 yang terus diimplementasikan hingga saat ini namun penulis membatasi tahun penelitian hingga tahun 2016. Penulis menyadari bahwa konflik antara Rusia dan NATO bukanlah hal baru, namun konflik yang terjadi saat ini memicu suasana Perang Dingin kembali terjadi ketika NATO memutuskan untuk menghentikan segala bentuk hubungan dengan Rusia dalam jangka yang terhitung lebih lama dibandingkan ketika merespon konflik Rusia dan Georgia di tahun 2008, selain itu NATO mengeluarkan langkah *collective defenseny* yang tersignifikan semenjak Perang Dingin yang memperlihatkan bahwa hubungan kedua pihak jika terus

¹² Independent, 2014, "Full List of Incidents Involving Russian Military and NATO Since March 2014", dapat diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/full-list-of-incidents-involving-russian-military-and-nato-since-march-2014-9851309.html>, pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 00.18 WIB.

memanas dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik yang lebih besar atau dalam skala lebih tinggi dapat menimbulkan perang. Dengan pertimbangan hal tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi RAP NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016 dengan menggunakan teori *conventional deterrence* dalam kerangka pemikiran yang meliputi variabel *credibility* dan *strategic communications* dalam penerapannya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *conventional deterrence* dalam *Readiness Action Plan* NATO guna menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam dibuatnya karya ilmiah ini, selalu ada tujuan penelitian yang menyertai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *conventional deterrence* dalam *Readiness Action Plan* NATO guna menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan menganalisa fenomena serta untuk mengasah kemampuan menulis dalam sebuah karya ilmiah.

2. Bagi akademisi, adanya penelitian ini untuk semakin memperkaya ilmu yang berhubungan dengan ilmu sosial dan ilmu politik serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016.



BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai studi terdahulu, kerangka teoritis, operasionalisasi konsep, alur pemikiran dan argumen utama penulis terkait isu penelitian yang dibahas. Studi terdahulu akan menjadi panduan penulis untuk membantu dalam memahami bagaimana teori diaplikasikan dalam sebuah kasus, terutama dengan teori yang penulis gunakan. Dalam studi terdahulu tersebut penulis menggunakan acuan karya ilmiah dengan jurnal yang memiliki persamaan teori dan kasus dengan turut menjelaskan mengenai posisi penelitian penulis terkait studi terdahulu tersebut dan hubungannya dengan penelitian yang penulis teliti.

Dalam sub bab kerangka teoritis penulis akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yakni *conventional deterrence* dari Michael Gerson dan Daniel Whiteneck dalam jurnal *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War* yang merupakan teori mengenai aktor yang berusaha untuk mencegah tindakan yang akan dilakukan oleh aktor lain dengan menggunakan ancaman jika tindakan tertentu dilakukan, dalam hal ini dilakukan dengan melalui *conventional deterrence*. Variabel dan indikator terkait teori tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini. Dalam operasionalisasi teori, penulis akan memasukkan variabel dan indikator dari teori yang kemudian pada bab selanjutnya akan diaplikasikan ke dalam kasus yang diteliti. Dalam alur pemikiran penulis akan membuat kerangka yang akan mempermudah pembaca

dalam memahami penelitian penulis yang kemudian diikuti oleh argumen utama yang akan dibuktikan pada bab selanjutnya.

2.1. Studi Terdahulu

Terdapat tiga karya ilmiah yang akan digunakan penulis sebagai acuan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016 ini penulis menggunakan studi terdahulu dari sebuah karya ilmiah yang dilakukan oleh LTC Lee Li Huat dalam jurnal *Pointer Journal of The Singapore Armed Forces Volume 41 No. 4* yang berjudul *Will Strengthening the SAF Mean Strengthening Singapore's Deterrence As a Non-Nuclear State*.

Jurnal tersebut meneliti mengenai SAF (*Singapore Armed Forces*) yang menjadi bagian dari bentuk teknik *deterrence* Singapura, terhadap ancaman non konvensional sesuai dengan penerapan *effective deterrence* yang terdiri dari kredibilitas dan komunikasi agar strategi *deterrence* Singapura berjalan dengan baik.¹³ Penelitian tersebut mengungkap bahwa bentuk pencegahan Singapura terhadap potensial ancaman dipenuhi oleh tiga bentuk, yakni *credibility* dan *communication* yang merupakan bagian dari teori *deterrence* dan diplomasi yang melengkapi strategi *deterrence* Singapura.¹⁴ Dalam penelitian tersebut dapat terlihat bahwa *deterrence* yang dimiliki oleh Singapura adalah jenis *conventional deterrence* dengan mengandalkan kapabilitas non nuklir serta pasukan militernya. Lee Li Huat berargumen

¹³ LTC Lee Li Huat, "Will Strengthening The SAF Mean Strengthening Singapore's Deterrence As A Non-Nuclear State", (Pointer Journal of The Singapore Armed Forces Vol. 41 No.4), hal. 21.

¹⁴ Ibid, hal. 27.

bahwa ketika negara berusaha untuk memenuhi strategi *deterrence*, negara perlu untuk mewaspadaikan kemungkinan *security dilemma* yang terjadi, yakni ketika suatu negara melakukan aksi kuat melakukan *credibility* dan *communication* untuk melindungi diri dari ancaman maka aksi tersebut dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara lain akibat peningkatan kapabilitas dan komitmen negara untuk siap menyerang.

Setiap negara memiliki prioritas untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negaranya, termasuk Singapura yang memiliki strategi tertentu dalam menghadapi ancaman. Strategi pencegahan dan pertahanan Singapura dilakukan dengan teknik *deterrence* yang mengedepankan 3rd *Generation Army* sebagai kapabilitas militer terdepan Singapura dan melalui komitmen berupa *political will* ketika ancaman terjadi yang diperlihatkan pada penggunaan mobilisasi pasukan militer Singapura ketika terdapat latihan militer MALINDO DARSASA dari Malaysia dan Indonesia yang berada di dekat wilayah perbatasan Singapura.¹⁵ Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh Singapura dilakukan dengan dua arah, yakni melalui komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal yang dimaksud ialah komunikasi yang dilakukan melalui media terhadap masyarakat Singapura untuk menumbuhkan *national will* dalam memperkuat *deterrence*, sedangkan komunikasi eksternal didemonstrasikan kepada masyarakat internasional melalui pernyataan parlemen, *defence white paper* dan kerjasama latihan militer secara bilateral maupun multilateral.¹⁶

¹⁵ Ibid, hal. 26.

¹⁶ Ibid, hal. 27.

Penelitian Lee Li Huat memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaan tersebut yakni penulis menggunakan teori *deterrence* yang sama dalam penelitian tersebut, penelitian tersebut juga mengungkapkan mengenai teori *deterrence* yang lebih mengarah pada kemampuan dan kapabilitas militer dari *conventional forces* yang dimiliki oleh Singapura. Sedangkan perbedaannya terletak pada isu yang dibahas, Lee Li Huat menjelaskan mengenai *Singapore Armed Force* sebagai bagian dari bentuk *deterrence* Singapura, sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana implementasi *Readiness Action Plan* NATO untuk menghadapi Rusia dengan menggunakan teori *deterrence* yang dalam pengaplikasiannya untuk melihat bahwa RAP tersebut merupakan bentuk *conventional deterrence* NATO terhadap Rusia.

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan merupakan sebuah jurnal dari *US Air Force Institute for National Security Studies USAF Academy, Colorado* yang berjudul *Extended Deterrence and Allied Assurance: Key Concepts and Current Challenges for US Policy* karya Justin V. Anderson, Jeffrey A. Larsen dan Polly M. Holdorf. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2013 tersebut menjelaskan mengenai *deterrence* yang menjadi bagian penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melindungi sekutu Amerika Serikat dari intimidasi, koersi dan serangan dari potensial lawan dan bagaimana *deterrence* tersebut dilakukan di berbagai kawasan serta tantangan apa saja yang dihadapi Amerika Serikat ketika mengimplementasikan *deterrence* tersebut. Jenis yang digunakan dalam kasus tersebut adalah *extended deterrence*, yakni ketika negara A berusaha untuk melindungi negara

B dari kemungkinan serangan negara C. Justin Anderson dkk menjelaskan mengenai penggunaan *deterrence* yang dilakukan Amerika Serikat memiliki tujuan untuk melindungi kedaulatan, kepentingan nasional dan kebebasan untuk bertindak dengan meyakinkan potensial lawan bahwa tindakan tertentu yang bertentangan dengan hal tersebut akan mendapatkan respon yang bersifat *unacceptable cost*.¹⁷

Deterrence yang dilakukan oleh Amerika Serikat berisikan mengenai garansi keamanan bagi aliansi dari kemungkinan ancaman oleh potensial lawan dengan mengutamakan strategi keseimbangan antara *political resolve* dan *military capability*.¹⁸ Jurnal tersebut mengungkapkan bagaimana *deterrence* yang dilakukan Amerika Serikat di beberapa kawasan yang memiliki arti penting bagi kepentingan Amerika Serikat, seperti halnya Asia Timur, Timur Tengah dan NATO di Eropa dengan menyertakan beberapa tantangan yang dihadapi Amerika Serikat di setiap kawasannya. *Deterrence* tersebut meliputi kapabilitas berupa *conventional forces*, *nuclear forces* dan *missile defense*, sedangkan *political resolve* dalam *deterrence* Amerika Serikat meliputi *public statements*, *diplomacy*, *national strategic guidance*, *policies use of force* dan *defence treaties*.¹⁹

Penelitian tersebut membantu penulis memahami mengenai teori yang digunakan, yakni teori *deterrence*. Jurnal tersebut menggunakan teori yang sama yakni *deterrence*, meskipun jenis *deterrence* yang digunakan berbeda,

¹⁷ Justin Anderson, Jeffrey Larsen dan Polly Holdorf, "*Extended Deterrence and Allied Assurance: Key Concepts and Current Challenges for US Policy*", (Institute for National Security Studies, Usaf Academy Colorado), hal. 11.

¹⁸ Ibid, hal. 9.

¹⁹ Ibid, hal. 8.

namun penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam memahami mengenai pemahaman *deterrence* pada umumnya. Jenis *deterrence* yang digunakan dalam jurnal tersebut merupakan jenis *extended deterrence*, yakni *deterrence* yang dilakukan oleh negara A untuk melindungi negara B dari ancaman negara C. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah penggunaan teori yang diaplikasikan terhadap kasus, yakni jurnal tersebut memberikan studi kasus beberapa kawasan yang memiliki arti penting bagi Amerika Serikat dan menjadi salah satu kawasan yang merupakan bagian dari *deterrence* Amerika Serikat, sedangkan penelitian penulis mengaplikasikan teori dengan menggunakan studi kasus kebijakan RAP dengan meneliti implementasinya sebagai bentuk *conventional deterrence* NATO dalam menghadapi Rusia.

Studi terdahulu ketiga yang penulis gunakan merupakan sebuah jurnal dari *Russia Studies Centre Policy* yang berjudul *A Fateful Summit: The Future of NATO's Relationship With Russia* karya Andrew Foxall. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2014 tersebut menjelaskan mengenai dinamika hubungan antara NATO dan Rusia yang berubah ketika Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea pada tahun 2014. Andrew Foxall menjelaskan mengenai hubungan NATO dan Rusia sebelum krisis Ukraina yang banyak mengedepankan mengenai kerjasama terhadap ancaman seperti terorisme dan pelatihan gabungan mengenai *missile defence*.²⁰

²⁰ Andrew Foxall, 2014, "*A Fateful Summit: The Future of NATO's Relationship With Russia*", (Russia Studies Centre Policy Paper Volume 1 2014), hal. 4.

Meskipun beberapa peristiwa seperti konflik Rusia dan Georgia sempat melemahkan kerjasama NATO dan Rusia, namun kedua belah pihak masih mampu untuk mengembalikan posisi keduanya sebagai “*strategic partner*” seperti di awal kerjasama NRC.²¹ Krisis Ukraina merupakan “*game changer*” bagi strategi NATO, sebelumnya keamanan NATO selama 20 tahun terakhir lebih mengutamakan pada ancaman terorisme dan *failed states*, namun kini perlu untuk mengedepankan kembali ancaman *states* dalam kawasan yang telah berubah dari hubungan *partner* menjadi *threat*.²² Selain menjelaskan hubungan kedua pihak yang berkonflik, Andrew Foxall juga berpendapat bahwa terdapat inisiatif lain yang dapat NATO lakukan dalam merespon tindakan Rusia yakni dengan melakukan *rearmament* untuk membangun kembali kapabilitas militernya, pelatihan militer yang melibatkan segala level pembuat keputusan serta melakukan *forward deployment of forces* untuk segala sisi di negara anggota NATO.²³

Karya Andrew Foxall membantu penulis untuk lebih memahami mengenai dinamika hubungan NATO dan Rusia secara lebih mendalam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah adanya persamaan kasus yang digunakan yakni antara NATO dan Rusia, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan RAP yang dikeluarkan NATO sebagai bentuk respon terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman pasca aneksasi Rusia terhadap Crimea di tahun 2014. Penulis memiliki *research position* yang membedakan

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid, hal. 10.

penelitian penulis dengan karya ilmiah sebelumnya, yakni penulis meneliti mengenai implementasi RAP NATO saja sehingga penulis dalam penelitian ini berusaha untuk menambahkan ruang lingkup penelitian terkait implementasi RAP oleh NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016.

2.2. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis penulis membahas mengenai kajian teori yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian penulis mengenai implementasi *conventional deterrence* dalam *Readiness Action Plan* NATO guna menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016. Teori yang akan penulis gunakan merupakan teori *conventional deterrence* dari Michael Gerson dan Daniel Whiteneck dalam jurnal *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War*.²⁴

2.2.1. *Conventional Deterrence*

Penulis menggunakan teori *conventional deterrence* dengan pertimbangan bahwa teori tersebut mampu menjelaskan penelitian penulis mengenai implementasi RAP NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016 yang berusaha penulis teliti sebagai suatu bentuk pencegahan dengan kekuatan ancaman untuk mempengaruhi potensial lawan agar tidak mengambil tindakan yang tidak diinginkan disebabkan biaya dan resiko yang ditempuh akan lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang didapat. Sebelum memahami mengenai

²⁴ Michael Gerson dan Daniel Whiteneck, "*Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing Wars*", (Strategy Studies CAN 2009) hal. 1.

conventional deterrence, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana teori *deterrence* muncul dan berkembang.

Beberapa peneliti mengemukakan bahwa mencegah perang sama pentingnya dengan memenangkan perang. *Deterrence* telah menjadi salah satu prinsip strategis utama dalam hal mencegah perang. Pada masa Perang Dingin, *deterrence* dilakukan dengan menggunakan kekuatan nuklir yang disebut sebagai *nuclear deterrence* untuk mencegah perang, namun beberapa tokoh menyebutkan bahwa ancaman nuklir dalam *nuclear deterrence* dianggap kurang kredibilitasnya akibat alasan *morality* dalam penggunaan nuklir, maka *deterrence* kemudian berkembang dari awalnya yang merupakan ancaman *Massive Retaliation* dengan senjata nuklir menjadi *Flexible Response* yang meliputi *conventional elements* untuk mencegah perang.²⁵ Masa Perang Dingin menjadi masa awal teori tersebut ada dan berkembang. Namun dengan berakhirnya Perang Dingin dan munculnya dinamika baru dalam *security challenges* membuat teori *deterrence* penting untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan keamanan saat ini.

Kekuatan nuklir digunakan sebagai bentuk ancaman untuk membalas dan mencegah tindakan negatif lawan, suatu bentuk pencegahan yang mengacu pada upaya untuk mengurangi resiko potensial lawan melakukan tindakan tertentu yang tidak diinginkan, pada saat itu dilakukan dengan menguatkan kapabilitas nuklir yang memberikan dampak *unacceptable damage* terhadap potensial lawan, hal tersebut seperti yang

²⁵ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 8.

dilakukan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet pada masa Perang Dingin.²⁶ *Deterrence* menjadi salah satu cara aktor untuk mencapai keamanan negara, sehingga *deterrence* dapat dikatakan sebagai suatu permainan strategi ketika tindakan salah satu pihak akan mempengaruhi pihak lainnya. Penulis menggunakan teori tersebut dengan melihat adanya bentuk strategi pencegahan yang dilakukan oleh NATO terhadap Rusia pasca invasi Rusia di Ukraina, yakni ketika NATO dalam waktu yang singkat segera mengeluarkan bentuk respon berupa suatu rencana yang disebut sebagai *Readiness Action Plan* yang dikemukakan dalam Wales Summit 2014 sebagai bentuk respon yang dipicu oleh Rusia yang dianggap sebagai ancaman oleh NATO dengan tindakannya yang dianggap telah mencederai hubungan kedua belah pihak. Namun *deterrence* berkembang dengan berbagai macam jenis *deterrence*, seperti salah satunya pada masa Perang Dingin yang dilakukan melalui *nuclear deterrence*. Penulis dalam penelitian ini menggunakan *conventional deterrence* sesuai yang diungkapkan oleh Michael Gerson dan Daniel Whiteneck dalam jurnalnya, hal tersebut dikarenakan *conventional deterrence* penulis rasa lebih sesuai untuk melihat bagaimana implementasi RAP yang diterapkan oleh NATO.

Teori *deterrence* dikemukakan oleh beberapa tokoh semenjak Perang Dingin diantaranya Thomas Schelling dalam bukunya *The Strategy of Conflict* dan *Arms and Influence*, Frank Zagare dalam jurnalnya

²⁶ Project of the Nuclear Age Peace Foundation, "Deterrence", diakses dari: <http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/cold-war/strategy/strategy-deterrence.htm>, pada tanggal 13 Mei 2017 pukul 21.28 WIB.

mengenai *Perfect Deterrence*, Richard J. Harknett dalam *The Logic of Conventional Deterrence and the End of the Cold War*, Lawrence Freedman dalam *Coercion*, Michael Gerson dengan Daniel Whiteneck dalam *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War* dan sebagainya. Teori tersebut mengemuka seiring dengan munculnya *nuclear "umbrella" deterrence* pada masa Perang Dingin dan terus berkembang penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir seperti pada tahun 2001 dalam kebijakan Amerika Serikat yang melakukan *counterterrorism* dalam sebuah jurnal karya Alex Wilner dengan judul *Contemporary Deterrence and Counterterrorism* yang menunjukkan bahwa teori tersebut mampu diaplikasikan tanpa menggunakan kekuatan nuklir sebagai senjata utama dan bukan hanya dapat diaplikasikan melawan negara yang berkapabilitas nuklir tetapi juga dapat diterapkan pada aktor *non states*.

Thomas Schelling mengemukakan bahwa *deterrence* merupakan suatu konsep strategi yang dilakukan dengan mempengaruhi pilihan-pilihan yang akan diambil oleh aktor lain dengan mengemukakan bukti bahwa akan terdapat tindakan tertentu yang akan diambil jika aktor lain melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau bertentangan dengan kepentingan aktor tersebut.²⁷ *Deterrence* dilakukan oleh aktor untuk mencegah aktor lain melakukan sesuatu yang tidak diinginkan sebelum tindakan tersebut terjadi, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan

²⁷ Thomas Schelling, *"The Strategy of Conflict"*, (Harvard University, Cambridge Massachusetts) hal. 13.

ataupun keamanan aktor.²⁸ Pada dasarnya *deterrence* memiliki dasar umum yakni pihak A tidak akan menyerang jika pihak A mengetahui bahwa pihak B mampu untuk mengalahkan serangan dari pihak A terutama jika keuntungan yang diperoleh oleh pihak A tidak sebanding dengan kerugian yang diterima.²⁹ Beberapa negara berusaha untuk menghindari perang secara langsung dan dengan menggunakan *deterrence* tersebut maka negara diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Keamanan memiliki bentuk yang berbeda-beda dan keamanan dapat dicapai dengan berbagai cara. Menurut William Kaufmann, *deterrence* merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut, disebabkan *deterrence* merupakan suatu kebijakan yang berisikan langkah-langkah keamanan tanpa menimbulkan kekerasan dalam skala yang besar.³⁰ Namun meskipun begitu terdapat perbedaan antara *deterrence* dan *defense*. *Deterrence* ditujukan untuk mencegah atau menghindari perang, sedangkan *defense* digunakan untuk *limiting or ending war*, sehingga *deterrence* dilakukan lebih untuk perdamaian sedangkan *defense* dilakukan untuk *wartime*.

Deterrence dilakukan oleh aktor terhadap aktor lain dengan cara mempengaruhi, sehingga terdapat dua peran berbeda dalam teori tersebut, yakni peran *deterrer* dan *aggressor*. *Deterrer* merupakan aktor yang

²⁸ Elbridge Colby, 2007, "*Restoring Deterrence*", (National Intelligence and the Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction) hal. 415.

²⁹ Council on Foreign Relations, "*The Lost Logic of Deterrence*", diakses dari <http://www.cfr.org/world/lost-logic-deterrence/p30092>, pada tanggal 13 Mei 2017 pukul 22.31 WIB.

³⁰ William Kaufmann, 1954, "*The Requirements of Deterrence*", (Center of International Studies Princeton University) hal. 1.

melakukan pencegahan untuk mempengaruhi aktor lainnya yang disebut sebagai *aggressor*. *Aggressor* merupakan aktor potensial lawan yang menjadi sasaran *deterrent* untuk melakukan *deterrence* disebabkan aktor tersebut dianggap mengancam dengan melibatkan tindakan permusuhan terhadap *deterrent* di awal yang kemudian pihak tersebut merasa tercederai kedaulatan dan keamanannya.³¹ Dapat pula jika dianggap telah melanggar atau menghalangi kepentingan dan nilai yang dianggap penting bagi *deterrent*. *Deterrence* didasari oleh adanya penggunaan ancaman yang dapat dilakukan kepada potensial lawan jika tindakannya berlawanan dengan kepentingan aktor, sehingga keputusan untuk *deterrent* menggunakan kekuatan bergantung pada tindakan potensial lawan.³² Jika potensial lawan melakukan serangan maka akan ada respon tertentu dari *deterrent*, jika potensial lawan tidak melakukan serangan maka *deterrent* akan menahan diri. Dalam beberapa kasus, ancaman *deterrence* dapat terlihat dari komitmen yang muncul untuk mempertahankan aliansi, seperti NATO dalam *Article 5* mengenai pembelaan terhadap setiap negara anggotanya yang mendapat serangan dari aktor lain.

Michael Gerson dan Daniel Whiteneck mengemukakan bahwa dalam *deterrence*, yang mengutamakan upaya untuk meyakinkan pihak lawan untuk tidak melakukan tindakan tertentu, mempertahankan *status quo* merupakan tanda teknik *deterrence* berhasil.³³ Hal tersebut disebabkan bahwa tanda *deterrence* berhasil terlihat ketika pihak lawan tidak

³¹ Op.Cit., <http://www.cfr.org/world/lost-logic-deterrence/p30092>.

³² Michael Gerson, Op.Cit., hal. 21.

³³ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 15.

melakukan tindakan dikarenakan pihak lawan memahami tindakan tertentu akan menimbulkan kerugian yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang didapat. Dengan kata lain, *deterrence* berhasil ketika pihak lawan dalam posisi *inaction*. Namun terdapat tantangan dari teori *deterrence*, yakni sulit untuk menentukan keberhasilan *deterrence*, hal tersebut dikarenakan hal pertama yang perlu diketahui dan mustahil untuk diketahui adalah apakah potensial lawan dari awal memiliki keinginan untuk menyerang *deterrent*, serta adanya tugas potensial lawan yang harus mampu untuk melakukan “*rational calculations*”, yakni tugas aktor rasional yang mampu untuk menganalisa kerugian dan keuntungan dalam pilihan.³⁴ Hal tersebut sulit untuk diketahui kebenarannya dan akan terdapat kemungkinan bahwa *deterrence* sama sekali tidak diperlukan atau berguna dikarenakan potensial lawan, yang *deterrent* kira, belum tentu ingin melakukan penyerangan terhadap *deterrent*. *Deterrence* dianggap juga sebagai psikologikal strategi dalam melakukan pencegahan. Pada dasarnya *deterrence* dapat dikatakan sebagai “*believable bluff*”. *Deterrence* bukanlah sebuah tindakan, melainkan hanya *bluff* yang dilakukan dengan menggunakan *credibility* dan *strategic communications*. Teori tersebut ingin membuat pihak lawan percaya bahwa mereka tidak ingin berperang melawan *deterrent*. Selama lebih dari 70 tahun *deterrence* telah mampu untuk menjaga perdamaian, karena pada dasarnya tidak ada negara yang akan benar-benar menggunakan nuklir dan mengorbankan wilayahnya sebagai lahan perang nuklir.

³⁴ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 16.

Deterrence menjadi proses psikologikal mengenai persepsi dan mispersepsi potensial lawan.³⁵ Hal tersebut dikarenakan ketika *deterrence* dikatakan berhasil, potensial lawan mungkin akan berdalih bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk menyerang dari awal, disebabkan tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah potensial lawan memiliki keinginan untuk menyerang *deterrent*.³⁶ *Deterrence* pada umumnya merupakan strategi yang dirancang dengan dua prinsip mekanisme, yakni *deterrence by punishment* dan *deterrence by denial*.

Punishment atau disebut sebagai *countervalue* merupakan mekanisme yang ditargetkan pada *soft target* seperti populasi dan industrial yang mengakibatkan kerugian tinggi bagi potensial lawan yang tidak sebanding dengan keuntungan yang awalnya diperkirakan akan didapatkan, sedangkan ancaman dengan *denying* atau disebut sebagai *counterforce* merupakan ancaman yang menargetkan aset militer dan politikal lawan dengan tujuan untuk mencegah lawan mencapai segala tujuan yang diinginkan dengan penggunaan kekuatan.³⁷ Ancaman dengan *counterforce* tersebut yang penulis lihat secara politik dari penundaan hubungan kedua pihak dalam NRC selama lebih dari 2 tahun dan secara militer dalam kebijakan RAP NATO dalam menghadapi Rusia dengan langkah militernya berupa *assurance measures* dan *adaptive measures* di dalamnya. Menurut Michael Gerson dan Daniel Whiteneck, *deterrence by denial* menjadi prinsip mekanisme utama dari *conventional deterrence*.

³⁵ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 22.

³⁶ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 23.

³⁷ Centre for Historical Analysis and Conflict Research, "A Difficult Game to Play", (Slim Road, Camberley) hal. 4.

Deterrence by denial lebih memfokuskan pada ancaman untuk mengatasi potensial lawan dengan kekuatan di medan perang, kemampuan untuk pencegahan tersebut bergantung pada kemampuan dalam penanganannya secara cepat dan pertahanan yang kuat dalam medan tempur seperti salah satunya kemampuan untuk secara cepat dapat mengakses suatu wilayah dan hal tersebutlah yang disebut sebagai *conventional deterrence*.

Pasca Perang Dingin dengan pergeseran keseimbangan dalam berbagai bidang yang meliputi militer, ekonomi dan politik, telah merubah dan meningkatkan tantangan mengenai krisis dan konflik yang terjadi dalam antar negara. Dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya krisis dan konflik antar negara di era kini, kekuatan konvensional dapat menjadi peran penting dalam mengatasi dan menghalangi agresi yang terjadi di dalam kawasan. *Conventional deterrence* dapat digunakan dalam menghadapi negara-negara yang bukan saja merupakan negara non nuklir, tetapi juga dapat digunakan dalam menghadapi negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir. Ketika suatu negara memiliki kekuatan nuklir, negara tersebut cenderung lebih berani untuk menggunakan *conventional forces* dalam melawan negara-negara lain. Hal tersebut dikarenakan negara tersebut memiliki perlindungan utama melalui kekuatan nuklirnya sebagai bentuk pencegahan tertinggi. *Conventional forces, missile defense* dan kepemilikan nuklir dapat membantu suatu negara dalam mencapai *powerful deterrent* dalam menghadapi negara-negara yang juga memiliki kekuatan nuklir.³⁸ Dengan melakukan *conventional deterrence*, suatu

³⁸ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 11.

negara dapat mengalihkan *conventional deterrence* yang telah dimiliki menjadi suatu kapabilitas untuk mengikat lawan dalam suatu konflik atau krisis jika *conventional deterrence* yang dilakukan di awal telah gagal.

Dalam melakukan teknik *conventional deterrence* terhadap potensial lawan, terdapat beberapa bagian penting yang membentuk *conventional deterrence* menurut Michael Gerson dan Daniel Whiteneck dalam *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War*, yakni *credibility* dan *strategic communications*. Tanpa bagian penting tersebut *conventional deterrence* tidak dapat bekerja untuk menghadapi pihak lawan. *Credibility* dan *strategic communications* tersebut yang kemudian akan penulis gunakan sebagai variabel dalam penelitian penulis.

2.2.1.1 *Credibility*

Conventional deterrence dibentuk dengan menggunakan ancaman yang memiliki *credibility*.³⁹ *Credibility* dalam *conventional deterrence* merupakan hal yang penting untuk menunjukkan kepada potensial lawan bahwa *deterrer* mampu dan mau untuk menggunakan kekuatan untuk menghadapi potensial lawan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan *deterrer*.⁴⁰ *Credibility* merupakan sesuatu yang dipercaya, dalam *deterrence*, suatu *credibility* penting sebagai elemen ancaman terhadap potensial lawan.

³⁹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

⁴⁰ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

Credibility dalam *conventional deterrence* diwujudkan dalam bentuk *military capabilities* dan *political resolve*.⁴¹ *Credibility* diperlukan sebagai bentuk ancaman bahwa potensial lawan mempercayai bahwa *deterrent* memiliki kapabilitas tertentu secara militer yang mampu untuk *mendeterr* potensial lawan dan memiliki tekad politik untuk menggunakan kapabilitas tersebut. Kapabilitas militer yang diperlukan merupakan kapabilitas militer yang mampu untuk membuat potensial lawan percaya bahwa *deterrent* memiliki *proper capability* untuk bertindak terhadap ancaman ketika diperlukan, sesuatu yang mampu untuk mengakses wilayah dan mempertahankan kekuatan tempur dalam medan.⁴² Dalam melakukan *deterrence*, kredibilitas tidak hanya bergantung kepada kekuatan kinetik dalam militer yang bersifat ofensif, tetapi juga diperlukan keyakinan atau komitmen yang disebut sebagai *political resolve* untuk menggunakan kekuatan kapabilitas tersebut, yakni dengan tidak terpengaruh oleh usaha defensif dan dinamika politik regional potensial lawan.⁴³

Conventional deterrence menggunakan ancaman untuk mencegah lawan dalam mencapai tujuan melalui agresi, sehingga *local power* atau *conventional forces* merupakan hal yang penting. Hal tersebut dikarenakan dalam *conventional deterrence* diperlukan adanya kekuatan yang mampu untuk secara cepat dikerahkan dalam medan.⁴⁴

Conventional deterrence dilakukan pada masa Perang Dingin seiringan

⁴¹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

⁴² Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

⁴³ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

⁴⁴ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 3.

dengan dilakukannya *nuclear deterrent*. Pada masa tersebut NATO mengandalkan *conventional forces* untuk menjamin keamanan negara-negara di bagian Eropa yang menghadapi pasukan Pakta Warsawa dengan diiringi oleh kekuatan nuklir sebagai pelindung jika terjadi serangan nuklir pada masa tersebut.⁴⁵ Beberapa peneliti masih mempercayai bahwa *deterrence* yang paling ampuh dan utama masih dipegang oleh kekuatan nuklir, namun sejarah peperangan membuktikan bahwa *conventional deterrence* lebih kredibel dibandingkan nuklir. Hal tersebut dapat terlihat dari perang pada sebelumnya yang melibatkan negara dengan kekuatan nuklir dengan negara non nuklir seperti Perang Korea dan Vietnam yang memperlihatkan bahwa kekuatan nuklir tidak memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat dalam perang yang melibatkan Amerika Serikat.

Conventional deterrence merupakan mekanisme penting untuk mencegah kemungkinan adanya agresi dalam kawasan, suatu negara akan lebih memiliki keinginan untuk menyerang negara tetangga jika negara tersebut mempercayai bahwa tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud sebelum pasukan dari negara tetangga tersebut dapat melawan di medan. Negara tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk menang melalui agresi konvensional jika *local power* negara tetangga tersebut tidak dapat secara sigap dan cepat mencegah dan melawan di medan perang, akibatnya negara akan dapat mencapai tujuannya dengan *'fait accompli'*. *Fait accompli* merupakan suatu

⁴⁵ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 9.

istilah mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang telah diputuskan sebelum pihak yang mendapat akibat mengetahuinya sehingga tidak ada pilihan bagi pihak tersebut untuk bertindak selain harus menerima.

Keberhasilan *conventional deterrence* bergantung pada kemampuan *deterrer* untuk menyebarkan dan mempertahankan kekuatan tempur serta mampu untuk mengakses ke wilayah medan dengan sigap dan cepat.⁴⁶ Kapabilitas dalam bentuk militer menunjukkan bahwa *deterrer* memiliki kekuatan berbentuk nyata yang mampu untuk mengancam dan membuat *aggressor* memikirkan kembali tujuannya untuk menyerang *deterrer*, selain itu terdapat *political resolve* yang menjadi bagian dari *credibility*. *Political resolve* yang diwujudkan dalam bentuk *policies on use of force* merupakan suatu bentuk komitmen secara politik yang menunjukkan bahwa terdapat rasa keinginan untuk menggunakan kapabilitas militer sehingga ancaman dapat lebih terlihat nyata.

Kepemilikan kapabilitas militer yang mumpuni tidak akan berguna untuk mengancam pihak lawan jika tidak disertai *political resolve* untuk menggunakan kapabilitas militer tersebut. Meskipun komitmen secara politik yang terlihat menentukan jalannya *deterrence*, kepemilikan kapabilitas militer tidak dapat dipandang sebelah mata, hal tersebut disebabkan bahwa pihak *deterrer* perlu untuk meyakinkan pihak lawan, guna mempengaruhi mereka dalam mengambil tindakan,

⁴⁶ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 25.

dengan membuat mereka mengetahui dan percaya bahwa *deterrer* memiliki kekuatan nyata untuk menyerang sehingga pihak lawan akan melakukan kalkulasi perhitungan yakni "*rational actor*" yang kemudian jika kredibilitas tersebut sukses akan menimbulkan situasi *status quo* seperti yang diinginkan *deterrer*.

Aggressor perlu untuk mempercayai bahwa bentuk *conventional deterrence* secara militer mampu untuk menimbulkan kerusakan yang berat. Setiap negara memiliki kapabilitas dalam bentuk militer untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, termasuk untuk melakukan *conventional deterrence*, namun *political resolve* negara untuk menggunakan kekuatan tersebut bukanlah hal yang mudah, terdapat kemungkinan bahwa *political resolve* tidak dapat tersampaikan dengan baik, atau *aggressor* yang meragukan kredibilitas *deterrer* sehingga tetap berkeinginan untuk menyerang terutama jika termotivasi untuk mencapai tujuan.⁴⁷ Kapabilitas militer yang digunakan untuk *conventional deterrence* sendiri bukan merupakan kapabilitas militer biasa. Jika *conventional deterrence* hanya memerlukan kapabilitas militer biasa maka dapat disimpulkan bahwa setiap negara di dunia ini sedang melakukan *deterrence*. Untuk itu kapabilitas militer dalam *conventional deterrence* merupakan kapabilitas militer khusus yang dapat menimbulkan rasa mengancam dan bersifat sangat ofensif serta memiliki arti strategis tertentu dan diperlukan *political resolve* pula agar arti strategis dari kapabilitas militer tersebut dapat tersampaikan.

⁴⁷ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 17.

Dalam hal ini, *deterrence* yang digunakan merupakan jenis *conventional deterrence*, sehingga kapabilitas militer yang digunakan pun merupakan *conventional forces*, yakni sesuatu yang mampu untuk mengakses wilayah dan mempertahankan kekuatan tempur dalam medan.

Political resolve bergantung kepada seberapa besar kepentingan *deterrer*. Tingkat tekad tersebut dalam *political resolve* merupakan fungsi dari kepentingan *deterrer*, semakin erat isu yang dipertaruhkan terkait dengan kepentingan *deterrer* maka akan semakin besar tekad atau kemauan *deterrer* dalam melakukan *conventional deterrence*.⁴⁸

Kredibilitas dari *deterrence* akan bergantung kepada kemampuan *deterrer* untuk mempengaruhi potensial lawan bahwa *deterrer* memiliki *proper capability* secara militer untuk mengakibatkan kerusakan atau mampu untuk menghadang potensial lawan tidak peduli apa yang potensial lawan lakukan untuk mencegah atau menghalangi respon *deterrer*.⁴⁹

2.2.1.2 Strategic Communications

Strategic communications merupakan komponen penting lainnya dalam teori *conventional deterrence* selain *credibility* yang telah dijelaskan sebelumnya. *Credibility* menekankan adanya kapabilitas militer dan *political resolve* untuk melakukan *conventional deterrence*, sedangkan *strategic communications* digunakan untuk menyampaikan

⁴⁸ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 27.

⁴⁹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 30.

ancaman dalam bentuk kekuatan dan tekad tersebut kepada pihak lawan.⁵⁰ Dengan kata lain, kapabilitas militer dan tekad secara politik tersebut tidak akan tersampaikan kepada pihak lawan jika tidak dikomunikasikan dengan baik dan jelas. Adanya kapabilitas militer dan tekad politik dalam *credibility* tidak akan membuat *conventional deterrence* berjalan dengan baik jika hal tersebut tidak mampu dikomunikasikan kepada *aggressor*, sehingga dapat dikatakan bahwa *strategic communications* dalam *conventional deterrence* membahas mengenai bagaimana *deterrer* mengartikulasikan kapabilitas militer untuk merespon tindakan *aggressor* dan mendemonstrasikan *political resolve* *deterrer* dalam bentuk *policies on use of force* untuk mengancam *aggressor*.

Menurut Michael Gerson dan Daniel Whiteneck, *strategic communications* memiliki peran signifikan dalam *conventional deterrence*, yakni untuk mengkomunikasikan kepada pihak lawan mengenai tindakan spesifik yang tidak *deterrer* inginkan dan untuk mengkomunikasikan *credibility*.⁵¹ Tingkat keberhasilan dari teori tersebut akan meningkat jika potensial lawan memahami mengenai tindakan spesifik mana yang tidak diinginkan *deterrer*.⁵² Hal yang dikomunikasikan dalam teori tersebut yakni tidak sembarang kapabilitas militer, namun kapabilitas militer, yang dalam hal ini *conventional forces*, yang memiliki arti strategis dan kemampuan

⁵⁰ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

⁵¹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

⁵² Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

tertentu untuk menimbulkan 'costs' dan mengurangi tingkat keberhasilan potensial lawan. Sisi tersebut penting untuk dikomunikasikan agar dapat diketahui bahwa *deterrer* memiliki kemampuan yang dapat menyesuaikan terhadap segala tantangan dari potensial lawan.

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan *credibility* dalam *conventional deterrence*, yakni dengan cara *communication through words* dengan mengkomunikasikan kepentingan *deterrer*, kemauan untuk mengartikulasikan dengan tujuan sebagai pertahanan, dan menyampaikan ancaman kepada pihak lawan dan jaminan kepada aliansi.⁵³ Melalui cara tersebut maka *deterrer* akan menarik perhatian masyarakat domestik dan internasional bahwa *deterrer* memiliki kredibilitas yang tinggi. *Communication through words* penting dilakukan dengan melalui *public statement* dari *political leader*.⁵⁴ Hal tersebut dikarenakan penyampaian dari *political leader* mampu menarik perhatian domestik dan internasional untuk mempercayai kredibilitas. *Public statements* yang dilakukan *leader* akan mampu meyakinkan potensial lawan bahwa *deterrer* akan menggunakan kekuatan jika diperlukan, dikarenakan jika *leader* bertolak belakang dengan apa yang sudah dinyatakan secara publik maka akan terdapat dampak reputasi *deterrer* yang akan tercederai dalam domestik dan internasional.⁵⁵ Namun cara yang dapat dilakukan

⁵³ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

⁵⁴ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 32.

⁵⁵ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 32.

bukan saja melalui komunikasi secara verbal. Cara lain yang dapat dilakukan selain *by words* adalah melalui *communication through actions*.

Menurut Michael Gerson dan Daniel Whiteneck, mengkomunikasikan *credibility* dilakukan bukan hanya dengan melalui apa yang kita sampaikan tetapi juga melalui apa yang kita lakukan.⁵⁶ Terdapat kemungkinan bahwa pihak lawan hanya akan menganggap *statement deterrer* sebagai bentuk *bluffing* atau *cheap talk*, sehingga *aggressor* tidak percaya dengan ancaman yang disampaikan oleh *deterrer*.⁵⁷ *Actions* yang dapat dilakukan untuk semakin membuat *aggressor* percaya dan terancam adalah melalui *military actions* yang juga dapat menjadi suatu instrumen politik untuk mempengaruhi *aggressor* agar percaya bahwa ancaman tersebut nyata dan akan terjadi. *Military actions* tersebut dapat meliputi aktivitas rutin seperti melaksanakan pelatihan gabungan dan *forward presence* untuk menyampaikan kepada pihak lawan mengenai kepentingan, kapabilitas dan keputusan *deterrer*.⁵⁸ *Communication through actions* dilakukan untuk membuktikan kepada potensial lawan bahwa *deterrer* serius dalam menegakkan ancaman kapabilitas militer dan tekad politik..

Penulis melihat bahwa *conventional deterrence*, dengan menggunakan *credibility* dan *strategic communications* terhadap *aggressor*, merupakan teori yang tepat untuk menjelaskan implementasi

⁵⁶ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

⁵⁷ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

⁵⁸ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

Readiness Action Plan NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam implementasi tersebut terdapat *credibility* dan *strategic communications* yang bekerja sesuai dengan teknik *conventional deterrence* yang ditulis oleh Michael Gerson dan Daniel Whiteneck dalam *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War*.

2.3.Operasionalisasi Teori

Dalam sub bab berikut penulis akan mengoperasionalkan poin-poin yang terdapat dalam *credibility* dan *strategic communications* yang menjadi bagian dari *conventional deterrence*. Penulis menggunakan teori tersebut disebabkan teori tersebut penulis rasa mampu menjelaskan mengenai implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016.

2.2.2. Credibility

Variabel *credibility* akan dioperasionalkan dengan menggunakan dua indikator yakni *military capability* dan *political resolve*. Kapabilitas militer dalam *conventional deterrence* merupakan komponen yang penting agar pihak lawan mengetahui bahwa *deterrent* memiliki *proper capability*, yakni memiliki kekuatan yang bersifat ofensif untuk dapat mengancam lawan. Kapabilitas militer tersebut bukan merupakan kapabilitas militer *ordinary* yang dimiliki setiap negara. Dalam hal ini *deterrent* memiliki kapabilitas militer yang merupakan *conventional forces* dan memiliki arti strategis tersendiri untuk digunakan dalam *deterrence*.

Kapabilitas militer yang digunakan dalam *conventional deterrence* akan dioperasionalkan dengan menggunakan parameter berupa *conventional forces*. *Conventional forces* tersebut akan menjadi parameter bahwa terdapat kapabilitas militer tertentu untuk melakukan *conventional deterrence*. Dalam *deterrence* tidak dapat hanya menggunakan komponen kapabilitas militer *ordinary* seperti yang dimiliki setiap negara, hal tersebut dikarenakan jika *deterrence* hanya memerlukan kapabilitas militer biasa maka setiap negara dapat dianggap sedang melakukan *deterrence*.

Conventional forces tersebut akan diteliti dalam penelitian ini mengenai penggunaannya di RAP yang dikerahkan dalam langkah operasi di dalam rencana tersebut. Selain itu dalam penelitian berikut juga akan menjelaskan mengenai *weapon* dalam *deterrence* yang dilakukan NATO terhadap Rusia dan bagaimana arti strategis *weapon* tersebut. Kapabilitas militer antara Rusia dan negara anggota NATO merupakan pihak yang termasuk sebagai jajaran negara berkapabilitas militer tertinggi di dunia. Dalam operasionalisasi terhadap kasus yang penulis teliti berkaitan dengan variabel dan indikator sebelumnya, penulis akan meneliti mengenai penggunaan persenjataan konvensional dalam RAP yang dikerahkan NATO untuk menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik pada tahun 2014 hingga 2016 yang digunakan dalam RAP NATO untuk menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016.

Indikator kedua yang digunakan dalam *credibility* adalah *political resolve* yang merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa terdapat rasa keinginan untuk menggunakan kapabilitas tersebut sehingga ancaman

dapat terlihat nyata. Dengan indikator tersebut penulis akan melihat melalui *political will* atau dapat juga disebut dengan *policies on use of force*, yakni komitmen yang diperlihatkan dalam tindakan politik untuk merespon secara militer ketika hal tersebut diperlukan. Hal tersebut menjelaskan bahwa kapabilitas militer tertentu dibutuhkan untuk mempersiapkan kekuatan secara fisik untuk mengancam lawan dan komitmen melalui *decisions* diperlukan untuk merespon lawan dengan ancaman menggunakan kekuatan militer. Adanya *policies on use of force* tersebut akan membuat pihak *deterrer* terlihat lebih kuat dan mengancam di pandangan pihak *aggressor*. Pasca invasi Rusia terhadap Ukraina dan kemunculan RAP telah membawa perubahan signifikan terkait *security decisions* yang dilakukan NATO terhadap Rusia dengan jelas dalam implementasi RAP, beberapa negara anggota NATO yang dekat perbatasan dengan Rusia merupakan negara yang memiliki langkah operasi signifikan dalam RAP. Dalam operasionalisasi terhadap kasus yang penulis teliti berkaitan dengan variabel dan indikator sebelumnya, penulis akan meneliti mengenai adanya *policies for use of force* oleh NATO dalam implementasi RAP untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk menghadapi Rusia pada tahun 2014 hingga 2016.

2.2.3. *Strategic Communications*

Melalui variabel *strategic communications* dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memaparkan mengenai bagaimana mengkomunikasikan atau mengartikulasikan kepada pihak *aggressor* mengenai tindakan spesifik yang tidak *deterrer* inginkan dan untuk

mengkomunikasikan *credibility* dalam *conventional deterrence*. Variabel tersebut akan dioperasionalkan dengan menggunakan dua indikator, yang pertama yakni *communication through words* yang diukur dari adanya *public statements* yang dilakukan oleh NATO mengenai Rusia dengan mengkomunikasikan kepentingan *deterrent*, kemauan untuk mengartikulasikan dengan tujuan sebagai pertahanan, dan menyampaikan ancaman kepada pihak lawan serta memberikan jaminan mengenai keamanan kepada aliansi.⁵⁹ Dengan tindakan Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina, hal tersebut telah memberikan perubahan terhadap strategi NATO yang diperlihatkan dengan RAP yang diiringi oleh *statement* maupun *press release* oleh petinggi NATO mengenai operasi tersebut dan mengenai keberlanjutan dinamika hubungan kedua belah pihak untuk mengedepankan keamanan negara anggota aliansi. Dalam operasionalisasi terhadap kasus yang penulis teliti berkaitan dengan variabel dan indikator sebelumnya, penulis akan meneliti mengenai adanya pernyataan yang dilakukan oleh pemimpin dari NATO terhadap Rusia terkait langkah-langkah dalam operasi RAP.

Indikator yang kedua, yakni *communication through actions* merupakan bentuk komunikasi yang ditunjukkan dengan tindakan melalui *military actions* yang juga dapat menjadi suatu instrumen politik untuk mempengaruhi *aggressor* agar percaya bahwa ancaman tersebut nyata dan akan terjadi. *Communication through actions* tersebut diukur dari adanya *bilateral or multilateral exercises* yang dilakukan dalam RAP, segala

⁵⁹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

bentuk aktivitas yang meliputi melaksanakan pelatihan gabungan, *forward presence*, untuk menyampaikan kepada pihak lawan mengenai kepentingan, kapabilitas dan keputusan *deterrer*.⁶⁰ RAP merupakan kebijakan yang berisikan langkah-langkah *assurances* dan *adaptive measures* yang dilakukan oleh negara anggota aliansi dengan menggunakan berbagai operasi kerjasama secara militer, terutama bagi negara-negara anggota yang dekat dengan perbatasan untuk *detering* terhadap Rusia. Dalam operasionalisasi terhadap kasus yang penulis teliti berkaitan dengan variabel dan indikator sebelumnya, penulis akan meneliti mengenai adanya kegiatan atau aksi berupa militer oleh NATO dalam implementasi operasi *Readiness Action Plan* dengan jenis *joint exercises* dan *forward presence*. Berikut merupakan tabel operasionalisasi teori yang penulis sertakan.

Table 1 Operasionalisasi Teori

(Sumber: Data Olahan Penulis)

Teori	Variabel	Indikator	Parameter	Operasionalisasi
<i>Conventional Deterrence</i>	<i>Credibility</i>	<i>Military Capability</i>	<i>Conventional forces</i>	Penggunaan persenjataan konvensional dalam <i>Readiness Action Plan</i> NATO untuk menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014-2016.
		<i>Political Resolve</i>	<i>Policies on use of force</i>	Adanya <i>policies on use of force</i> oleh

⁶⁰ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.



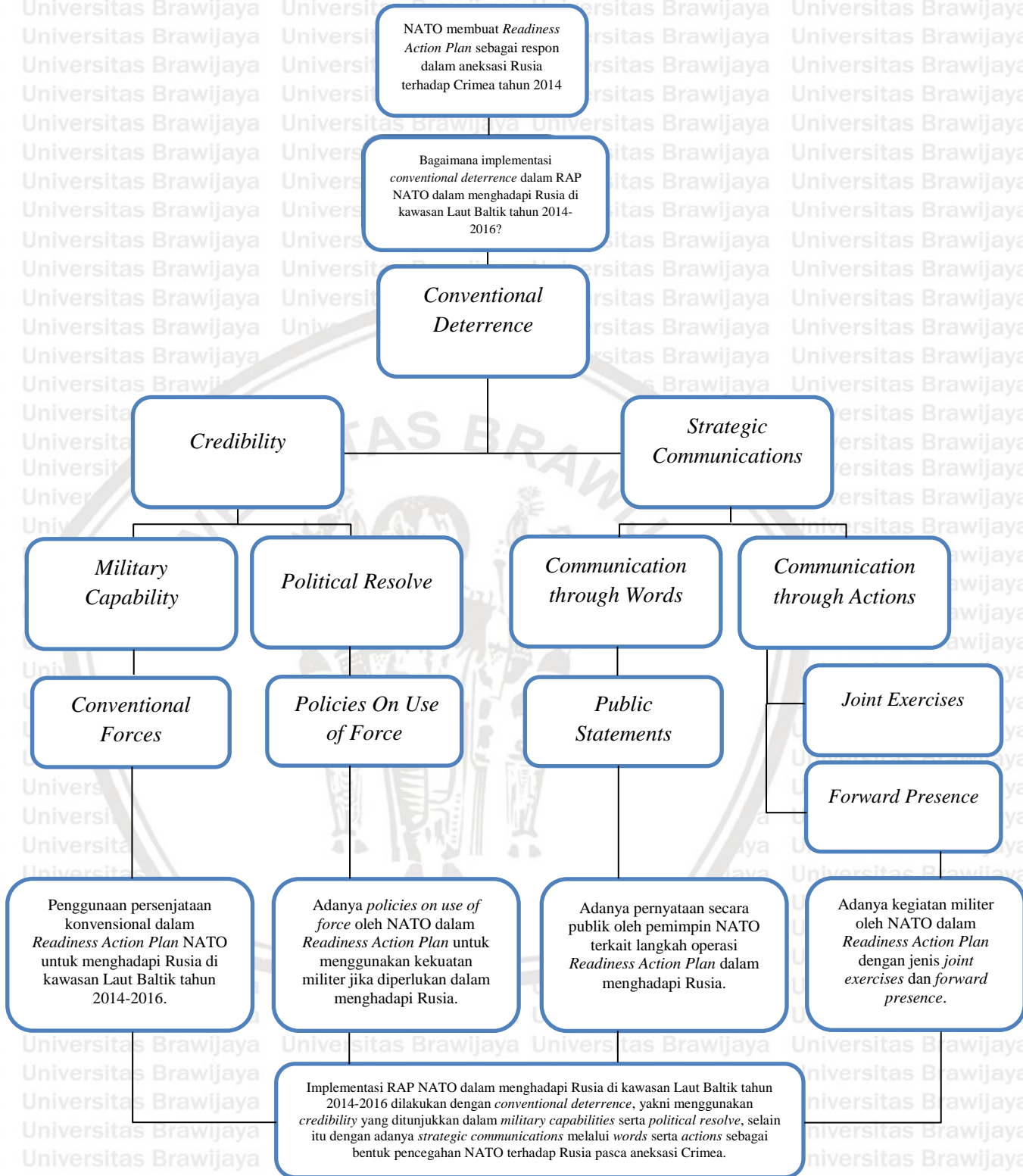
				NATO dalam <i>Readiness Action Plan</i> untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan dalam menghadapi Rusia.
Strategic Communications	<i>Communication through words</i>	<i>Public statements</i>		Adanya pernyataan secara publik oleh pemimpin NATO terkait langkah operasi <i>Readiness Action Plan</i> dalam menghadapi Rusia.
	<i>Communication through actions</i>	1. <i>Joint exercise</i> 2. <i>Forward presence</i>		Adanya kegiatan militer oleh NATO dalam <i>Readiness Action Plan</i> dengan jenis <i>joint exercises</i> , dan <i>forward presence</i> .

2.4. Alur Pemikiran

Penulis membuat tabel alur pemikiran untuk membantu pembaca memahami alur pemikiran dalam penelitian ini.



Bagan 1 Alur Pemikiran



2.5. Argumen Utama

Implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016 dilakukan dengan *conventional deterrence*, yakni menggunakan *credibility* yang ditunjukkan dalam *military capabilities* serta *political resolve*, selain itu dengan adanya *strategic communications* melalui *words* serta *actions* sebagai bentuk pencegahan NATO terhadap Rusia pasca aneksasi Crimea.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan proses dari suatu fenomena. Penelitian berikut penulis akan memaparkan implementasi *conventional deterrence* dalam *Readiness Action Plan* NATO guna menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014 hingga 2016 dengan menggunakan teori *conventional deterrence* dan melihat sejauh mana implementasi tersebut berdasarkan data yang ada.

Penulis akan menarik kesimpulan terkait bagaimana implementasi *Readiness Action Plan* tersebut dengan teknik *conventional deterrence* meliputi *credibility* dan *strategic communications*.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulis dimulai pada tahun 2014 dengan pertimbangan bahwa kebijakan *Readiness Action Plan* dari NATO mulai dibuat dan diimplementasikan pada tahun 2014. Dalam penelitian ini terdapat batasan tahun penelitian hingga tahun 2016, hal tersebut penulis lakukan dengan pertimbangan bahwa implementasi *Readiness Action Plan* tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga penelitian berikut akan dilakukan dengan melihat implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam

menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik yang dimulai pada tahun 2014 hingga 2016.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang meliputi studi kepustakaan dengan menggunakan sumber dari buku, jurnal penelitian, dokumen resmi, literatur lainnya dan media massa seperti berita dan situs resmi pemerintahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian berikut menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif merupakan analisa data yang dipaparkan dalam bentuk narasi dan tidak dalam bentuk statistik. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan diolah dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan untuk diuji keabsahannya.

3.5. Sistematika Penulisan

Penelitian implementasi *Readiness Action Plan* NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik tahun 2014-2016 berisikan enam bab dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab tersebut penulis membahas mengenai latar belakang dibuatnya kebijakan *Readiness Action Plan*

oleh NATO guna menghadapi Rusia dengan rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi *conventional deterrence* dalam *Readiness Action Plan* tersebut, serta tujuan dan manfaat yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Bab II Kerangka Pemikiran

Bab II berisikan sub bab studi terdahulu, kerangka teoritis, operasionalisasi teori, alur pemikiran dan argumen utama. Bab tersebut membahas mengenai acuan penelitian yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, dan penjelasan mengenai teori yang penulis gunakan dalam penelitian beserta operasionalisasi dan hipotesa penulis dalam penelitian ini.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab III berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian yang penulis gunakan yang merupakan penelitian deskriptif, ruang lingkup penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 hingga 2016, teknik pengumpulan data sekunder dan analisis data kualitatif serta sistematika penulisan.

4. Bab IV Dinamika Hubungan NATO dan Rusia

Bab IV berisikan mengenai gambaran umum kasus yang penulis teliti, penulis memaparkan sejarah singkat hubungan kedua pihak dan mengenai dinamika hubungan antara NATO dan Rusia sebelum dan

sesudah aneksasi Rusia terhadap Crimea pada tahun 2014 serta penjelasan mengenai RAP NATO.

5. Bab V Implementasi *Readiness Action Plan* NATO

Bab V berisikan pemaparan mengenai bagaimana implementasi RAP NATO dalam menghadapi Rusia dengan menggunakan teori yang penulis putuskan untuk gunakan yakni teori *conventional deterrence* dari Michael Gerson dan George Whiteneck dalam jurnal *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War*.

6. Bab VI Penutup

Bab VI berisikan kesimpulan mengenai penelitian dengan disertai saran untuk penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB IV

DINAMIKA HUBUNGAN NATO DAN RUSIA

Hubungan antar negara dalam suatu kawasan menentukan kebijakan dan respon yang akan dibuat oleh suatu negara dalam kawasan tersebut. Salah satunya adalah hubungan yang dimiliki oleh negara anggota NATO dengan Rusia dalam kawasan Laut Baltik yang merupakan hubungan yang penuh akan provokasi dan bersifat konfliktual. Sejarah Perang Dingin membuat negara-negara beraliansi hingga saat ini dan menjadikan hubungan antar negara yang memiliki sejarah tersebut menjadi negara yang berpotensi dalam menimbulkan konflik. Seperti halnya yang terjadi pada konflik antara Rusia dan Ukraina yang kemudian memperburuk hubungan Rusia dengan negara-negara di Eropa terutama di negara-negara kawasan Laut Baltik. Aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea menimbulkan reaksi keras bagi negara-negara di sekitarnya termasuk bagi negara anggota NATO.

Sehingga sebuah bentuk rencana dibuat oleh NATO yang disebut dengan *Readiness Action Plan* akibat adanya intervensi Rusia di konflik Ukraina. Tujuan dari RAP tersebut adalah untuk membuat negara aliansi siap untuk merespon secara cepat dan tegas terhadap berbagai *security challenges* di sekitar kawasan, termasuk berbagai tantangan keamanan yang dipicu oleh Rusia pasca aneksasinya terhadap Crimea. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan antara NATO dengan Rusia, konflik aneksasi Crimea yang melibatkan Rusia dan Ukraina yang menjadi cikal bakal dibentuknya RAP, bagaimana

dinamika yang terjadi antar keduanya pasca aneksasi tersebut serta penjelasan mengenai RAP.

4.1. Dinamika Hubungan NATO dan Rusia Pra Aneksasi Crimea

Hubungan NATO dan Rusia tidak akan terlepas dari sejarah Perang Dingin yang sebelumnya terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, hal tersebut diawali dengan terbentuknya NATO yang awalnya memiliki tujuan yakni salah satunya untuk mencegah ekspansi komunis yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara lainnya. Sebelumnya memahami mengenai dinamika hubungan antara NATO dan Rusia, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai mengenai profil NATO secara keseluruhan. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) merupakan organisasi aliansi militer antar pemerintah yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa yang berdiri semenjak Perang Dingin, lebih tepatnya pada 4 April 1949 berdasarkan *North Atlantic Treaty* yang dibuat kala itu.⁶¹ Aliansi tersebut didirikan dengan melihat adanya ekspansi komunis yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara lainnya yang akhirnya mendorong Amerika Serikat dan 11 negara lainnya untuk membentuk suatu wadah organisasi berbentuk aliansi militer.

Pembentukan aliansi tersebut kemudian memicu terbentuknya aliansi militer dari Uni Soviet dengan negara komunis lainnya yang disebut sebagai *Warsaw Pact* pada tahun 1955.⁶² NATO yang terbentuk melalui *North Atlantic Treaty* memiliki kesepakatan berupa pasal-pasal yang telah menjadi prinsip NATO

⁶¹ NATO, "*A Short History of NATO*", (North Atlantic Treaty Organization Public Diplomacy Division), hal. 1.

⁶² History, "*Formation of NATO*", diakses dari: <http://www.history.com/topics/cold-war/formation-of-nato-and-warsaw-pact> pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10.58 WIB.

hingga saat ini yang membuat NATO masih bertahan dan diperlukan meskipun era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah berakhir. Secara keseluruhan terdapat 14 *Articles* yang disepakati dalam NATO, namun yang paling menonjol adalah *Article 5* yang berbunyi sebagai berikut.⁶³

“An armed attack against one or more of them... shall be considered an attack against them all... such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.”

Article 5 tersebut pada dasarnya merupakan prinsip NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu atau lebih dari anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap semua negara anggota. Pasal tersebut menjadi dasar tujuan NATO untuk melakukan *deterrence* terhadap potensial musuh yang dianggap mengancam keamanan negara anggota NATO yang telah dilakukan oleh NATO semenjak Perang Dingin terhadap Uni Soviet.⁶⁴ Namun dalam membicarakan organisasi antar pemerintah, NATO dapat disimpulkan bukan hanya berisikan mengenai aliansi militer saja, tetapi juga merupakan suatu aliansi politik dimana tujuannya adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan setiap negara anggota melalui cara-cara politik dan militer. Secara politik, NATO menjunjung nilai-nilai demokrasi dan mengembangkan kerjasama pertahanan dan keamanan lainnya dengan negara anggota guna memecahkan masalah bersama, membangun kepercayaan dan

⁶³ NATO, “*The North Atlantic Treaty*”, diakses dari: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB.

⁶⁴ CNN, “*What Is Article 5*”, diakses dari: <http://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/what-is-article-5-nato-trump/index.html> pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB.

untuk mencegah konflik.⁶⁵ Sedangkan secara militer diterapkan sesuai dengan *Article 5* sebelumnya, serta berkomitmen untuk melakukan penyelesaian sengketa atau konflik dengan damai melalui diplomatik yang jika gagal akan dilanjutkan melalui operasi-operasi guna mengatasi krisis atau konflik yang ada.⁶⁶ Meskipun ancaman utama, yakni Uni Soviet, saat pertama NATO didirikan telah tidak ada, NATO tetap menjadi organisasi yang memiliki nilai *essential* tinggi jika dilihat melalui aktivitasnya yang cukup krusial dalam penanganan konflik terkait negara anggota yang membuatnya menjadi aliansi terkuat saat ini.

NATO memiliki 29 negara anggota yang terdiri dari Albania, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Montenegro, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, United Kingdom, dan Amerika Serikat.⁶⁷ NATO sebagai organisasi yang berfokus pada aliansi militer melakukan konsultasi dan pengambilan keputusan dalam berbagai isu internasional melalui cara tertentu yang disebut sebagai konsensus. Konsensus tersebut merupakan cara NATO untuk mengambil keputusan dengan melalui *collective will* dari seluruh negara anggota.⁶⁸ Dengan melalui konsensus dapat diartikan bahwa tidak ada pemungutan suara dalam NATO, sehingga konsultasi berlangsung hingga ada

⁶⁵ NATO, "A Political and Military Alliance", diakses dari: <http://www.nato.int/nato-welcome/index.html> pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 17.00 WIB.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ NATO, "NATO Member Countries", diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 08.31 WIB.

⁶⁸ NATO, "Consensus Decision-Making at NATO" diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49178.htm pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 08.57 WIB.

keputusan yang bisa diterima semua tercapai. Secara umum adanya proses konsultasi dan negosiasi tersebut dapat berlangsung secara cepat dikarenakan negara anggota saling berkonsultasi secara teratur dan oleh karena itu seringkali negara anggota dapat mengetahui dan memahami posisi masing-masing terlebih dahulu. NATO memiliki struktur utama yang mampu membuat NATO bekerja secara rinci dan seksama dalam mengambil keputusan. Berikut merupakan gambar mengenai struktur organisasi NATO.



Gambar 2 Working Structure

(Sumber: NATO.int/What Is NATO Working Structures)

Pengambilan keputusan dalam NATO utamanya merupakan NAC (*North Atlantic Council*) dan berbagai perwakilan negara anggota yang juga berada dalam DPC (*Defense Planning Committee*) dan NPG (*Nuclear Planning Group*).⁶⁹ Selain hal tersebut, *Secretary General* merupakan yang bertanggung jawab terhadap *civilian International Staff*, yang sesuai gambar tersebut

⁶⁹ NATO, "Structure", diakses dari: <https://www.nato.int/cps/su/natohq/structure.htm> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.02 WIB.

meliputi divisi administratif beserta badan yang dimiliki NATO.⁷⁰ Dalam hal militer, NATO memiliki komite militer yang bertugas untuk memberikan saran dan membantu NAC dalam menangani urusan dan kepentingan militer yang kemudian akan disampaikan dan diaplikasikan di lapangan oleh ACO (*Allied Command Operations*) dan ACT (*Allied Command Transformation*).⁷¹

Mengenai dana yang digunakan NATO, negara anggota melakukan kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap biaya yang digunakan NATO untuk implementasi kebijakan dan berbagai aktivitas. Kontribusi secara langsung mengenai biaya ditetapkan NATO dengan dibuatnya persyaratan aliansi untuk membiayai aliansi demi kepentingan seluruh negara anggota, yakni hal seperti demi pertahanan udara atau maritim NATO serta sistem komando dan kontrol, sehingga pembiayaan dilakukan secara kolektif, bukan hanya satu negara anggota. Dengan prinsip pendanaan bersama, maka seluruh negara anggota berkontribusi dalam pembagian biaya yang telah disepakati, yakni berdasarkan persentase kecil dari GDP negara anggota untuk anggaran pertahanan, sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan penyumbangan peralatan ataupun pasukan untuk kepentingan operasi militer dan menanggung biaya keputusan untuk melakukannya.⁷²

Dalam melakukan aktivitas dan operasi militer, NATO memiliki ketentuan tersendiri mengenai kekuatan militer yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan NATO tidak memiliki kekuatan militer sendiri. Sehingga personil atau pasukan yang bertugas dalam operasi NATO merupakan pasukan

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² NATO, "Funding", diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.03 WIB.

multinasional dari negara-negara anggota NATO, bahkan juga terdapat beberapa operasi ataupun aktivitas yang dilakukan bersama dengan negara-negara partner.⁷³ Untuk melakukan proses kontribusi tersebut, NATO melakukan *force generation*. *Force generation* merupakan suatu prosedur ketika negara-negara anggota memberikan sumber daya personil dan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan operasi ataupun misi NATO.⁷⁴

Hubungan NATO dan Rusia diawali pada runtuhnya Uni Soviet yang merupakan negara sosialis pertama di dunia. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menjadikan Uni Soviet berubah menjadi 15 negara republik independen yang terpisah, salah satunya yakni Rusia yang merupakan negara terbesar dengan penduduk terbanyak dan memiliki perekonomian yang paling berkembang sebagai negara bekas Uni Soviet. Dengan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, NATO mulai semakin mengembangkan *military presence* di negara-negara Eropa dan mulai menghadapi tantangan baru dalam keamanan internasional yang dihadapi bersama pasca lenyapnya *mutual enemy* NATO. Selain menghadapi keamanan internasional yang saat itu merupakan tindakan terorisme oleh Bin Laden, NATO juga menghadapi tantangan untuk membangun kembali stabilitas politik di Eropa dengan membangun nilai-nilai demokrasi liberal pada negara-negara bekas komunis Uni Soviet.⁷⁵ NATO saat ini memiliki 29 negara anggota yang beberapa diantaranya merupakan negara bekas Uni Soviet. Hal

⁷³ NATO, "Troops Contribution", diakses dari: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_50316.htm pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.29 WIB.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Andrea Sollai, "NATO-Russia Relation A Brief Analysis", (Departmen of Political Science International Relation), hal. 13.

tersebut salah satu pengaruhnya merupakan keterbukaan NATO yang melancarkan program perluasan keanggotaan bagi negara lainnya dan membangun nilai-nilai demokrasi liberal ke berbagai negara pasca Uni Soviet runtuh. Beberapa negara bekas Uni Soviet yang bergabung dengan NATO yakni Estonia, Lithuania dan Latvia.⁷⁶ Ketiganya merupakan negara-negara kawasan Laut Baltik yang posisi geografisnya *essential* dikarenakan berbatasan dengan Rusia. Bukan hanya sebagai negara bekas komunis tetapi ketiganya penting sebagai negara yang menjadi perbatasan antara Eropa Timur dengan Rusia sehingga seringkali kedekatan negara-negara Baltik dengan NATO mendapat pertentangan dari Rusia sebelum masa pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

Cara yang dilakukan NATO untuk mencapai stabilitas politik di Eropa dengan membangun nilai-nilai demokrasi liberal pada negara-negara bekas komunis Uni Soviet tersebut dilakukan dengan menciptakan sistem *two-tier open door*. *Two-tier open door system* merupakan cara yang dilakukan NATO dengan melakukan perluasan keanggotaan bagi negara yang ingin bergabung dengan NATO serta membuat Pfp (*Partnership for Peace*) program yang kemudian menjadi salah satu awal kerjasama NATO dengan Rusia.⁷⁷ Pada dasarnya Pfp merupakan program yang dibuat untuk membangun *mutual trust* dengan negara lainnya, yakni negara-negara Eropa yang bukan merupakan anggota NATO dan negara-negara eks komunis Uni Soviet.⁷⁸ Kegiatan dalam Pfp yang juga dilakukan antara NATO dan Rusia merupakan kegiatan seputar

⁷⁶ NATO, "Member Countries", diakses dari: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 17.30 WIB.

⁷⁷ Ibid, "NATO-Russia Relation A Brief Analysis".

⁷⁸ Ibid.

melakukan aktivitas militer gabungan dan melakukan pertukaran informasi yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan. Perluasan keanggotaan NATO pada saat tersebut meluas pada bagian Eropa termasuk beberapa kawasan seperti kawasan Baltik, kawasan Balkan dan kawasan Laut Hitam.⁷⁹

Pasca Perang Dingin berakhir, peran NATO sebagai aliansi militer mengalami keambiguan disebabkan hilangnya *mutual enemy* satu-satunya yang memberikan ancaman terhadap negara-negara anggota NATO. Sehingga NATO perlu untuk melakukan transformasi dalam aliansi tersebut dengan mengubah aliansi militer yang berfokus pada pengutamakan *collective defense* dan membuka partisipasi besar terhadap negara-negara lainnya.⁸⁰ Perluasan keanggotaan NATO terhadap negara bekas pecahan Uni Soviet sempat beberapa kali membuat hubungan antara NATO dan Rusia menegang. Untuk waktu yang lama Rusia menentang negara-negara Baltik yakni, Lithuania, Estonia dan Latvia untuk bergabung menjadi anggota NATO. Dalam hal tersebut Rusia menganggap bahwa dengan bergabungnya negara-negara Baltik menjadi anggota NATO akan dianggap sebagai tindakan yang melewati batas dan dapat menyebabkan *a serious deterioration* dari hubungan kedua pihak.⁸¹ Hal tersebut dikarenakan negara-negara Baltik bukan hanya negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, tetapi juga merupakan negara yang berbatasan dekat dengan wilayah Rusia. Bergabungnya negara-negara Baltik dengan NATO akan memungkinkan dekatnya pangkalan militer NATO di wilayah Rusia. Sehingga pada masa Presiden Boris Yeltsin di tahun 1997, Rusia

⁷⁹ Ibid, hal. 14.

⁸⁰ Ibid, hal. 15.

⁸¹ Stephen Larrabee, "The Baltic States and NATO Membership", (RAND, 2003,), hal. 5.

berusaha untuk berdiplomasi dengan Bill Clinton untuk meyakinkan NATO untuk tidak memperluas keanggotaannya pada negara-negara bekas pecahan Uni Soviet.⁸² Topik memanas antara hubungan Rusia dan NATO terkait negara-negara Baltik mereda melalui pernyataan Vladimir Putin di tahun 2001 yang mengungkapkan bahwa keputusan negara-negara Baltik merupakan keputusan mereka sendiri sebagai negara bebas untuk bergabung dengan NATO.⁸³



Gambar 3 Negara-negara Baltik

(Sumber: Baltic Region Map <http://www.yourchildlearns.com/online-atlas/baltic-map.htm>)

Keterbukaan aliansi untuk bekerjasama dengan negara lainnya termasuk Rusia dimulai secara formal pada tahun 1997 melalui *NATO-Russia Founding Act* dan *NATO-Russia Permanent Joint Council*. Pendirian pembentukan kerjasama formal tersebut bertujuan untuk *building trust*, membangun wadah

⁸² Marko Mihkelson, "Baltic-Russia Relations in Light of Expanding NATO and EU", (Foreign Affairs Committee of the Parliament of Estonia), hal. 276.

⁸³ Ibid, hal.277.

konsultasi dan kerjasama antar kedua belah pihak dan untuk memperkuat keamanan bersama.⁸⁴ PJC antara NATO dan Rusia memiliki prinsip untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa serta menjaga wilayah kedaulatan masing-masing dan negara lainnya yang juga diperkuat oleh kedua belah pihak melalui *Helsinki Final Act*.⁸⁵ Kerjasama keduanya semakin erat seiring dengan dibentuknya NRC (*NATO-Russia Council*). NRC merupakan wadah kedua belah pihak untuk menangani isu keamanan internasional, melakukan konsensus dan kerjasama serta melakukan *joint decision* dan *joint action* yang didirikan pada tahun 2002.⁸⁶ Namun kerjasama melalui NRC banyak mengalami *up and down* yang banyak terlihat dalam beberapa situasi yang menyangkut kedua pihak.

NATO dan Rusia merupakan dua pihak yang memiliki kapabilitas militer mumpuni di antara negara lainnya. Bukan hanya karena NATO merupakan aliansi militer namun juga dikarenakan sejarah keduanya yang merupakan negara-negara maju dan aktor utama dalam perang terdahulu. NATO merupakan aliansi yang memiliki kapabilitas militer mumpuni dalam berbagai bidang diantaranya nuklir, *missile defense* dan *conventional forces*. Semenjak Perang Dingin, terbentuknya NATO memang berasalkan dari aliansi nuklir antar negara anggota. Hingga saat ini negara anggota NATO masih menjadi jajaran terdepan dalam kepemilikan nuklir. Hal tersebut dapat dilihat melalui data *Stockholm International Peace Research Institute* yang memperlihatkan mengenai kepemilikan senjata nuklir di awal tahun 2017 dengan Amerika

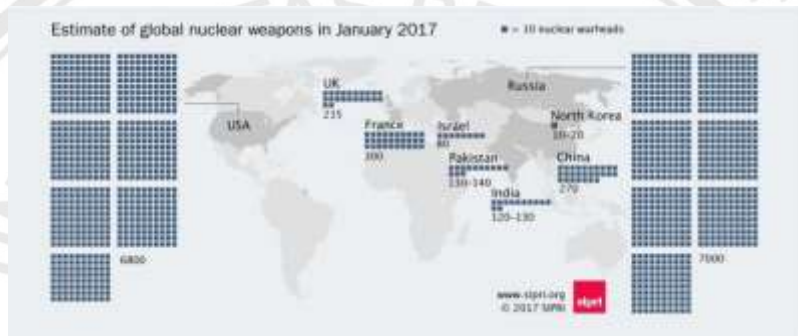
⁸⁴ Andrei Sollai, Op.Cit., hal. 15.

⁸⁵ Andrei Sollai, Op.Cit., hal. 15.

⁸⁶ NATO, "*NATO-Russia Council*", diakses dari:

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm pada tanggal 10 Oktober 21.05 WIB.

Serikat, Perancis dan *United Kingdom* sebagai negara teratas dari negara anggota NATO dalam kepemilikan nuklir. Begitupula dengan Rusia yang memiliki kapabilitas nuklir tertinggi dan melalui sejarah perang terdahulu menjadikan Rusia sebagai salah satu negara yang dapat mengancam negara anggota NATO meskipun tidak ada indikasi bahwa Rusia berencana untuk menggunakan kemampuannya untuk melawan negara anggota. Namun perilaku Rusia yang dianggap agresif menjadikan aliansi harus mempertimbangkan kemampuan Rusia dalam mengancam keamanan aliansi.



Gambar 4 Global Nuclear Weapons di Januari 2017

(Sumber: SIPRI <https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/biological-chemical-and-nuclear-weapons/world-nuclear-forces>)

Dinamika hubungan kedua belah pihak tidak akan pernah terlepas dari hubungan militer dan keamanan antara NATO dan Rusia yang merupakan dua pihak dengan kapabilitas militer tertinggi di dunia. Kepemilikan nuklir bukan saja menjadi hal yang mencolok terlihat namun juga kepemilikan misil dan senjata non konvensional lainnya. Sejarah dan kapabilitas yang dimiliki keduanya memberikan pengaruh dinamika dalam kawasan tersebut yang penuh akan provokasi yang dilakukan kedua belah pihak. Salah satunya seperti munculnya tuduhan *spionase* atau mata-mata, munculnya tuduhan

cyber warfare, adanya intimidasi melalui penangkapan kapal milik negara lain, pendekatan teritori negara lain tanpa ijin, intervensi terhadap konflik negara lain dan sebagainya. Provokasi dan intervensi yang terjadi diantara keduanya telah beberapa kali mempengaruhi hubungan kerjasama antara NATO dan Rusia, seperti halnya kerjasama dalam NRC yang banyak mengalami perubahan dikarenakan beberapa konflik yang terjadi dan intervensi yang melibatkan Rusia.

Pada tahun 2008, Rusia oleh NATO dianggap mencederai hubungannya dengan mengancam stabilitas keamanan di Eropa dalam Perang Rusia-Georgia yang berlangsung selama lima hari. Perang yang terjadi dalam lima hari tersebut terjadi di pusat *South Ossetia* dan Abkhazia yang merupakan wilayah separatis Georgia dan memiliki pemerintahan yang bersifat *unrecognized*.⁸⁷ Kedua wilayah separatis tersebut didukung oleh Rusia sehingga pada saat tersebut NATO melalui NRC memutuskan untuk menghentikan segala bentuk kerjasama dengan Rusia. NATO menunda kerjasama militer dan politik yang selama ini dilakukan. Pada 19 Agustus 2008 Menteri Luar Negeri NATO mengungkapkan bahwa tindakan militer Rusia melanggar prinsip *Helsinki Final Act* mengenai penyelesaian konflik secara damai.⁸⁸ Sehingga mengenai tindakan militer Rusia tersebut NATO mengungkapkan bahwa kerjasama tidak dapat dijalankan seperti sebelumnya jika Rusia tidak mengeluarkan

⁸⁷ CNN, "Georgia Russia Conflict", diakses dari: <http://edition.cnn.com/2014/03/13/world/europe/2008-georgia-russia-conflict/index.html> pada tanggal 10 Oktober 23.15 WIB.

⁸⁸ Marcel de Haas, "NATO-Russia Relations After the Georgian Conflict", diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/237778527_NATO-Russia_Relations_after_the_Georgian_Conflict pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 23.17 WIB.

kebijakan untuk memerintahkan pasukannya agar meninggalkan Georgia.⁸⁹

Rusia melalui Menteri Hubungan Luar Negeri juga mengeluarkan pernyataan yang tidak jauh berbeda yakni mengenai persetujuannya dalam menunda kerjasama dengan NATO.⁹⁰ Sedangkan dengan Georgia, NATO berusaha untuk semakin mempererat kerjasama militer dan politik dalam wadah *NATO-Georgia Commission*.⁹¹ Invasi Rusia di Georgia telah memberikan peringatan nyata bagi negara anggota NATO mengenai aksi militer Rusia yang dapat mengancam keamanan kawasan.

Pemulihan hubungan pasca perang Rusia-Georgia dilakukan melalui pertemuan informal antara negara-negara anggota yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, yakni Perancis dan Jerman.⁹² Hingga pada September 2008, NATO melalui Menteri Pertahanan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan kerjasama antara kedua belah pihak dalam menangani masalah keamanan seperti dalam menghadapi masalah terorisme dan konflik Afghanistan.⁹³ Namun dalam pemulihan hubungan kala itu masih terdapat konfrontasi yang terjadi antara NATO dan Rusia. Pemulihan hubungan tersebut terganggu dengan adanya pemasangan *missile defence shield* milik Amerika Serikat di dekat wilayah Rusia yang membuat Presiden Medvedev mengeluarkan pernyataan pada 5 November 2008 yang mengancam NATO

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

bahwa Rusia akan memasang *missile* di Kaliningrad yang merupakan wilayah Rusia yang berdekatan dengan negara-negara anggota NATO.⁹⁴

Pada 5 Maret 2009, NATO melalui Menteri Luar Negeri memutuskan untuk memulai formal dialog dengan Rusia dalam forum NRC.⁹⁵ Hal tersebut dilakukan meskipun pada saat tersebut Rusia tidak menuruti permintaan NATO untuk menarik pasukan dan melakukan gencatan senjata dalam konflik dengan Georgia.⁹⁶ Keputusan tersebut dilakukan NATO dikarenakan aliansi beranggapan bahwa NATO membutuhkan Rusia untuk melanjutkan operasi dalam masalah keamanan bersama untuk menangani terorisme, konflik Afghanistan, *drugs trafficking*, *arms control* hingga ancaman *piracy*.⁹⁷ Dalam konferensinya NATO menuntut dua hal yang perlu dilakukan Rusia mengenai konflik yang terjadi di Georgia. Dua hal tersebut yakni menuntut Rusia untuk menarik mundur pasukannya dari daerah konflik dan daerah separatis Georgia dan menarik kembali pengakuan Rusia atas kemerdekaan dari Abkhazia dan *South Ossetia*.⁹⁸ Dalam hal mengenai *missile defence* milik Amerika Serikat yang kala itu dipermasalahkan, NATO mengusulkan dalam konferensinya untuk menjalin kerjasama hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai sistem pertahanan rudal.

Hal lainnya yang membuat hubungan NATO dan Rusia *up and down* kala itu adalah adanya latihan NATO dalam program PFP yang dilakukan di Georgia pada 6 Mei hingga 1 Juni 2009 yang menyebabkan perselisihan

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

pendapat antara Rusia dan pihak Barat. Latihan yang dilakukan tersebut telah disepakati oleh NATO dan Georgia sebelum terjadinya perang Rusia-Georgia yang menurut Presiden Medvedev hal tersebut merupakan pengelakan yang dilakukan NATO sehingga Presiden Medvedev memutuskan untuk membatalkan latihan dan partisipasi Rusia dalam forum NRC.⁹⁹ Terlepas dari segala konfrontasi yang terjadi kala itu, pada 27 Juni 2009 Rusia kemudian menghadiri pertemuan NRC yang menghasilkan keputusan untuk memulai kembali kerjasama militer antara NATO dan Rusia meskipun keduanya setuju untuk tidak setuju dengan situasi Rusia dan Georgia kala itu.¹⁰⁰ Kerjasama yang pada umumnya sama seperti sebelumnya terus terjadi hingga tahun 2014 disamping provokasi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Sedangkan hubungan NATO dan Rusia untuk saat ini sangat terbatas menyangkut konflik yang terjadi di Ukraina ketika Rusia menganeksasi Crimea di tahun 2014 yang membuat NATO merespon dengan membuat *Readiness Action Plan*.

4.2. Intervensi Rusia di Ukraina

Tahun 2014 menjadi tahun kemunduran bagi hubungan Rusia dengan negara Eropa, termasuk dengan NATO. Hal tersebut dipicu dengan keputusan Rusia yang melakukan intervensi di Ukraina dan aneksasinya di wilayah Crimea. Tahun 2013 menjadi tahun dimulainya konflik yang terjadi di dalam Ukraina yang dipicu dengan keputusan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych untuk membatalkan keputusan dalam bergabung dengan Uni Eropa yang diakibatkan adanya tekanan atau pengaruh dari Rusia sebagai partner

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

kerjasama terdekat Ukraina yang kerap menentang hubungan dekat Ukraina dengan Uni Eropa.¹⁰¹ Tindakan tersebut memicu protes yang dilakukan oleh ribuan massa di jalan terutama di ibukota Ukraina, Kiev, selama beberapa hari terutama oleh masyarakat Ukraina bagian barat yang merupakan *pro European* dan masyarakat bagian timur yang merupakan *pro Russian*.¹⁰² Rusia memiliki pengaruh besar bagi Ukraina dan begitu pula sebaliknya, bukan hanya melalui politik dan ekonomi namun juga sebagian masyarakat Ukraina memiliki budaya yang lebih dekat dengan Rusia, salah satunya melalui persamaan ras dan bahasa. Selain hal tersebut, Rusia menjanjikan Ukraina sebuah kerjasama ekonomi dengan mengurangi harga ekspor gas yang diperlukan Ukraina, perluasan hubungan perdagangan dan investasi besar bagi Ukraina.¹⁰³

¹⁰¹ Nick Thompson, "Ukraine: Everything You Need To Know About How We Got Here", diakses dari: <http://edition.cnn.com/2015/02/10/europe/ukraine-war-how-we-got-here/index.html> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 11.18 WIB.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Damien McElroy, "Ukraine receives half price gas and \$15 billion to stick with Russia", diakses dari: <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10523225/Ukraine-receives-half-price-gas-and-15-billion-to-stick-with-Russia.html> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 11.31 WIB.



Gambar 5 Etnis Rusia di Ukraina

(Sumber : CNN, "Ukraine: Everything You Need To Know About How We Got Here", <http://edition.cnn.com/2015/02/10/europe/ukraine-war-how-we-got-here/index.html>)

Bentuk protes yang kemudian mengarah kepada kekosongan kekuasaan akibat lengsernya Presiden Yanukovych tersebut menjadi momen untuk pasukan Rusia mengambil alih kontrol wilayah Crimea. Pada 1 Maret 2014 parlemen Rusia menyetujui perintah Presiden Vladimir Putin untuk segera mengirimkan pasukan militer menuju Crimea yang merupakan suatu wilayah otonom bagian Ukraina yang masyarakatnya lebih pro terhadap Rusia.¹⁰⁴

Dengan kondisi penduduk Crimea yang lebih mengarah pada ras Rusia maka Rusia berdalih bahwa tindakan intervensi yang dilakukan olehnya merupakan tindakan intervensi kemanusiaan demi kebebasan masyarakat tersebut untuk menjadi bagian dari Rusia. Tindakan tersebut akhirnya mengacu pada pengajuan referendum pada masyarakat Crimea untuk memilih bergabung dengan Rusia atau tetap dalam wilayah Ukraina. Pengajuan referendum tersebut berujung pada pemilihan masyarakat Crimea untuk memilih

¹⁰⁴ Ibid.

bergabung dengan Rusia meskipun pada akhirnya hanya sedikit negara yang mengakui hasil referendum tersebut.

Konflik yang terkemuka di beberapa tahun lalu tersebut tentu mendapatkan banyak reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional, salah satunya NATO. Intervensi Rusia yang dilakukan dalam konflik Ukraina serta aneksasi Rusia terhadap Crimea memberikan ancaman bagi NATO selaku aliansi militer yang beberapa negara anggotanya memiliki perbatasan langsung dengan Rusia, sehingga mengakibatkan kekhawatiran negara-negara tersebut bahwa Rusia akan melakukan hal yang sama terhadap negara-negara Eropa seperti yang telah dilakukannya pada Ukraina. NATO menganggap bahwa tindakan Rusia yang campur tangan dalam konflik Ukraina telah mengganggu stabilitas Eropa dan melanggar hukum internasional mengenai wilayah kedaulatan negara.¹⁰⁵ Tindakan yang lebih tegas juga ditunjukkan oleh NATO terhadap Rusia melalui pemutusan hubungan dalam NRC di tahun 2014.

NATO memutuskan untuk menghentikan segala bentuk kerjasama politik dan militer dengan Rusia dalam waktu yang tidak ditentukan sedangkan di sisi lain beberapa negara anggota mengusulkan untuk meningkatkan persiapan kapabilitas militer NATO untuk memperkuat keberadaan militer NATO di bagian Eropa Timur.¹⁰⁶ Perhentian kerjasama tersebut merupakan kedua kalinya yang terjadi pasca perang Rusia-Georgia. Meskipun konflik Rusia dan Georgia penghentian kerjasama yang terjadi dalam NRC hanya dilakukan

¹⁰⁵ Dimitrios Dagdeverenis, "NATO Response to Russia After Crimea", (Bridgibeurope.net), hal.

2.

¹⁰⁶ Ibid.

dalam jangka waktu yang tidak lama, kali ini perhentian kerjasama akibat tindakan Rusia menganeksasi Crimea berdampak dengan perhentian kerjasama terpanjang yang pernah dilakukan oleh NATO terhadap Rusia yakni dari tahun 2014 hingga saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa tindakan keras Rusia benar-benar dianggap “wake up call” NATO untuk lebih mempersiapkan kemungkinan apapun untuk melindungi negara anggota. Meskipun demikian Presiden Vladimir Putin memberikan pernyataan bahwa tindakannya melakukan aneksasi terhadap Crimea juga disebabkan oleh perluasan kapabilitas keamanan NATO dengan memasang misil di dekat perbatasan Rusia.¹⁰⁷ Dalam menanggapi aneksasi Crimea oleh Rusia, NATO memaparkan lebih detail mengenai responnya dalam Wales Summit 2014 dengan mengemukakan pembuatan *Readiness Action Plan*.

Aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea pada tahun 2014 memberikan perubahan terhadap lingkungan keamanan di Eropa, termasuk bagi NATO. Beberapa tahun lalu NATO lebih memfokuskan pada perannya secara global melalui krisis manajemen dengan keterlibatannya dalam Afghanistan, Libya, Kosovo dan Somalia. Namun pasca intervensi Rusia terhadap Ukraina serta aneksasinya terhadap Crimea, NATO mengubah fokusnya untuk kembali memfokuskan pada *collective defense* anggotanya.¹⁰⁸ NATO merespon tindakan Rusia tersebut dengan menunda segala bentuk kerjasama militer dan politik antara kedua belah pihak dan dengan segera

¹⁰⁷ Reuters, “*Putin Says Annexation of Crimea Partly a Response to NATO Enlargement*”, diakses dari: <https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-nato/putin-says-annexation-of-crimea-partly-a-response-to-nato-enlargement-idUSBREA3G22A20140417> pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 15.17 WIB.

¹⁰⁸ NATO, “*NATO after ISAF- Staying Successful Together*”, diakses dari: http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94321.htm pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 11.24 WIB.

mengambil tindakan untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Secretary General NATO menjelaskan bahwa tindakan tersebut menjadi “*wake up call*” NATO bahwa Rusia mengambil langkah “*competition with the West rather than partnership*”.¹⁰⁹ Sehubungan dengan dinamika yang berubah dalam Eropa, NATO mengadakan konferensi tingkat tinggi pada September 2014 dalam Wales Summit 2014. Dalam konferensi tersebut Rusia menjadi agenda utama seperti yang tertulis dalam *Wales Summit Declaration* yang mengungkapkan bahwa tindakan agresif Rusia melawan Ukraina telah menantang visi Eropa dalam menciptakan kawasan yang bebas dan damai.¹¹⁰ Deklarasi tersebut mengungkapkan bahwa Rusia telah menjadi ancaman besar bagi negara aliansi lebih dari sebelumnya. Hal signifikan dalam Wales Summit 2014 lainnya adalah persetujuan dalam pembuatan *Readiness Action Plan* sebagai respon NATO terhadap peningkatan ancaman di kawasan yang disebabkan oleh Rusia.¹¹¹ *Readiness Action Plan* terencana sebagai respon NATO semenjak Rusia campur tangan terhadap konflik yang terjadi di Ukraina dan dengan pembuatan RAP serta penundaan kerjasama dalam NRC selama lebih dari 2 tahun menjadikan kondisi yang saat ini terjadi antara NATO dan Rusia kembali menjadi kondisi saat Perang Dingin dulu terjadi.

4.3. Readiness Action Plan

RAP merupakan sebuah rencana penguatan tersignifikan yang pernah dibuat oleh NATO dalam *collective defenses*nya semenjak Perang Dingin. RAP

¹⁰⁹Louisa Brooke Holland, “*NATO’s Military Response to Russia: November 2016 Update*”, (Briefing Paper Number 07276, 2016, House of Commons Library), hal. 5.

¹¹⁰ NATO, “*Wales Summit Declaration*”, (pdf), 5 September 2014.

¹¹¹ Ibid.

merupakan paket yang berisikan langkah-langkah untuk menjamin aliansi dan mengembangkan *responsiveness* dan *effectiveness* dalam mencegah ancaman.¹¹² Pernyataan mengenai RAP tersebut dalam Wales Summit 2014 dihadiri oleh berbagai perwakilan negara, yakni seluruh negara anggota NATO beserta negara lainnya seperti Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Afghanistan, Bahrain, Bosnia, Finlandia, Georgia, Irlandia, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Korea Selatan, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Selandia Baru, Serbia, Swedia, Switzerland, Republik Macedonia, Ukraina dan the United Arab Emirates pada 4 September 2014 di Wales.¹¹³ RAP terdiri dari 2 langkah yakni langkah *assurance* dan langkah *adaptive*. *Assurance measures* merupakan langkah untuk menjamin keamanan pertahanan darat, air dan udara negara anggota yang memiliki geografis dekat dengan Rusia sedangkan *adaptive measures* merupakan langkah dalam membentuk struktur pertahanan NATO untuk memperkuat kemampuan negara anggota dalam menanggapi krisis yang akan terjadi.¹¹⁴ Beberapa langkah yang dilakukan yang merupakan langkah awal yakni penguatan pengawasan udara di kawasan Baltik dan kawasan Eropa Timur NATO dengan kehadiran militer di berbagai negara yang disertai latihan gabungan dan pelatihan.¹¹⁵ Selain itu yang terlihat signifikan adalah perluasan *Response Force* yang dilakukan oleh NATO di sepanjang sisi timur bagian negara anggota NATO.¹¹⁶

¹¹² Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 7.

¹¹³ Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 28.

¹¹⁴ Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 7.

¹¹⁵ Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 7.

¹¹⁶ Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 7.

RAP dikemukakan oleh NATO pertama kali dalam Wales Summit Declaration 2014 ketika Rusia menjadi agenda utama dalam konferensi tersebut. Wales Summit Declaration 2014 yang berisikan mengenai RAP dimuat dalam poin 5 hingga poin 13 dengan salah satu *statement* yang dibuat oleh Secretary General NATO dalam summit tersebut yang merupakan sebagai berikut.

“The Readiness Action Plan is the biggest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War. And it is my top priority to implement this plan in full and on time.”¹¹⁷

RAP dilakukan dengan banyak operasi yang dilakukan oleh NATO menggunakan pasukan dan kapabilitas militernya untuk men-*deterr* Rusia di sepanjang sisi timur Eropa. RAP tersebut dimuat secara lengkap dalam *Fact Sheet* yang dimulai pada bulan Desember 2014, Mei 2015, Oktober 2015, Februari 2016 dan Juli 2016. Setiap bulan tersebut menginformasikan mengenai lanjutan kegiatan dalam operasi RAP yang dilakukan NATO. Pelaksanaan operasi dalam RAP ini bukan dilakukan oleh segelintir negara-negara yang terancam oleh tindakan Rusia di sisi timur Eropa namun dilakukan bersama oleh NATO untuk melindungi negara anggota terutama bagi negara yang memiliki perbatasan dekat dengan Rusia seperti negara-negara Baltik dan Polandia. Tujuan dari segala bentuk operasi tersebut secara umumnya adalah agar NATO mampu untuk lebih cepat dalam merespon serta mencegah segala bentuk ancaman terhadap negara anggota, yang memang dibuat akibat ancaman dari Rusia yang menganeksasi Crimea. Berikut untuk lebih jelasnya merupakan tabel mengenai operasi-operasi yang dilakukan oleh NATO dalam

¹¹⁷ Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 7.

RAP beserta tahun pelaksanaannya yang terdiri dari *assurance measures* dan *adaptive measures*.

Table 2 Assurance Measures

(Sumber: Data Olahan Penulis)

No.	Assurance Measures	Tahun
1.	Meningkatkan jet tempur dari 4 hingga 16 untuk berpatroli di wilayah negara-negara Baltik.	2014-2016
2.	Patroli udara di negara-negara Baltik dilakukan dengan rotasi oleh negara-negara setiap tahunnya.	2014-2016
3.	Mengerahkan jet tempur untuk Rumania dan Polandia.	Mei 2015, Okt 2015, Feb 2016
4.	Portugal dan Amerika Serikat mengerahkan pesawat terbang untuk Rumania yang bertujuan untuk pelatihan.	Mei 2015, Okt 2015, Feb 2016
5.	Melakukan pengintaian melalui penerbangan AWACS di wilayah aliansi timur.	2014-2016
6.	Melakukan pengintaian melalui penerbangan AWACS di wilayah aliansi timur dan penerbangan patrol maritim di sepanjang perbatasan timur.	Mei 2015, Okt 2015, Feb 2016, Juli 2016
7.	Mengirim lebih banyak kapal patrol ke Laut Baltik, Laut Hitam dan Laut Tengah.	Des 2014
8.	Melakukan patroli maritim intensif di Laut Baltik, Laut Hitam dan Laut Tengah dengan the Standing NATO Maritime Groups dan Standing NATO Mine Counter-Measures Groups.	Mei 2015, Okt 2015, Feb 2016, Juli 2016
9.	Menyebarkan pasukan darat ke bagian timur Aliansi untuk pelatihan dan latihan, secara rotasional.	Des 2014, Mei 2015, Okt 2015, Feb 2016
10.	Beberapa negara anggota mengirim pasukan darat dan udara ke Eropa Timur untuk pelatihan secara bilateral : Amerika Serikat telah mengerahkan pasukan dari Angkatan Darat AS : 1. 1 st Brigade Combat Team 2. 1 st Cavalry Division (untuk Estonia, Latvia, Lithuania dan Poland dengan tank, kendaraan mekanik dan peralatan militer berat lainnya)	Des 2014
11.	Beberapa negara anggota mengirim pasukan darat dan udara ke Eropa Timur untuk pelatihan secara bilateral :	Mei 2015

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amerika Serikat memindahkan ratusan tentara dan kendaraan ke Eropa Timur dengan operasi Dragoon Ride pada bulan April 2015. 2. Pada bulan Mei 2015, Prancis mengirim tank Leclerc dan kendaraan tempur infanteri ke Polandia untuk tujuan pelatihan. 3. Jerman mengumumkan rencana untuk pengiriman 1.700 tentara ke wilayah tersebut. 	
12.	<p>Melaksanakan lebih dari 200 latihan NATO di Eropa sepanjang tahun ini. Latihan utama tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Black Eagle</i> di Polandia (20 Okt-5 Des: 2,000 pasukan British dan Polandia) 2. <i>Steadfast Javelin I</i> di Estonia (16-23 Mei: 6,000 pasukan dari 9 negara anggota) 3. <i>Steadfast Javelin II</i> di negara Baltik, Jerman dan Polandia (2-8 Sept: 2,000 pasukan dari 10 negara anggota) 4. <i>Iron Sword</i> di Lithuania (2-14 November: 2,280 pasukan dari 9 negara anggota) 	Des 2014
13.	<p>Melaksanakan lebih banyak latihan yang berfokus pada manajemen krisis dan pertahanan kolektif. Latihan utama di tahun 2015 termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Joint Warrior</i> (11 – 23 April : pelatihan naval di Atlantik Utara - 13,000 pasukan) 2. <i>Dynamic Mongoose</i> (4 –15 Mei: pelatihan anti kapal selam di Norway - 5,000 pasukan) 3. <i>Baltops</i> (5 – 20 Juni: pelatihan naval dan amfibi di Laut Baltik - 4,500 pasukan) 4. <i>Sabre Strike</i> (8 – 19 Juni: pelatihan darat di negara Baltik dan Polandia - 3,000 pasukan) 5. <i>Noble Jump</i> (10 – 21 Juni: pengerahan tes pertama untuk the new high readiness force to Poland - 2,100 pasukan) 6. <i>Trident Joust</i> (17 – 28 Juni: Pelatihan kator pusat di Bulgaria, Rumania dan Italia - 1,500 pasukan) 7. <i>Trident Juncture</i> (21 Oktober – 6 November: Italia, Portugal dan Spanyol - 25,000 pasukan) 	Mei 2015, Okt 2015
14.	<p>NATO telah melakukan lebih banyak latihan yang berfokus pada manajemen krisis dan pertahanan kolektif. Lebih dari 100 dari hampir 300 latihan yang dilakukan pada tahun 2015 untuk mendukung langkah-langkah penjaminan NATO.</p>	Feb 2016, Juli 2016



Table 3 Adaptation Measures

(Sumber: Data Olahan Penulis)

No.	Adaptation Measures	Year
1.	<p>Meningkatkan Force Respon NATO (NRF) agar lebih responsif. Komponen lahannya akan direstrukturisasi dengan terdiri dari sejumlah paket kekuatan darat, udara dan laut yang dapat bergerak dalam waktu singkat untuk segera merespon ancaman. Secara keseluruhan, pasukan darat NRF bisa membentuk kekuatan ke dalam berbagai ukuran divisi.</p>	Des 2014
2.	<p>Meningkatkan Force Respon NATO (NRF) agar lebih responsif. NRF kira-kira akan berlipat ganda dari level saat ini yang terdiri dari 13.000 tentara, tergantung pada tugas yang dibutuhkannya. Ini termasuk komponen darat, laut, udara dan khusus.</p>	Mei 2015
3.	<p>Meningkatkan Force Respon NATO (NRF) agar lebih responsif. NRF akan ditingkatkan menjadi 40.000 pasukan, tergantung pada tugas yang dibutuhkannya. Ini lebih dari dua kali lipat dari level saat ini yang berjumlah 13.000 tentara. NRF yang ditingkatkan akan mencakup kehadiran darat, laut, udara dan pasukan khusus.</p>	Okt 2015, Feb 2016
4.	<p>Menciptakan kekuatan reaksi baru “Spearhead Force”/Very High Readiness Joint Task Force dari beberapa ribu tentara darat yang didukung oleh angkatan udara, maritim dan khusus, yang dapat menyebar dalam beberapa hari ini. NATO bekerja untuk mempertahankan kekuatan baru di awal tahun 2016.</p>	Des 2014
5.	<p>Pada saat bersamaan, sebuah kekuatan baru yakni VJTF, sekitar 5.000 tentara darat yang didukung oleh udara, maritim dan pasukan khusus akan dibuat. Elemen utama mereka akan dapat mulai digunakan hanya dalam waktu 48 jam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan Spearhead dan NRF akan berbasis di negara asal mereka, namun dapat menyebar dari sana ke mana pun ketika dibutuhkan untuk latihan respons krisis. Kepemimpinan dan keanggotaan VJTF dan NRF akan diputar setiap tahun. 2. Jerman, Belanda dan Norwegia telah membentuk kekuatan Spearhead force, sementara kekuatan penuh dijadwalkan untuk berdiri pada tahun 	Mei 2015

	<p>2016.</p> <p>3. Enam Sekutu - Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol dan Inggris - telah menawarkan untuk melayani sebagai negara-negara terkemuka.</p>	
6.	<p>Pada saat bersamaan, sebuah kekuatan baru "Spearhead Force" dengan sekitar 5.000 pasukan darat telah berdiri dan berjalan. Elemen utama dapat mulai digunakan hanya dalam dua sampai tiga hari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bulan Juni 2015, Force Spearhead memiliki latihan penyebaran pertamanya: Noble Jump di Polandia. Ini akan diuji lagi saat Latihan Trident Juncture 2015 sebelum beroperasi penuh tahun depan. 2. Latihan tersebut juga akan mengesahkan Markas Besar NRF untuk tahun 2016: Joint Force Command Brunssum. Spearhead dan NRF akan berbasis di negara asal mereka, namun akan dapat menyebar dari sana ke mana pun mereka dibutuhkan untuk latihan atau respons krisis. 3. Pada tahun 2016, ketika kekuatan Spearhead beroperasi penuh, akan dipimpin oleh Spanyol. Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Turki dan Inggris - telah menawarkan untuk melayani sebagai negara-negara terkemuka di tahun-tahun berikutnya. 	Okt 2015
7.	<p>Pada saat bersamaan, sebuah kekuatan baru "Spearhead Force" dengan sekitar 20.000, dimana sekitar 5.000 adalah pasukan darat, sekarang beroperasi dan siap dalam beberapa hari untuk menyebarkan ke mana pun dibutuhkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bulan Juni 2015, Spearhead Force berpartisipasi dalam latihan penyebaran pertamanya: Noble Jump di Polandia. Ini diuji lagi selama Latihan Trident Juncture dan sekarang disertifikasi sebagai bagian dari NRF untuk tahun 2016. 2. Latihan tersebut juga akan mengesahkan Markas Besar NRF untuk tahun 2016: Joint Force Command Brunssum. Spearhead dan NRF akan berbasis di negara asal mereka, namun akan dapat menyebar dari sana ke mana pun mereka dibutuhkan untuk latihan atau respons krisis. 3. Pada tahun 2016, Force Spearhead akan dipimpin oleh Spanyol. Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Turki dan Inggris telah menawarkan untuk melayani sebagai negara-negara terkemuka di tahun-tahun berikutnya. 	Feb 2016, Juli 2016
8.	Meningkatkan NATO's Standing Naval Forces dengan	Des 2014,

	lebih banyak kapal dan lebih banyak jenis kapal.	Mei 2015
9.	Pembentukan komando dan komando kontrol multinasional NATO dan fasilitas penerimaan di wilayah-wilayah sekutu timur (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania) setiap saat, dengan pihak lain dari Sekutu secara rotasional, dengan fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pertahanan kolektif.	Des 2014
10.	Pembentukan komando dan komando kontrol multinasional NATO dan fasilitas penerimaan di wilayah-wilayah Sekutu Timur (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania) setiap saat, dengan personil dari Sekutu secara rotasi, dengan fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pertahanan kolektif. Unit Integrasi Pasukan NATO (NFIUs) ini akan dikelola oleh spesialis nasional dan NATO. Tugas mereka adalah memperbaiki kerja sama dan koordinasi antara NATO dan pasukan nasional, dan mempersiapkan dan mendukung latihan dan penerapan apapun yang diperlukan.	Mei 2015
11.	Membentuk markas besar NATO multinasional - atau "Unit Integrasi Angkatan NATO" - NFIU - di wilayah Sekutu Timur (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania). Unit Integrasi Pasukan NATO (NFIU) ini diresmikan pada bulan September 2015. Mereka akan dikelola oleh sekitar 40 spesialis nasional dan NATO. Tugas mereka adalah memperbaiki kerja sama dan koordinasi antara NATO dan kekuatan nasional, dan mempersiapkan serta mendukung latihan dan penyebaran yang dibutuhkan. Dua NFIU lagi akan didirikan di Hungaria dan Slovakia.	Okt 2015, Feb 2016
12.	Membentuk markas besar NATO multinasional - atau "Unit Integrasi Angkatan NATO" - NFIU - di wilayah Sekutu Timur (Bulgaria, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania dan Slovakia). Unit Integrasi Pasukan NATO (NFIU) pertama diaktifkan pada bulan September 2015. NFIU untuk Hungaria dan Slovakia disetujui oleh Menteri Pertahanan pada bulan Oktober 2015. Mereka akan dikelola oleh sekitar 40 spesialis nasional dan multinasional. Tugas mereka adalah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara NATO dan kekuatan nasional, dan mempersiapkan dan mendukung latihan NRF dan penyebaran apapun yang diperlukan.	Juli 2016
13.	Meningkatkan kesiapan dan kemampuan Headquarters Multinational Corps Northeast di Szczecin di Poland.	Des 2014
14.	Meningkatkan Headquarters Multinational Corps Northeast berperan sebagai hubungan untuk kerjasama regional.	2014-2016

15.	Pra-penentuan posisi peralatan militer dan pasukan di wilayah Sekutu timur.	2014-2016
16.	Perbaiki kemampuan NATO untuk memperkuat Sekutu timurnya melalui persiapan infrastruktur nasional, seperti lapangan terbang dan pelabuhan.	2014-2016
17.	Memperbarui rencana pertahanan untuk Eropa Timur.	Des 2014, Mei 2015
18.	Mengembangkan konsep baru perencanaan pertahanan maju.	Okt 2015
19.	Lebih banyak latihan berfokus pada manajemen krisis dan pertahanan kolektif.	Des 2014
20.	Membentuk markas divisi multinasional baru yang dapat dipekerjakan untuk Southeast di Rumania.	Okt 2015, Feb 2016, Juli 2016
21.	Menyiapkan Joint Logistic Support Group Headquarters, untuk mendukung pengerahan pasukan.	Okt 2015, Feb 2016, Juli 2016
22.	Pengambilan keputusan politik dan militer lebih cepat. Ini termasuk memberikan Komandan Sekutu Tertinggi NATO Eropa (SACEUR) untuk segera menyiapkan pasukan saat Sekutu memutuskan hal ini diperlukan.	Okt 2015

Hubungan NATO dan Rusia memburuk seiring dengan penundaan kerjasama yang dilakukan oleh NATO yang bertahan cukup lama hingga saat ini. Kerjasama yang dilakukan keduanya terhentikan namun proses dialog tetap dilakukan melalui inisiatif NATO untuk melakukan pertemuan dengan Rusia pertama kalinya semenjak penundaan di tahun 2014 tersebut. Pertemuan keduanya telah berlangsung selama 4 kali dalam kurun 2 tahun lebih semenjak penundaan, yakni dilakukan selama 3 kali pertemuan di tahun 2016 dan dilakukan sekali pada tahun 2017. Pertemuan di tahun 2016 dilaksanakan di Brussel pada 20 April, 30 Juli dan 19 Desember, sedangkan pada tahun 2017 dilaksanakan di Brussel pada 30 Maret. Pertemuan pertama yang dilaksanakan selama 2 tahun tidak berhubungan tersebut kedua belah pihak gagal dalam menghasilkan progress guna mencari solusi dalam mengurangi peningkatan

tensi militer yang terjadi di keduanya. Pertemuan yang dilakukan selama satu jam lebih tersebut berakhir tanpa adanya persetujuan mengenai isu utama, yakni mengenai solusi dalam pengurangan resiko atas *close military encounters* antara kedua belah pihak.¹¹⁸ Melalui pernyataan Secretary General NATO dalam pertemuan tersebut, NATO tidak akan mengembalikan posisi keduanya dalam kerjasama seperti dahulu jika Rusia tidak mampu untuk menghormati hukum internasional, meskipun komunikasi antar keduanya tetap terbuka.¹¹⁹ Reduksi dalam tensi militer yang sedang tinggi diantara kedua belah pihak menjadi hal yang penting bagi NATO, salah satunya akibat provokasi Rusia yang paling berbahaya sebelum pertemuan Brussel terjadi, yakni ketika pesawat tempur jet Rusia terbang dengan ketinggian 10 meter di atas kapal perang Amerika Serikat di Laut Baltik.¹²⁰ Hal tersebut memperlihatkan bahwa hubungan keduanya berada diujung tanduk dalam segi politik dan segi keamanan.

Pertemuan selanjutnya pun kedua belah pihak tetap berpegang pada pembahasan yang sama, yakni mengenai keamanan Eropa dan konflik di Ukraina. Dalam pertemuan selanjutnya NATO berusaha untuk meyakinkan Rusia bahwa penempatan pasukannya di negara-negara Baltik dan Polandia murni bertujuan defensif.¹²¹ Pihak Rusia juga menyatakan bahwa pertemuan di tahun 2016 lebih membicarakan mengenai konsekuensi dari bala bantuan

¹¹⁸ Julian Borger, "NATO-Russia Council Talks Fail to Iron Out Differences", diakses dari: <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/20/nato-russia-council-talks-fail-iron-out-differences-jens-stoltenberg> pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 10.09 WIB.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Dan Alexe, "NATO Tries to Remend Ties With Russia at Meeting in Brussels", diakses dari: <https://www.neweurope.eu/article/nato-tries-remend-ties-russia-meeting-brussels/> pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB.

NATO di negara-negara Baltik.¹²² Pertemuan yang terakhir dilakukan oleh kedua pihak di tahun 2017 dilakukan dengan membahas topik yang tidak jauh berbeda dari pertemuan sebelumnya. Secretary General NATO mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan antara duta besar dari kedua belah pihak merupakan pertemuan yang ‘konstruktif’ mengenai ‘*clear disagreements*’ dalam konflik Ukraina.¹²³ Pertemuan tersebut memiliki harapan langkah yang lebih baik di masa depan demi hubungan baik antara NATO dan Rusia. Hal tersebut dapat terlihat melalui langkah yang lebih maju ditujukan dengan membawa bersama para duta besar NATO dan diplomat Rusia dengan dewan NRD sebagai mediator dalam mencegah ketegangan meningkat di antara kedua belah pihak.¹²⁴ Meskipun dalam pertemuan tersebut dan sebelumnya masih terdapat persamaan pendapat mengenai kedua belah pihak yang saling menuduh satu sama lain sebagai pengacau situasi di dalam dan di sekitar Ukraina. Rusia melalui pertemuan tersebut mengutarakan pendapatnya mengenai penempatan 4.000 pasukan NATO di negara-negara Baltik dan Polandia, sedangkan NATO pun mengutarakan pendapatnya mengenai tujuannya yang defensif sebagai respon atas tindakan Rusia terhadap Crimea.¹²⁵ Konflik di Ukraina yang melibatkan Rusia tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dan pihak Barat terutama negara anggota NATO menuju tingkat yang lebih tinggi semenjak Perang Dingin sehingga NATO menggunakan RAP sebagai bentuk responnya dalam menanggapi apa yang disebutnya sebagai ancaman dari Rusia.

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

BAB V

IMPLEMENTASI *READINESS ACTION PLAN* NATO

Kebijakan setiap negara akan berpengaruh terhadap negara lainnya, terutama jika menyangkut kebijakan militer dalam suatu kawasan yang konflikual. Seperti halnya konflik yang terjadi di Ukraina yang kemudian berlanjut hingga intervensi Rusia dalam konflik tersebut. NATO membuat RAP sebagai bentuk respon aliansi terhadap ancaman yang terjadi di kawasan Laut Baltik, yakni kebijakan intervensi Rusia di Ukraina yang memuncak pada aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea pada tahun 2014. RAP dibentuk di tahun 2014 yang dikemukakan awalnya dalam Wales Summit 2014 dengan detail langkah-langkah yang kemudian dibuat dan dipublikasikan dalam periode Desember 2014, Mei 2015, Oktober 2015, Februari 2016 dan Juli 2016. Langkah yang dilakukan oleh RAP lebih mengutamakan mengenai keamanan negara anggota yang berada di sisi timur yakni khususnya negara-negara Baltik dan Polandia yang memiliki perbatasan dekat dengan Rusia.

Teori *conventional deterrence* penulis gunakan untuk melihat mengenai bagaimana implementasi RAP NATO dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik pada tahun 2014 hingga 2016. *Conventional deterrence* merupakan sebuah teori dalam jurnal *Deterrence and Influence the Navy's Role in Preventing War* karya Michael Gerson dan Daniel Whiteneck mengenai penggunaan ancaman dengan spesifikasi *conventional forces* sebagai tindakan agar potensial lawan

tidak melakukan hal yang tidak diinginkan oleh *deterrer*.¹²⁶ Dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana RAP digunakan oleh NATO sebagai sebuah strategi *conventional deterrence* terhadap Rusia. Bab kelima ini penulis akan meneliti mengenai *conventional deterrence* dengan variabel *credibility* dan *strategic communications* yang diimplementasikan dalam RAP oleh NATO terhadap Rusia dengan meneliti bentuk kapabilitas militer yang digunakan NATO dalam RAP dan kemampuan dan arti strategis dari kapabilitas tersebut sehingga dapat disebut sebagai ancaman serta bentuk tekad politik dan cara NATO mengartikulasikan ancaman yang dimiliki kepada Rusia.

5.1. *Credibility*

Military capability dan *political resolve* menjadi hal utama dalam melakukan teknik *conventional deterrence*. Penting bagi *deterrer* untuk menunjukkan kepada potensial lawan bahwa *deterrer* mampu dan mau untuk menggunakan kekuatan atau kapabilitas tersebut dalam menghadapi potensial lawan yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dianut *deterrer*. Berdasarkan RAP yang telah diimplementasikan mulai dari 2014 hingga 2016, penulis meneliti dalam variabel ini mengenai kapabilitas militer yang dimiliki oleh NATO. NATO memiliki kapabilitas militer yang berupa *nuclear, missile defences* dan *conventional forces*, kemudian penulis akan meneliti terlebih dahulu perbedaan kapabilitas militer yang digunakan dalam RAP dengan kapabilitas militer yang dimiliki oleh NATO selama ini. *Military capability* yang menjadi dasar ancaman tersebut akan penulis kategorikan dengan menjelaskan pula

¹²⁶ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh *military capability* tersebut dan menganalisa bagaimana arti strategis dari setiap kekuatan yang dimiliki oleh NATO tersebut. Selain itu penulis akan melihat mengenai bentuk *political resolve* dalam RAP yang membuat NATO terlihat memiliki komitmen tinggi untuk menggunakan kekuatan atau kapabilitas militernya ketika diperlukan dalam menghadapi Rusia di kawasan Laut Baltik.

5.1.1. *Military Capability*

Michael Gerson dan Daniel Whiteneck dalam jurnal *Deterrence and Influence The Navy's Role in Preventing War* menyebutkan mengenai *military capability* dalam *conventional deterrence* merupakan suatu kapabilitas yang mampu untuk mengakses wilayah dan mempertahankan kekuatan tempur dalam medan dengan sigap dan cepat, sehingga dalam *credibility* ini ancaman yang digunakan berdasarkan teori merupakan jenis bentuk ancaman *conventional forces*.

Conventional forces merupakan bagian lainnya yang penting dalam *deterrence* keseluruhan selain melalui nuklir dan *missile defense*. NATO merupakan aliansi yang dipenuhi oleh negara-negara yang beberapa diantaranya merupakan negara yang memiliki kapabilitas konvensional yang tinggi. Dalam *conventional deterrence*, ancaman dilakukan dengan mengutamakan kekuatan *local power* yang dapat dikerahkan secara cepat dan kuat dalam medan. Namun kapabilitas *conventional forces* tersebut bukan merupakan kapabilitas biasa, melainkan kapabilitas tersebut memiliki arti strategis tertentu dalam implementasinya di RAP sehingga

dianggap mampu untuk mengancam potensial lawan, yakni Rusia.

Conventional forces merupakan kekuatan yang mampu untuk melakukan operasi dengan menggunakan senjata non nuklir yang mencakup semua pasukan tempur militer dan pasukan pendukung termasuk kekuatan pesawat taktis tempur, kapal selam, kapal induk dan sebagainya. Pada umumnya *conventional forces* merupakan kekuatan yang dilakukan dengan melakukan operasi tanpa menggunakan senjata pemusnah massal seperti layaknya senjata nuklir dan senjata biologi lainnya.

RAP memiliki berbagai operasi dan kebijakan yang melibatkan kekuatan konvensional. Hal tersebut yang terlihat dalam langkah *assurance* dan langkah *adaptive* di RAP milik NATO. Setiap misi dan operasi yang dilakukan di dalamnya tidak menggunakan kapabilitas militer yang masuk dalam kategori senjata pemusnah massal. Serta RAP dibuat untuk meningkatkan tingkat kesiapan militer NATO ketika dihadapkan pada krisis untuk melindungi aliansi dengan mengandalkan pada kesiapan militer untuk bertindak peningkatan aktifitas pasukan militer NATO untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pasca ancaman semakin meningkat di kawasan Laut Baltik. RAP merupakan bagian dari penggunaan *conventional forces* yang dimiliki oleh NATO.

NATO yang beranggotakan negara-negara maju dengan kapabilitas militernya yang mumpuni memiliki rangkaian persenjataan dalam bentuk *conventional forces* yang dibedakan menjadi *land systems, aircraft, naval systems, rocket* dan *missiles*. Dalam bagian-bagian tersebut terdapat senjata dan perangkat militer yang memiliki fungsi dan kemampuan



masing-masing. Berikut merupakan tabel berisikan gambar mengenai bentuk pembagian atau *jenis conventional forces* yang dimiliki oleh NATO beserta dengan kemampuan yang dimiliki sebagai *conventional forces* NATO secara satu per satu dengan analisa arti strategis yang dimiliki oleh kekuatan tersebut sehingga dapat membuatnya menjadi ancaman terhadap Rusia ketika digunakan dalam berbagai misi dan operasi di RAP.

Table 4 Land Systems

(Sumber : Olahan Data Penulis dari <http://alumnus.caltech.edu/~marcsulf/nato/nato.html> dan <http://www.nspa.nato.int/en/organization/Logistics/WSES/wses.htm>)

<i>Land Systems</i>	<i>Arti strategis</i>
 <p><i>Panzerhaubitze 2000</i> PzH 2000 salah satu <i>self-propelled</i> artileri konvensional terkuat. Mampu menembak dalam tingkat yang tinggi dan tiga putaran dalam 9 detik hingga 10-13 putaran dalam semenit. Otomatis melakukan 5 putaran dalam <i>Multiple Rounds Simultaneous Impact</i>.</p>	Penggunaan Panzer dalam medan tempur mampu membantu pasukan <i>army</i> NATO dalam mengungguli serangan lawan yang melakukan kontak langsung dalam <i>hybrid warfare</i> terutama dalam hal kecepatan menembak sebelum pasukan Rusia memasuki wilayah aliansi, sehingga Panzer tersebut memiliki nilai strategis yang lebih jika diletakkan pada wilayah







	<p>Protected Reconnaissance Vehicle Kendaraan infanteri militer lapis baja Tahan terhadap ranjau darat, tembakan senapan dan ancaman NBC Mendeteksi, mengidentifikasi, melihat lokasi ancaman dan pemberi informasi untuk mendukung tindakan</p>	<p>perbatasan Baltik. Kendaraan pengintai tsb memiliki nilai strategis dalam hal pengintaian yang berdekatan dengan pos lawan. Lapis bajanya dapat berguna untuk memancing tembakan lawan sehingga posisi lawan dapat diketahui, dapat melakukan pengintaian di daerah yang rawan akan konflik namun perlu untuk diintai, seperti halnya daerah Kaliningrad yang berbatasan dengan negara Baltik untuk mengintai tindakan militer Rusia di Kaliningrad.</p>
	<p>Leopard Tank tempur utama dilengkapi sistem kontrol digital dengan laser rangefinders Senapan utama yang stabil dilengkapi coaxial machine gun Penglihatan malam dan teknologi penampakan yang canggih</p>	<p>Medan yang kasar menjadi bagian dari perhitungan strategi yang nanti akan dibuat, namun Leopard mampu digunakan dalam medan kasar sehingga perbatasan aliansi yang medan tinggi mampu dilindungi dengan tank tsb. Akurasi tembakan</p>

	<p>Dapat melakukan kontak dengan target yang bergerak di atas medan yang kasar</p>	<p>dan <i>night vision</i> yang dimiliki mampu membantu pasukan NATO yang terjebak dalam medan tempur dengan memberikan perlindungan keamanan melalui akurasi lasernya dalam menghadapi lawan.</p>
	<p>Boxer Kendaraan tempur lapis baja untuk melakukan sejumlah operasi yang berbeda dengan menggunakan modul misi yang terinstal Survivabilitas maksimum Mobilitas tinggi dalam kondisi ekstrim</p>	<p>Memiliki modul misi yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perang negara anggota dalam berbagai bidang, karena mampu menyediakan instalasi medan perang statis dengan menjadi kendaraan unit medis, pusat logistik, pembawa <i>army</i> menggunakan modul yang dapat berubah secara kurang dari 1 jam sehingga memiliki nilai strategis cocok untuk dikerahkan pada seluruh negara anggota NATO yang membutuhkan.</p>

Table 5 Aircraft



(Sumber : Data Olahan Penulis dari <http://alumnus.caltech.edu/~marcsulf/nato/nato.html> dan <http://www.nspa.nato.int/en/organization/Logistics/WSES/wses.htm>)

Aircraft	Arti Strategis
 <p>F-14 Tomcat Berisikan dua kru Mampu untuk membawa hingga 13000 lbs dari persenjataan termasuk dengan berbagai rudal lainnya, seperti <i>Sparrow</i>, <i>Sidewinder</i> dan sebagainya</p>	<p>Memiliki arti strategis yang cocok untuk digunakan dalam patrol udara di negara perbatasan Rusia dikarenakan kemampuannya yang mampu terbang segala cuaca, mendeteksi musuh yang memasuki kawasan aliansi sejauh 100 mil sebelum pasukan lawan memasuki teritori, mampu melumpuhkan 5 target dalam waktu yang sama.</p>
 <p>F-15 Eagle Pesawat tempur taktis yang dapat digunakan di segala cuaca Salah satu pesawat tempur superior di dunia Dilengkapi meriam M61 A1, 4 <i>Sidewinder</i> dan <i>Sparrow</i> <i>Twin engine</i></p>	<p>RAP dibuat dengan harapan NATO tidak akan mengalami hal yang sama yang dilakukan Rusia terhadap Crimea. Jika hal tersebut terjadi NATO memiliki F15 eagle yang memiliki arti strategis untuk dapat mengikat pasukan udara Rusia dengan kemampuannya</p>

		<p>dalam memenangkan pertarungan udara jika perang terjadi terutama <i>combat air by air</i>.</p>
 <p>F-16CJ Fighting Falcon</p>	<p>F-16 Fighting Falcon Pesawat tempur dengan manuver dan jangkauannya yang melebihi pesawat tempur lainnya Dilengkapi meriam M61 A1 dan mampu membawa 6 rudal udara</p>	<p>F16 Falcon merupakan pesawat tempur dengan maneuvranya yang lebih unggul dari pesawat lainnya sehingga mampu mengikat lawan di aerial combat menghasilkan arti strategis mampu untuk dikerahkan pada negara Baltik dan Polandia yang lebih memiliki tingkat rawan konflik dengan Rusia daripada negara anggota lainnya untuk kegunaan tempur di medan. Selain visibilitas yang baik dari F16 mampu dimanfaatkan menjadi pesawat patrol udara di Baltik.</p>
 <p>F/A 18 Hornet</p>	<p>F/A 18 Hornet Pesawat peran ganda, <i>aircraft</i> dan <i>fighters</i> Beberapa berisikan awak satu dan dua Kecepatan maksimum Mach</p>	<p>Perannya yang ganda mampu memberikan arti strategis sebagai pesawat yang berbahaya bagi lawan karena mampu menyerang pasukan <i>land, air</i> dan <i>naval</i> lainnya dengan cara</p>

	1.7	yang berbeda yakni menggunakan amunisi dan rudal sehingga menjadi salah satu <i>vehicle</i> yang mampu memberikan ancaman pada lawan.
 <p>F-117A Nighthawk Tactical Fighter</p>	<p>F-117A Nighthawk Tactical Fighter</p> <p>Pesawat penghindar radar operasional pertama di dunia Mampu terbang dalam kecepatan subsonik tinggi</p>	<p>Pesawat siluman ini memiliki kekurangan dalam mengikat musuh dan lebih mampu menyerang dengan jarak daerah yang tidak terlalu jauh dari wilayah musuh, sehingga pesawat tersebut lebih strategis penempatannya jika dihadapkan pada penyerangan pos musuh yang masih dekat dengan perbatasan aliansi.</p>
 <p>A-10 Thunderbolt</p>	<p>A-10 Thunderbolt</p> <p>Pesawat dukungan udara dengan melakukan kontak dengan jarak dekat terhadap target darat Mampu membawa senapan gantung dalam jumlah banyak hingga 16000 lbs senjata campuran</p>	<p>Pesawat pendukung ini memiliki arti strategis sebagai kekuatan ‘penekan’ ketika pihak Rusia mengikat pasukan tempur NATO di perbatasan sehingga jika penempatannya dikerahkan di negara perbatasan untuk <i>forward presence</i> maka mampu menjadi bagian ancaman jika Rusia berencana untuk menyerang.</p>


 <p>AV-8B Harrier</p>	<p>AV-8B Harrier Pesawat jet yang dirancang untuk menghancurkan permukaan target. Mampu terbang lebih cepat dari Mach 1. Mampu membawa rudal udara ke udara dan udara ke darat.</p>	<p>Arti strategisnya mampu untuk menghancurkan kontak pasukan lawan ketika medan tempur semakin memanas, bahkan kemungkinan penyerangan dari pesawat ini mampu dilakukan melewati teritori aliansi menuju teritori Rusia dengan menggunakan rudal dan misil.</p>
 <p>Mirage 2000</p>	<p>Mirage 2000 Pesawat supersonik untuk misi pengeboman, pencegatan dan pengintaian. Kemampuan untuk memberikan perlawanan secara intensif sangat tinggi dengan sayap rendah. Mampu membawa meriam 30mm, berbagai macam bom dan rudal.</p>	<p>Kemampuan cepat dan unggul dalam <i>air combat</i> membuat pesawat ini memiliki arti strategis untuk mampu unggul dalam membalas serangan udara Rusia dengan membawa rudal yang dengan kecepatan dan perlengkapan rudalnya membuatnya mampu untuk melewati atau mendekati teritori lawan dan melakukan penyerangan.</p>
 <p>EA-6B Prowler</p>	<p>EA-6B Prowler Berisikan awak 4 orang. Mengganggu radar komunikasi musuh. Mampu mencapai target tanpa</p>	<p>Pesawat pembawa rudal ini mampu untuk membawa ancaman rudal hingga mendekati bahkan membuat rudal tersebut memasuki wilayah</p>


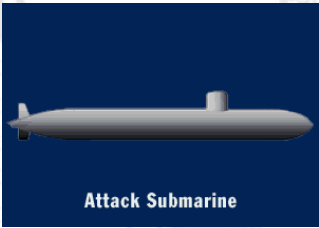
	<p>terdeteksi Membawa rudal AGM88AHARM</p>	<p>lawan dengan kemampuannya untuk mengganggu radar komunikasi sehingga terdapat kemungkinan rudal dan pesawat memasuki/mendekati daerah lawan tanpa terdeteksi.</p>
	<p>AWACS E-3A Sentinel Pengintaian, kontrol komando dan komunikasi di segala macam cuaca Memiliki kubah radar yang dapat mendeteksi target kecil dan rendah hingga target besar yang memiliki jarak lebih tinggi</p>	<p>Kemampuan untuk mendeteksi dan melakukan kontrol komando dan komunikasi membuat armada ini dapat memberikan aliansi pengetahuan mengenai bagaimana mengelola ruang pertempuran dengan Rusia jika ada indikasi atau sudah terlibat kontak dalam pertempuran. AWACS dapat membuat NATO mampu untuk mendeteksi adanya kontak udara dari jarak jauh sehingga dapat berguna dalam patrol udara dan sesuai untuk merespon krisis dengan deteksi targetnya.</p>
	<p>Eurofighter Typhoon Pesawat tempur peran ganda dan pesawat tempur</p>	<p>Pesawat tempur tangkas ini dengan kemampuan unggulnya dalam pertempuran mampu</p>

<p><i>swing role</i> paling maju di dunia. <i>Highly agile</i>, mampu untuk melumpuhkan udara ke udara dan udara ke darat secara bersamaan</p>	<p>untuk digunakan NATO dalam misi seperti sebagai respon terhadap krisis yang tiba-tiba muncul di wilayah aliansi dan perlu sigap untuk ditangani serta patrol udara di negara Baltik yang rawan terhadap kontak udara dengan pasukan udara Rusia Nampak menjadi tugas yang berguna untuk Typhoon.</p>
--	---

Table 6 Naval Systems

(Sumber : Data Olahan Penulis dari <http://alumnus.caltech.edu/~marcsulf/nato/nato.html> dan <http://www.nspa.nato.int/en/organization/Logistics/WSES/wses.htm>)



<i>Naval Systems</i>	Arti Strategis
 <p>Aircraft Carrier Kapal induk paling kuat di teluk Mampu menampung 77 pesawat termasuk pesawat tempur seperti F14 dan F/A18</p>	<p>Kapal ini memiliki arti strategis yang mampu untuk memperkuat kekuatan maritim NATO demi menghadapi secara sigap suatu krisis dan mempertahankan kawasan Laut Baltik yang berdekatan dengan Rusia dengan kemampuannya sebagai penyedia permanen kapal-</p>



		<p>kapal NATO dari negara-negara anggota yang melakukan latihan misi dan intervensi guna siap menghadapi ancaman Rusia.</p>
 <p>Destroyer</p>	<p>Destroyer Kapal perusak yang membawa 339 awak Mampu menembakkan rudal Tomahawk Mampu melindungi kapal lain dalam armada</p>	<p>Kapal ini sebagai pembawa rudal Tomahawk yang memiliki kemampuan menyerang menggunakan rudal dengan cepat sehingga ketika berhadapan dengan Rusia di medan tempur kapal ini memiliki nilai ancaman terhadap kapal tempur lainnya.</p>
 <p>Attack Submarine</p>	<p>Attack Submarine Kapal penyerang dengan misi intelijen Mampu untuk melakukan pengiriman pasukan khusus, mengumpulkan informasi dan misi sebagainya Mampu bertahan dari serangan kapal atau dapat disebut sebagai kapal selam anti kapal Mampu membawa jenis rudal</p>	<p>Kapal selam dengan kemampuan membawa rudal memperlihatkan arti strategis kapal selam ini yakni mampu untuk melumpuhkan kapal selam lainnya serta berguna untuk mengumpulkan informasi mengenai kapal musuh yang mungkin mendekati perbatasan laut negara anggota di kawasan Laut Baltik sembari melindungi</p>

bermacam-macam hingga mencapai target lawan	kapal non selam terhadap kapal selam Rusia yang memasuki kawasan.
---	---

Table 7 Rockets and Missile

(Sumber : Tabel olahan data dari <http://alumnus.caltech.edu/~marcsulf/nato/nato.html> dan <http://www.nspa.nato.int/en/organization/Logistics/WSES/wses.htm>)

Rockets and Missile	Arti Strategis
 <p>SPIKE Missile System Terdiri dari rudal anti tank jarak menengah dan jarak jauh Memiliki sensor CCD dan IR untuk operasi siang dan malam Mampu digunakan dalam cuaca buruk dengan hulu ledak tandem hingga mampu mencapai target di bagian yang rentan</p>	Arti strategis dari misil ini yakni kemampuannya mampu untuk menghentikan pasukan Rusia yang mengancam jika memasuki teritori aliansi dengan penembakan yang tepat sasaran pada target di bagian rentan.
 <p>TOW Missile System Rudal anti tank Menggunakan sistem SACLOS Mampu mencapai target hingga 3750 meter Terbang dengan rata-rata 180 meter per detik</p>	Jarak target yang mampu dicapai cukup jauh dengan kemampuan yang cepat membuat misil ini berguna untuk menghentikan atau mengurangi dan menghambat lawan sebelum lebih jauh memasuki daerah aliansi.

 <p>AGM-88 HARM</p>	<p>AGM-88 HARM Rudal anti radiasi dengan kecepatan tinggi, jarak 80 mil Untuk membutakan musuh dan menghancurkan instalasi radar Mampu membawa hulu ledak 150 pon di atas ketinggian 760 mph</p>	<p>AGM-88 HARM sangat strategis dalam tempur udara dikarenakan jika terdapat rudal darat-udara maka HARM mampu untuk menghancurkan instalasi radar musuh sehingga aliansi dapat terlindungi dari ancaman rudal tersebut.</p>
 <p>Tomahawk Cruise Missile</p>	<p>Tomahawk Cruise Missile Kapal selam jelajah yang diluncurkan sepanjang massa kapal Menggunakan sistem panduan internal Kecepatan 550 mil per jam dan menghasilkan hulu ledak seberat 1000 pon.</p>	<p>Ketika terdapat kapal tempur yang menyerang pasukan NATO, Tomahawk misil mampu untuk menghancurkan ancaman tersebut melalui kapal tempur Destroyer, kemampuan ledak dan kecepatannya menambah level ancaman pada pasukan maritim Rusia.</p>

Conventional deterrence memiliki prinsip mekanisme *deterrence by denial*, yakni berusaha meyakinkan potensial lawan bahwa potensial lawan tidak akan mampu untuk mencapai tujuannya melalui agresi.¹²⁷ Hal tersebut dilakukan dengan memberikan ancaman berupa ancaman *conventional forces*, dikarenakan *conventional deterrence* bergantung pada

¹²⁷ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 2.



ancaman yang memiliki fungsi untuk mampu mengikat lawan dalam pertarungan di medan.¹²⁸ Bagi potensial lawan, kalkulasi mengenai apakah *deterrer* merespon terhadap tindakan yang mungkin ke depan akan dilakukan oleh potensial lawan dan bagaimana serta secepat apa *deterrer* mampu untuk menghadang dan mengikat potensial lawan dalam medan. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan menurut Michael Gerson dan Daniel Whiteneck potensial lawan mengharapkan situasi *fait accompli* untuk dapat mencapai tujuannya.¹²⁹ Strategi tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada kemampuan untuk dapat menyerang dengan cepat dan memperoleh kemenangan sebelum kekuatan atau pasukan *deterrer* dapat mencapai medan.

Penulis melihat bahwa dalam *land systems* yang dimiliki oleh NATO, arti strategis yang dimiliki lebih kepada kemampuan bertahan dan menyerang dalam merespon ancaman dari pihak lawan yang jika penulis analisa akan sangat berguna untuk ditempatkan pada negara perbatasan aliansi dan Rusia yang memiliki medan darat meskipun *land systems* memiliki kekurangan karena meninggalkan ‘jejak kaki’ ketika melakukan pengintaian, kemampuan *lands systems* dapat menjadi lebih strategis ketika dikerahkan pada negara Baltik dan Polandia sebagai bentuk ancaman terhadap Rusia yang melakukan aneksasi terhadap Crimea dengan mengerahkan pasukan darat sehingga *land systems* menjadi hal penting untuk pertahanan dan jaminan keamanan aliansi di wilayah timur.

Pada kekuatan *aircraft*, NATO memiliki jumlah banyak dan beragam

¹²⁸ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

¹²⁹ Michael Gerson, Op.Cit., hal.11.

mengenai kekuatan konvensional udara. Banyak dari *aircraft* dan *fighter jets* tersebut yang strategis untuk mampu menyerang menggunakan rudal ke wilayah Rusia jika Rusia menyerang, bahkan banyak diantaranya yang merupakan pesawat tempur yang ahli dalam *aerial combat*. Kemampuan berbagai pesawat tempur tersebut mampu mengikat jika pasukan udara Rusia melakukan kontak tempur dan beberapa diantara bahkan mampu untuk melaksanakan tugas intelijen mengumpulkan informasi dan bertindak sebagai ‘mata langit’ yang memiliki arti strategis untuk melakukan patrol udara terutama di daerah yang rawan terhadap kontak udara dengan Rusia yakni negara-negara Baltik dan Polandia.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan ancaman terhadap Rusia di kawasan Laut Baltik yang memisahkan beberapa negara aliansi dengan Rusia. Hal ini penting mengingat bahwa beberapa konfrontasi yang dilakukan Rusia juga berasal dari wilayah laut. Untuk itu *conventional forces* berupa kapal tempur dan kapal induk menjadi saran penting bagi kekuatan maritim NATO untuk bertahan dan menyerang. Arti strategis dari beberapa bagian maritim konvensional milik NATO adalah mampu untuk memperkuat wilayah maritim sebagai penyedia permanen dari seluruh kapal negara aliansi yang melaksanakan misi guna menjaga keamanan aliansi dan hal ini memudahkan pasukan NATO untuk segera mengerahkan pasukan dimanapun ancaman berada dengan mempersiapkan *forward presence* berupa kapal induk sehingga menimbulkan efek ancaman NATO terhadap Rusia menjadi lebih dekat bukan hanya di perbatasan darat tetapi juga banyak terdapat di wilayah laut hingga misi pengintaian

dan pengumpulan informasi juga dilakukan mengingat wilayah Rusia yang pangkalan militernya dekat dengan aliansi yakni di Kaliningrad yang mengharuskan NATO untuk lebih waspada.

Roket dan rudal menjadi tambahan nilai dalam hal ancaman yang dapat ditunjukkan NATO terhadap Rusia, seluruh bagian wilayah baik darat, udara dan laut mampu untuk membawa roket dan misil yang memiliki kemampuan jarak jauh dan daya ledak masing-masing sehingga memiliki arti strategis untuk menghancurkan lawan sebelum pasukan lebih banyak datang menuju teritori aliansi dan untuk menyerang menuju wilayah Rusia jika Rusia melakukan tindakan yang diluar batas kedaulatan negara anggota. Namun untuk lebih jauhnya dari kemampuan dan arti strategis *conventional forces* tersebut, akan terdapat efek ancaman yang lebih nyata yang dapat dilihat ketika ancaman dari kapabilitas smiliter tersebut digunakan dalam sebuah kegiatan atau misi tertentu dari RAP.

Sebagian besar kegiatan RAP merupakan kegiatan respon militer yang dilakukan dengan penguatan kekuatan konvensional dan penggunaan kekuatan tersebut untuk menjalankan misi tertentu. Beberapa kegiatan yang dilakukan di RAP mengenai hal tersebut yakni kegiatan *Baltic Air Policing Mission, Standing Naval Forces*, patrol AWACS dan penguatan NATO Respon Force yang terdapat di dokumen mengenai rincian isi langkah RAP tahun 2014 hingga 2016.

1. *Baltic Air Policing Mission*

Dalam *assurances measures* di RAP, *Baltic Air Policing Mission* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh NATO dalam pelaksanaan implementasi RAP di tahun 2014 dan tahun seterusnya dikarenakan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin utama dalam RAP. Patrol udara merupakan bagian dari misi lama NATO dalam NATO Air Policing. NATO Air Policing merupakan kebijakan *collective defense* yang dilakukan NATO dengan berusaha untuk menjaga keamanan melalui udara bagi negara-negara anggota yang tidak memiliki kapabilitas mumpuni untuk mempertahankan negaranya sendiri, seperti Albania, Iceland, Luxembourg, Slovenia, Latvia, Lithuania dan Estonia.¹³⁰ Sebelum dibuatnya RAP, NATO Air Policing memiliki rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya dalam melakukan patrol udara ke berbagai daerah tersebut. Pasca Rusia melakukan intervensinya terhadap Ukraina beserta aneksasinya terhadap Crimea, NATO Air Policing memfokuskan kegiatan patroli udara pada negara-negara Baltik dengan sebutan misi yang lebih terperinci, yakni *Baltic Air Policing*. Perbedaan *Baltic Air Policing* yang dilakukan sebelum dan sesudah dibuatnya RAP merupakan perbedaan jumlah pasukan dan alat militer yang dikerahkan dan rotasi yang dilakukan untuk melakukan pergantian patrol udara oleh negara-negara.

Sebelum dibuatnya RAP dan munculnya tindakan Rusia, *Baltic Air Policing* dilakukan dengan kontribusi dari satu negara saja yang

¹³⁰ NATO, "*NATO Air Policing*", diakses dari: <https://www.ac.nato.int/page5931922/-nato-air-policing> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.03 WIB.

mengerahkan pasukan dan alat militernya, seperti *Baltic Air Policing* yang dilakukan pada tahun 2013 yang menjadi giliran rotasi Belgia untuk melakukan patrol udara dengan *Belgian Air Component Force* dengan jangka waktu rotasi selama satu tahun. Pasca munculnya ancaman dari Rusia di Ukraina, RAP dibuat dengan menerapkan misi *Baltic Air Policing* menjadi lebih ketat dan mengancam. Setiap tahunnya *Baltic Air Policing* dilakukan oleh dua hingga empat negara berbeda yang memberikan kontribusi, dengan spesifikasi setiap negara mengirim jet tempur dan aircraft kurang lebih berjumlah 4 buah.¹³¹ Sehingga pasca ancaman dari Rusia tersebut RAP meningkatkan jumlah jet tempur yang digunakan menjadi 16 buah dengan 4 buah jet tempur dari per negara yang berkontribusi di dalamnya.¹³² Pada tahun 2014 terdapat 8 negara yang berkontribusi dan berperan untuk melakukan rotasi dalam patrol udara di negara-negara Baltik, yakni Polandia, United Kingdom, Denmark, Prancis, Portugal, Kanada, Jerman dan Belanda. Pada tahun 2015 rotasi patrol udara dilakukan oleh Italia, Polandia, Spanyol, Belgia, Norwegia, United Kingdom, Jerman dan Hungaria. Pada tahun 2016 dilakukan oleh Belgia, Spanyol, United Kingdom, Portugal, Prancis dan Jerman.

Penggunaan kekuatan konvensional yang lebih utama digunakan dalam melakukan patrol udara di negara-negara Baltik adalah Eurofighter Typhoon dan F-16AM Fighting Falcon. Dengan kemampuan F-16 Fighting Falcon dan Eurofighter Typhoon yang telah penulis jelaskan

¹³¹ Reuters, "NATO to Triple Baltic Air Patrol", diakses dari: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-nato/nato-to-triple-baltic-air-patrol-from-next-month-idUSBREA371WH20140408> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.06 WIB.

¹³² Ibid.

sebelumnya diatas, keduanya merupakan pesawat maneuver yang paling unggul dan tangkas di dunia dalam *aerial combat* dengan membawa berbagai rudal secara bersamaan. Penulis menganalisa bahwa penggunaan utama kedua pesawat tersebut dalam patrol udara di Baltik merupakan hal yang masuk akal dan strategis. Hal tersebut dikarenakan dengan kemampuan unggul kedua pesawat tersebut maka mampu memberikan perlindungan utama di negara-negara anggota yang berbatasan dekat dengan Rusia. Kedua pesawat tersebut dapat menjadi hal pertama yang dihadapi Rusia ketika Rusia memiliki kemungkinan untuk menyerang sehingga sebelum pasukan Rusia berbuat banyak dalam menyerang atau melakukan intervensi di wilayah NATO yang minim kapabilitas dan memiliki etnis Rusia yang cukup tinggi seperti negara-negara Baltik tersebut. Kemampuan pesawat keduanya yang mampu untuk memenuhi radius tempur sejauh lebih dari 500 mil dan deteksi yang cepat membuat arti strategis pesawat tersebut semakin tinggi dikarenakan keduanya berarti mampu untuk diandalkan dalam melakukan *rapid response* ketika ancaman muncul dari udara maupun darat oleh Rusia.

2. *Standing Naval Forces*

NATO melakukan patroli maritim secara intensif terhadap beberapa bagian wilayah yang dianggap rawan oleh ancaman, yakni Laut Baltik, Laut Hitam dan Laut Tengah. Patrol maritim tersebut dilakukan oleh *Standing NATO Maritime Groups* dan *Standing NATO Mine Counter-Measures Groups*. *Standing NATO Maritime Groups* merupakan kekuatan maritime multinasional terpadu yang terdiri dari kapal-kapal dari berbagai

negara anggota. Kapal-kapal dan aset udara yang dimiliki tersebut tersedia secara permanen untuk NATO untuk melakukan berbagai tugas mulai dari berpartisipasi dalam latihan untuk melakukan intervensi dalam misi operasional, memberikan NATO kemampuan maritim untuk operasi dan kegiatan lainnya di masa damai dan krisis, selain itu membantu membangun kehadiran aliansi, menunjukkan solidaritas, melakukan kunjungan diplomatik rutin ke berbagai negara dan menyediakan berbagai kemampuan maritim militer untuk misi yang sedang berlangsung. Patrol maritim yang dilakukan di wilayah laut tersebut merupakan bagian dari operasi yang dilakukan oleh NATO Standing Naval Forces. Aliansi terutama Amerika Serikat menggunakan kapal penjajah, *frigates*, kapal patrol kapal pengintai dan sebagainya.

Di bawah Standing Naval Force tersebut, berbagai *conventional forces naval* digunakan, yakni *USS Vicksburg*, *Harpoon* rudal anti kapal, *Canadian Halifax-class Frigate HMCS Fredericton* dengan kapal selam anti kapal selam *Mark 46 Torpedoes*, *anti-missil Evolved Sea Sparrow Missile System*, *Yavuz-class Frigate TCG Turgutreis*, *the Spessart*, *the Italian Mistral-class Missile Frigate Aliseo*, *ROS Regina Maria* dan *Battle Cruiser Pyotr Velikiy*. Namun penguatan maritim dalam Standing Naval Forces di RAP mengutamakan penggunaan kapal *frigates*, *destroyer* dan kapal *mine countermeasures*.¹³³

¹³³ Atlantic Council, "Admiral NATO's Standing Naval Forces are the Alliance's First Response", diakses dari: <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/admiral-nato-s-standing-naval-forces-are-the-alliance-s-first-responders> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 22.36 WIB.

Laut merupakan wilayah yang perlu dilindungi dalam menjaga keamanan aliansi. Mempertahankan dan memperkuat wilayah kelautan dapat mencegah lawan untuk melakukan agresi. Bagi aliansi wilayah kelautan sangat penting dalam mencegah lawan untuk menyerang negara anggota, terutama NATO merupakan aliansi besar di Eropa yang dikelilingi oleh lautan yang berbatasan dengan ancaman utama saat ini, yakni Rusia. Terutama semenjak aneksasi dan penempatan pasukan Rusia di Crimea yang dapat mengancam bukan hanya melalui darat tetapi juga melalui lautan. Sehingga NATO dengan melakukan intensif patrol maritim dengan kehadirannya melalui angkatan laut dalam jumlah yang lebih banyak dan kekuatan yang lebih besar melalui *conventional forces* di kawasan Laut Hitam, Laut Tengah dan Laut Baltik mampu untuk mencegah Rusia jika Rusia berencana menggunakan jalur laut untuk melakukan agresi. NATO mampu untuk memperkuat wilayah maritim sebagai penyedia permanen dari seluruh kapal negara aliansi yang melaksanakan misi guna menjaga keamanan aliansi dan hal ini memudahkan pasukan NATO untuk segera mengerahkan pasukan dimanapun ancaman berada dengan mempersiapkan *forward presence* di bawah NATO Standing Naval Force.

3. AWACS patrol over Eastern Europe

NATO melakukan pengintaian dan patrol maritim melalui AWACS di wilayah Eropa Timur, yakni Polandia, Rumania serta negara-

negara Baltik.¹³⁴ Pengintaian tersebut didasari awalnya untuk pengamatan mengenai krisis Ukraina yang terjadi pada tahun 2014. Berdasarkan geografis, negara anggota NATO menjadi terancam atas agresi dan invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, sehingga AWACS dikerahkan untuk dapat memonitor mengenai eskalasi krisis yang terjadi di Ukraina.¹³⁵

AWACS merupakan armada pesawat terbang *Boeing E-3A Airbone Warning and Control System* yang menyediakan aliansi pengawasan udara dan maritim dengan perintah dan kontrol udara serta dapat membantu dalam kemampuan pengelolaan ruang pertempuran, sehingga AWACS tersebut banyak digunakan guna menjalankan misi sebagai kepolisian udara, operasi evakuasi, respon krisis dan sebagainya.

Dengan adanya pengintaian melalui AWACS tersebut NATO berharap bahwa operasi tersebut mampu untuk meningkatkan kesadaran mengenai situasi aliansi.¹³⁶ Namun meskipun tujuan dari penggunaan AWACS tersebut adalah guna mengintai darah sekutu timur mengenai krisis negara tetangga yang terjadi, penerbangan AWACS tersebut hanya akan dilakukan di wilayah aliansi.¹³⁷ Penggunaan AWACS untuk melakukan operasi pengintaian terhadap tindakan Rusia dapat memperlihatkan *ability* tertentu dari AWACS yang mampu untuk menjadi

¹³⁴ CBS, "NATO Send AWACS to Monitor Ukraine Borders", diakses dari: <https://www.cbsnews.com/news/nato-awacs-ukraine-borders-poland-romania-tension-with-russia-mounts-over-crimea/> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.08 WIB.

¹³⁵ Aircraft, "NATO to Deploy AWACS Aircraft to Monitor Ukrainian Crisis", diakses dari: <http://www.airforce-technology.com/news/newsnato-to-deploy-awacs-aircraft-to-monitor-ukrainian-crisis-4193394/> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.09 WIB.

¹³⁶ RadioFreeEurope, "NATO to Deploy AWACS Over Poland", diakses dari: <https://www.rferl.org/a/nato-awacs-ukraine-poland-romania-crimea/25292191.html> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.10 WIB.

¹³⁷ Ibid.

dasar ancaman terhadap Rusia. AWACS memiliki kemampuan untuk melacak, mengidentifikasi pesawat lawan yang beroperasi di tempat rendah dan melakukan kontak maritim serta memberikan informasi dan komando kontrol terhadap pasukan pesawat aliansi. Kemampuan terbang yang dimiliki AWACS dapat mencapai 8 jam lebih dengan ketinggian 30 ribu kaki. Namun kemampuan utamanya adalah mampu untuk mendeteksi pesawat lainnya hingga pada jarak 400 km dan memiliki jangkauan radar 120 ribu mil persegi yang membuat AWACS dapat memberikan jangkauan radar pada hampir seluruh bagian Eropa timur dan lainnya.

Kemampuan tersebut menjadikan AWACS memiliki arti strategis yang sangat penting bagi aliansi untuk dikembangkan dan diperkuat operasinya. Dikarenakan AWACS mampu untuk mendeteksi pesawat Rusia yang berada di kawasannya tanpa harus terlalu mendekati teritori lawan dan mampu untuk memberikan informasi cepat pada pasukan aliansi jika terdapat deteksi ancaman dari jauh serta sekaligus dapat memberikan bantuan berupa koordinasi dan pengelolaan pertempuran ketika perang terjadi, hal tersebut yang menyebabkan AWACS menjadi penting dalam RAP sebagai 'mata langit' NATO untuk mengawasi segala tindakan Rusia di kawasan timur. Untuk mencegah hal tersebut AWACS penting ditempatkan dalam negara aliansi mana saja namun dalam RAP lebih difokuskan pada negara-negara bagian timur untuk mencegah Rusia melakukan hal yang tidak diinginkan. Ketika agresi kemungkinan akan dilakukan oleh Rusia maka AWACS yang berada di Rumania dan Polandia mampu untuk merespon cepat melalui radar

pengintaian sebelum pasukan militer Rusia memasuki wilayah aliansi dan menyerang.

4. Enhanced NATO Response Force

NATO Response Force merupakan bidang militer di NATO yang berfokus pada kekuatan multinasional dengan teknologi tinggi yang terdiri dari komponen darat, udara dan maritime serta operasi khusus yang dapat digunakan secara cepat oleh aliansi. Hal lain selain operasional, NRF diperuntukkan untuk mendukung kerjasama yang lebih baik dalam pendidikan pelatihan serta penggunaan teknologi militer yang lebih baik.

NRF didirikan semenjak tahun 2003 dengan spesifikasi tugas untuk mampu melakukan *immediate collective defense*, melakukan operasi manajemen krisis dan melindungi infrastruktur aliansi. Namun pada tahun 2014 dalam Wales Summit, aliansi menyetujui untuk memperkuat NRF yang telah ada dengan membuat VJTF (*Very High Readiness Joint Task Force*) guna merespon ancaman yang diberikan oleh Rusia pada saat itu.

Dengan pendirian VJTF tersebut otomatis membuat ukuran dari NRF menjadi jauh lebih besar dengan jumlah 40 ribu *forces* seperti yang disebutkan dalam RAP yang meliputi komponen darat, udara dan air serta pasukan khusus dari berbagai negara anggota.

VJTF merupakan bagian dari NRF yang terdiri dari brigade multinasional dengan kurang lebih 5000 tentara, 5 batalyon maneuver, didukung oleh udara, maritim dan pasukan khusus. VJTF akan menjadi ujung tombak yang dapat digunakan dalam waktu cepat untuk menghadapi

ancaman dari Rusia. Jika VTJF tersebut diaktifkan, maka pasukan akan dikerahkan segera bergerak dengan mengikuti indikator ancaman pertama sebelum krisis terjadi, untuk bertindak sebagai pasukan pencegah potensial eskalasi konflik secara lebih lanjut.¹³⁸ NRF dalam RAP terakhir tahun 2016 memiliki kekuatan *troops* hingga 20 ribu dengan kemampuan dari 5000 *troops* VJTF mampu dioperasikan hanya dalam jangka waktu 48 jam sementara komponen pasukan lain siap bergerak dalam waktu kurang dari 7 hari, waktu tersebutlah yang membedakan antara VJTF dengan komponen NRF lainnya.¹³⁹ Selain pasukan multinasional yang diutamakan dalam VJTF, terdapat komponen lainnya yang dikerahkan yakni komponen maritim yang ditempati oleh NATO Standing Naval Forces dan komponen udara untuk melakukan *aerial combat*.

Yang menjadi perhatian utama dalam NRF di RAP ialah kesiapan dan kecepatan yang mampu dilakukan oleh *troops* NATO untuk merespon ancaman sebelum terjadinya krisis. Pasukan tentara juga termasuk dalam bagian dari *conventional forces*. Kemampuan pasukan VJTF untuk dapat dikerahkan dalam waktu 48 membuat pasukan VJTF memiliki arti strategis tersendiri. Penelitian yang dilakukan RAND mengemukakan bahwa Rusia dapat ‘mencapai’ kota Tallinn, Estonia dan Riga, Latvia dalam waktu 60 jam.¹⁴⁰ Sehingga melalui VJTF, NATO dapat mencegah Rusia dalam mencapai kemenangan melalui *‘fait accompli’*. *Rapid defeat*

¹³⁸ SHAPE, “NATO Response Force/Very High Readiness Joint Task Force”, diakses dari: <https://www.shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-joint-task-force> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 06.36 WIB.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ RAND, “Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank” diakses dari: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.33 WIB.

menjadi tantangan terbesar NATO dalam melindungi negara-negara anggota yang berbatasan dengan Rusia. Jika NATO telah dikalahkan melalui *rapid defeat* maka dalam jangka seterusnya akan sulit bagi NATO untuk mengalahkan Rusia. Sehingga kekuatan *rapid response* diperlukan NATO guna menghadapi tantangan *rapid defeat* yang kemungkinan akan dihadapi NATO dan VJTF merupakan salah satu dari kekuatan konvensional yang dikerahkan dan mampu untuk melakukan hal tersebut sehingga arti strategis VJTF sangat esensial dalam RAP untuk menghadapi Rusia.

Military capability menjadi dasar ancaman yang digunakan NATO dalam *conventional deterrence* guna menghadapi Rusia. setiap misi dan *troops* maupun *weapons* yang digunakan dalam RAP memiliki kemampuan dan arti strategis tersendiri yang dapat digunakan sebagai bentuk ancaman bagi Rusia. Hampir sebagian misi dan kekuatan yang dikerahkan dalam RAP tersebut berfokus pada perlindungan keamanan di wilayah timur, yakni negara anggota yang memiliki perbatasan dekat dan Rusia seperti Estonia, Lithuania, Latvia dan Polandia. *Conventional forces* sebagai bentuk ancaman yang digunakan dalam RAP tersebut juga akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh NATO bukan saja melalui bentuk patroli dan penguatan bidang darat dan laut namun juga melalui kegiatan seperti latihan gabungan dan *forward presence* yang selanjutnya akan dibahas dalam *strategic communications*.

5.1.2. *Political Resolve*

Political resolve merupakan suatu komitmen yang menunjukkan adanya rasa keinginan untuk menggunakan kapabilitas militer sehingga ancaman dapat terlihat nyata.¹⁴¹ Melalui *policies on use of force* terdapat komitmen yang diperlihatkan dalam tindakan politik untuk dapat merespon secara militer ketika diperlukan.¹⁴² Dalam hal ini NATO memerlukan *policies on use of force* dalam RAP ketika *conventional forces* tersebut diperlukan pada perang atau ketika krisis terjadi. *Political resolve* sudah dimiliki NATO sejak lama sebagai aliansi militer yakni adanya komitmen dalam *Article 5*. *Article 5* memuat mengenai komitmen dan prinsip NATO dalam *collective defenseny* untuk menyatakan bahwa serangan terhadap satu atau lebih dari anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap semua negara anggota. Prinsip tersebut dapat juga disebut sebagai bagian dari *political resolve*, dikarenakan adanya tindakan politik untuk menggunakan kekuatan ketika dibutuhkan.

Political resolve dapat berubah atau dapat berkembang seiring dengan perubahan kondisi negara dan kawasan. Semakin tingginya ancaman dalam lingkungan sekitar maka akan semakin tinggi pula komitmen dalam *political will* yang ditunjukkan. *Political resolve* bergantung kepada seberapa besar kepentingan *deterrent*. Tingkat tekad tersebut dalam *political resolve* merupakan fungsi dari kepentingan *deterrent*, semakin erat isu yang dipertaruhkan terkait dengan kepentingan

¹⁴¹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 26.

¹⁴² Michael Gerson, Op.Cit., hal. 27.

deterrer maka akan semakin besar tekad atau kemauan *deterrer* dalam melakukan *conventional deterrence*.¹⁴³ RAP sebagian besar terdiri dari misi dan operasi yang berupa respon militer, namun terdapat *political resolve* yang ditujukan dan diimplementasikan dalam RAP NATO.

Dalam *adaptive measures* terdapat kegiatan NATO yang berisikan mengenai pembaruan dan pengembangan mengenai konsep NATO *Defence Planning* untuk wilayah Eropa Timur. NATO *Defence Planning Process* merupakan suatu cara pengidentifikasian dan pengembangan kemampuan aliansi.¹⁴⁴ Melakukan perencanaan pertahanan merupakan hal yang penting bagi suatu aliansi. NDPP tersebut dirancang untuk merencanakan pertahanan, mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh aliansi dalam hal politik dan keamanan serta untuk menetapkan prioritas aliansi di masa mendatang.¹⁴⁵ NDPP dibuat dengan melihat NATO *Strategic Concept* sebagai dasar. Hal tersebut membuat NDPP kali ini, sesuai dengan *Strategic Concept* sebelumnya, dibuat dengan mengutamakan 3 hal yakni *collective defense, crisis management* dan *cooperative security*.¹⁴⁶ Untuk melakukan pengembangan dan perubahan dalam NATO *Defence Planning*, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh NATO, yakni *political guidance, determin requirements, apportionment of requirements and setting of targets, facilitating implementation* dan *review results*.

¹⁴³ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 27..

¹⁴⁴ NATO, "NATO Defence Planning Process", diakses dari: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_49202.htm pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 16.00 WIB.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Pawet Fleischer, 2015, "NATO Defence Planning Process Implications for Defence Posture", (Academic Security Forum), hal. 103.

Political Guidance merupakan langkah pertama dalam *defence planning* mengenai panduan politik yang perlu dibuat sebelum menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh aliansi. *Political Guidance* membahas mengenai tujuan dan objektivitas dari aliansi mengenai skala dan bentuk operasi yang dilakukan di masa mendatang.¹⁴⁷

Dalam *Political Guidance*, negara anggota bukan saja menyepakati mengenai penyiapan pasukan untuk pertahanan aliansi dan merespon krisis, tetapi juga negara anggota menyepakati mengenai penyetujuan dalam penyebaran pasukan dan alat utama sistem persenjataan secara penuh dalam berbagai misi.¹⁴⁸ *Determine requirements* merupakan langkah mengenai apa yang dibutuhkan oleh aliansi dalam hal kapabilitas di masa itu dan di masa depan.¹⁴⁹ *Apportion requirements and set targets* merupakan langkah mengenai pembagian dalam kapabilitas terhadap masing-masing negara anggota dengan menyesuaikan pada prioritas, pembagian yang adil dan tantangan yang dihadapi.¹⁵⁰ *Facilitate implementation* merupakan langkah dalam membantu aliansi dalam memfasilitasi dan mengarahkan upaya NATO unruk memenuhi prioritas yang telah disepakati sebelumnya secara koheren dan tepat waktu.¹⁵¹ Yang terakhir merupakan langkah *review results*. Langkah tersebut membahas mengenai pemeriksaan sejauh mana tujuan politik dan ambisi NATO yang telah terpenuhi.¹⁵² *Political resolve* yang cukup terlihat dalam

¹⁴⁷ Ibid, hal 107.

¹⁴⁸ Ibid, hal 107.

¹⁴⁹ NATO Defence Planning Process, Op.Cit.

¹⁵⁰ NATO Defence Planning Process, Op.Cit.

¹⁵¹ NATO Defence Planning Process, Op.Cit.

¹⁵² NATO Defence Planning Process, Op.Cit.

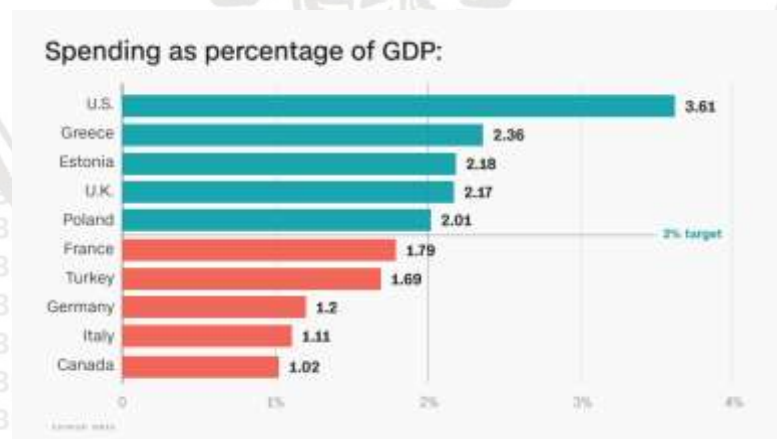
pengembangan *defence planning* yang dilakukan NATO di langkah *adaptive* merupakan adanya komitmen untuk seluruh aliansi melakukan partisipasi dalam langkah awal *defence planning* dibuat, yakni dalam *Political Guidance* ketika seluruh negara anggota menyepakati mengenai penyiapan pasukan untuk pertahanan aliansi dan merespon krisis, serta menyepakati mengenai penyetujuan dalam penyebaran pasukan dan alat utama sistem persenjataan secara penuh dalam berbagai misi.¹⁵³ Adanya pengembangan dalam *defence planning* di bagian wilayah timur aliansi terkait pelaksanaan RAP tersebut menjadi suatu komitmen secara politik yang dilakukan oleh seluruh negara anggota untuk mengimplementasikan operasi-operasi yang berada dalam RAP. Komitmen selanjutnya ditunjukkan melalui kontribusi berupa investasi ataupun pendanaan terhadap NATO yang menjadi bagian dari pendanaan RAP. RAP didanai melalui prinsip *funding* yang dimiliki NATO yakni melalui iuran nasional.¹⁵⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam profil NATO, yakni mengenai *funding* yang dilakukan oleh NATO, terdapat dua jenis kontribusi yang dapat dikategorikan sebagai *funding*, yakni kontribusi secara langsung dan kontribusi secara tidak langsung. Dengan memberikan kontribusi tersebut maka dapat menunjukkan bahwa negara anggota memiliki komitmen untuk mengimplementasikan RAP demi keamanan bersama.

¹⁵³ Pawet Fleischer, Op.Cit., hal. 107.

¹⁵⁴ Defence and Security Committee, "NATO's Readiness Action Plan Assurance and Deterrence for the Post 2014 Security Environment", (pdf), hal. 9.

Kontribusi secara langsung merupakan kontribusi melalui iuran secara bersama. Setiap negara anggota perlu untuk menyumbangkan 2% dari GDP negara yang dimiliki pertahunnya untuk kepentingan pertahanan NATO, termasuk untuk melaksanakan RAP dan aliansi pun menggunakan 20% dari anggaran tersebut untuk kepentingan pertahanan, terutama penggunaan, penelitian dan pengembangan dari peralatan militer.¹⁵⁵

Meskipun tidak semua negara anggota memenuhi kebijakan untuk menyumbangkan 2% dari GDP seperti yang sudah disepakati, beberapa negara masih berada di atas target yang diharapkan dalam hal tersebut. Berikut merupakan data statistik mengenai persentase iuran negara-negara anggota kepada NATO pada tahun 2014 yang memperlihatkan negara anggota selain Amerika Serikat, Yunani, Estonia, United Kingdom dan Polandia masih menyumbangkan GDP dibawah 2% seperti yang telah disepakati sebelumnya dalam *Wales Summit Declaration*.¹⁵⁶



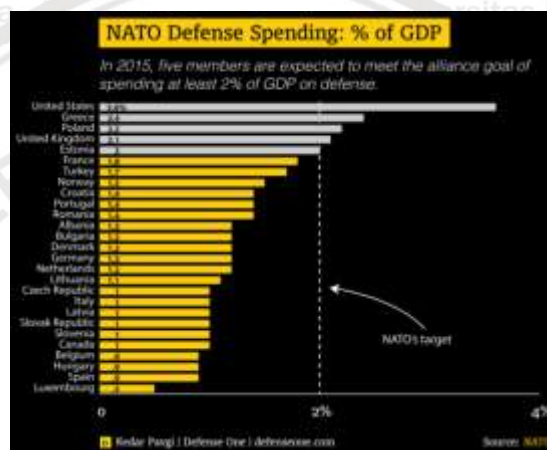
Data Grafik 1 Anggaran NATO dari GDP Tahun 2014

¹⁵⁵ Wales Summit Declaration, Op.Cit.

¹⁵⁶ CNN Money, 2016, "Which NATO Members Are Falling Short on Military Spending", diakses dari: <http://money.cnn.com/2016/04/15/news/nato-spending-countries/index.html> pada tanggal 7 Desember pukul 17.10 WIB .

(Sumber : <http://money.cnn.com/2016/04/15/news/nato-spending-countries/index.html>)

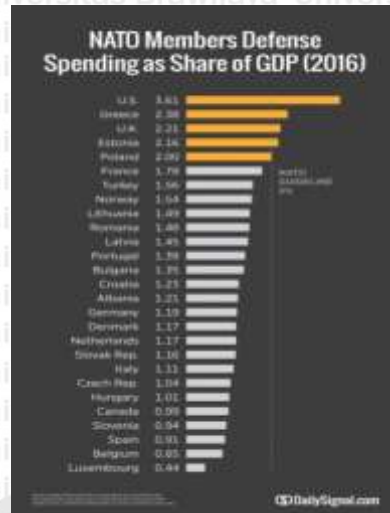
Berikut merupakan data statistik mengenai persentase iuran negara-negara anggota kepada NATO pada tahun 2015 yang memperlihatkan bahwa negara yang berkontribusi sesuai dengan kesepakatan tetapelah negara yang sama, Amerika Serikat, Yunani, Polandia, United Kingdom dan Estonia.



Data Grafik 2 Anggaran NATO dari GDP Tahun 2015

(Sumber : Lithuania in NATO <https://twitter.com/LitdelNATO>)

Berikut merupakan data statistik mengenai persentase iuran negara-negara anggota kepada NATO pada tahun 2016 yang memperlihatkan mengenai *funding* di tahun tersebut yang masih memuat negara-negara anggota yang sama seperti tahun sebelumnya.



Data Grafik 3 Anggaran NATO dari GDP Tahun 2016

(Sumber : <http://dailysignal.com/2017/04/11/trump-nato-leader-to-talk-about-allies-paying-fair-share/>)

Ketiga grafik tersebut memperlihatkan bahwa negara yang berada dalam standar *funding* NATO untuk mengimplementasikan RAP melalui iuran bersama masih dalam kategori kecil. Dan selama tiga tahun RAP dilaksanakan belum ada perubahan terhadap jumlah negara yang memenuhi standar 2%, meskipun jumlah iuran Polandia dan Estonia mengalami sedikit perubahan angka di tahun 2016. Hal ini memperlihatkan bahwa negara anggota NATO tidak memiliki komitmen tinggi untuk berkontribusi secara langsung dalam pendanaan melalui iuran bersama demi keamanan aliansi ketika RAP dilaksanakan pada tahun-tahun tersebut. Bahkan negara-negara anggota maju lainnya tidak memenuhi budget yang disepakati sebelumnya dalam Wales Summit Declaration. NATO merupakan aliansi keamanan yang didasari oleh prinsip *collective defense*, sehingga aliansi memiliki tujuan utama untuk menjamin keamanan setiap negara anggota. Hal tersebut yang menjadi

dasar kebijakan 2% GDP meskipun tidak ada ‘penalti’ yang diberikan terhadap negara yang memiliki standar di bawah target yang telah disepakati.¹⁵⁷ Pengaturan keuangan dalam hal keamanan tersebut juga diterapkan dalam RAP dan menjadi salah satu bentuk komitmen negara anggota dalam berbagai misi dan kemajuan kapabilitas militer aliansi ketika dibutuhkan meskipun dalam kontribusi secara langsung komitmen negara anggota sangat kurang.

RAP hanya dapat diimplementasikan jika negara anggota berpartisipasi di dalamnya, sehingga komitmen dari RAP diwujudkan pula oleh bentuk partisipasi negara anggota dalam bentuk *deploy forces* ketika kekuatan diperlukan untuk kepentingan keamanan aliansi. Pengerahan pasukan maupun peralatan senjata dalam operasi dan misi tertentu merupakan bentuk dari kontribusi secara tidak langsung. Hal ini menjadi vital pula dikarenakan NATO tidak memiliki pasukan sendiri. Komitmen pada awalnya terlihat ketika RAP didirikan di tahun 2014 pada *Wales Summit*, ketika seluruh negara anggota berpartisipasi dalam menyetujui dibuatnya RAP. Namun pada implementasinya ketika RAP dilaksanakan, selain mengenai *defence planning* seperti yang telah dijelaskan, terdapat komitmen yang lebih nyata terlihat ketika *policies on use of force* dari *political resolve* diimplementasikan melalui pengerahan pasukan dari negara-negara anggota. Pengerahan pasukan darat dari Amerika Serikat yang terdiri dari 1st Brigade Combat Team dan 1st Cavalry Division pada

¹⁵⁷ CNN Money, 2017, “How NATO is Funded and Who’s Pays What”, diakses dari: <http://money.cnn.com/2017/05/25/news/nato-funding-explained-trump/index.html> pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 17.30 WIB.

Estonia, Latvia, Lithuania dan Polandia. Kontribusi sebanyak 26 negara anggota dalam penguatan NRF dan VJTF sebanyak 14 negara anggota dan beberapa negara anggota lainnya dalam misi yang berbeda. RAP merupakan langkah yang mendapat dukungan kontribusi dari seluruh negara anggota dengan tugas dan misi yang berbeda-beda. Sehingga parlemen setiap negara untuk mengusahakan hal tersebut menjadi kunci terlaksananya *political will* di RAP. Anggota parlemen negara anggota NATO memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup aliansi, hal tersebut dikarenakan anggota parlemen negara anggota perlu untuk menunjukkan *political resolve* melalui *policies on use of force* untuk bertindak ketika ancaman datang dan itu terlihat dari kontribusi negara-negara yang terlibat dalam RAP. Bahkan parlemen NATO terus menghimbau parlemen negara anggota untuk terus mendukung partisipasi guna implementasi RAP terutama VJTF dalam menghadapi ancaman Rusia.¹⁵⁸ Komitmen melalui kontribusi secara tidak langsung lebih aktif dilakukan oleh keseluruhan negara anggota. Hal tersebut diperlihatkan melalui berbagai operasi dan misi yang dilakukan dalam RAP. Dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa seluruh negara anggota NATO lebih menekankan pada kontribusi secara tidak langsung dalam mengimplementasikan RAP.

¹⁵⁸ NATO, "Policy Recommendations of the NATO Parliamentary Assembly 2014", (pdf), hal 24.

Table 8 Kontribusi Secara Tidak Langsung NATO*(Sumber: Data Olahan Penulis dari NATO's Deterrence and Defense Posture)*

Negara Anggota NATO	Kontribusi Secara Tidak Langsung
Albania	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Latvia
Belgia	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Lithuania
Bulgaria	Bagian dari operasi NATO Forward Presence di Bulgaria, sebagai tuan rumah
Kanada	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Latvia dan Bulgaria
Kroasia	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Lithuania
Republik Ceko	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Lithuania
Denmark	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Estonia
Estonia	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam misi patrol udara Baltik, pengerahan pasukan sebagai tuan rumah lokasi dalam operasi NATO Forward Presence
Prancis	Pengerahan pasukan dan aircraft dalam patrol AWACS di wilayah timur aliansi, Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Estonia dan Lithuania
Jerman	Pengerahan pasukan dan aircraft dalam misi patrol udara Baltik, pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Lithuania dan Bulgaria
Yunani	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Estonia
Hungaria	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Bulgaria, Rumania dan Laut Hitam
Islandia	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Estonia
Italia	Pengerahan pasukan dan vehicle untuk VJTF dan sebagai lokasi NATO Response Force, pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Latvia
Latvia	Lokasi misi patrol udara Baltik dan lokasi utama NATO Forward Presence
Lithuania	Lokasi misi patrol udara Baltik dan lokasi utama NATO Forward Presence
Luxembourg	Pengerahan pasukan dan vehicle dalam operasi

	NATO Forward Presence di Bulgaria, Lithuania, Rumania
Montenegro	Pengeralhan pasukan dan vehicle dalam operasi NATO Forward Presence di Bulgaria, Rumania
Belanda	Pengeralhan pasukan dan aircraft dalam misi patrol udara di Baltik, pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Lithuania
Norwegia	Pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Lithuania
Polandia	Pengeralhan pasukan dan aircraft dalam misi patrol udara di Baltik, lokasi utama NATO Forward Presence, pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Latvia, Bulgaria, Rumania
Portugal	Pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Bulgaria dan Rumania
Rumania	Lokasi utama NATO Forward Presence, pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Polandia dan Bulgaria
Slovakia	Pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Latvia
Slovenia	Pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Latvia
Spainyol	Pengeralhan pasukan dan aircraft dalam misi patrol udara di Baltik, pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Latvia, Bulgaria dan Rumania
Turki	Pengeralhan pasukan dan aircraft dalam patrol AWACS di wilayah timur aliansi, pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Bulgaria dan Rumania
United Kingdom	Pengeralhan pasukan dan aircraft dalam patrol AWACS di wilayah timur aliansi, pengeralhan pasukan dan vehicle untuk VJTF dan sebagai lokasi NATO Response Force, pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Estonia, Polandia, Bulgaria dan Rumania
Amerika Serikat	Pengeralhan pasukan dan vehicle dalam NATO Response Force di Polandia, Bulgaria dan Rumania

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa tingkat *political resolve* dilihat melalui kepentingan apa yang *deterrer* pertaruhkan. Dalam RAP tersebut kepentingan yang dipertaruhkan tentunya adalah keamanan aliansi yang kini terancam oleh Rusia, terutama keamana tersebut

dibutuhkan oleh negara anggota bagian timur yang secara langsung merasakan ancaman secara nyata dari Rusia berupa provokasi-provokasi.

Hal tersebut terlihat ketika NATO dalam RAP mengembangkan dan memperbarui *defence planning* dikarenakan lingkungan ancaman yang berubah dan semakin meningkat di wilayah Eropa timur, terlihat pula melalui anggaran yang ditentukan dalam Wales Summit guna kepentingan dalam pertahanan dan kapabilitas militer yang diperlukan NATO untuk melindungi aliansi dari Rusia, dan segala hal tersebut kemudian diwujudkan secara nyata ketika seluruh negara anggota melakukan kontribusi dalam implementasi RAP meskipun dengan misi dan operasi yang berbeda-beda, terutama dalam kontribusinya dalam VJTF sebagai tujuan dalam dibentuknya RAP ini.

5.2. Strategic Communications

Communication through words dan *communication through actions* menjadi bagian utama lainnya dalam *conventional deterrence*. *Strategic communications* memaparkan mengenai bagaimana mengkomunikasikan dan mengartikulasikan kepada pihak potensial lawan mengenai tindakan spesifik yang tidak *deterrer* inginkan serta mengkomunikasikan *credibility* pada potensial lawan. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan *credibility* dalam *conventional deterrence*, yakni dengan cara *communication through words* dengan mengkomunikasikan kepentingan *deterrer*, kemauan untuk mengartikulasikan dengan tujuan sebagai pertahanan, dan menyampaikan ancaman kepada pihak lawan dan

jaminan kepada aliansi.¹⁵⁹ Melalui cara tersebut maka *deterrer* akan menarik perhatian masyarakat domestik dan internasional bahwa *deterrer* memiliki kredibilitas yang tinggi. Namun terdapat kemungkinan bahwa pihak lawan hanya akan menganggap *statement deterrer* sebagai bentuk *bluffing* atau *cheap talk*, sehingga *aggressor* tidak percaya dengan ancaman yang disampaikan oleh *deterrer*.¹⁶⁰ *Actions* yang dapat dilakukan untuk semakin membuat *aggressor* percaya dan terancam adalah melalui *military actions* yang juga dapat menjadi suatu instrumen politik untuk mempengaruhi *aggressor* agar percaya bahwa ancaman tersebut nyata dan akan terjadi.

5.2.1 *Communication through words*

Communication through words dilakukan dengan mengartikulasikan atau mengkomunikasikan kepada Rusia mengenai apa yang menjadi kepentingan NATO, kemauan untuk mengartikulasikan dengan tujuan sebagai bentuk pertahanan dan pencegahan serta menyampaikan ancaman kepada pihak lawan dan memberikan jaminan keamanan kepada aliansi.¹⁶¹ *Communication through words* diwujudkan dalam bentuk *public statements* melalui pihak petinggi atau pemimpin NATO mengenai hal-hal tersebut.¹⁶² Bagian komunikasi ini menjadi salah satu bagian yang penting dikarenakan tingkat keefektifan *deterrence* akan meningkat jika lawan memahami mengenai tindakan spesifik mana yang

¹⁵⁹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

¹⁶⁰ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

¹⁶¹ Michael Gerson, Op.Cit., hal. 31.

¹⁶² Michael Gerson, Op.Cit., hal. 32.

tidak diinginkan *deterrer*, selain itu melalui *public statements* dari *political leader* juga akan menyampaikan pada dunia internasional, termasuk lawan, bahwa *deterrer* memiliki kredibilitas yang tinggi. Penting dalam *deterrence* bahwa *public statements* yang diberikan berasal dari *political leader* agar kredibilitas dapat dipercaya oleh lawan dan masyarakat internasional. NATO memiliki *public speaker* tersendiri yang memiliki tanggung jawab tertentu dengan salah satunya adalah melakukan pernyataan-pernyataan mengenai aliansi. Dalam NATO pada umumnya yang melakukan hal tersebut merupakan *Secretary General*.

Secretary General NATO merupakan tokoh utama dalam NATO yang memiliki 3 tanggung jawab besar untuk aliansi. Tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab sebagai ketua dari *North Atlantic Council* dan komite lainnya, juru bicara utama dan kepala staf internasional. Dalam menjadi ketua NAC, *Secretary General* memiliki tugas sebagai salah satu dari pengambil keputusan dalam *the Nuclear Planning Group*, NRC dan *the Euro Atlantic Partnership Council*.¹⁶³ Sebagai juru bicara utama, *Secretary General* memiliki tugas untuk menjadi juru bicara mengatasmakan aliansi di publik guna membicarakan *common positions* dalam isu politik.¹⁶⁴ Sedangkan sebagai kepala international staff, *Secretary General* bertugas untuk membuat pertemuan staf dan melakukan pengawasan kerja.¹⁶⁵ NATO perlu untuk menunjukkan mengenai apa yang

¹⁶³ NATO, "NATO Secretary General", diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50094.htm pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 15.30 WIB.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ Ibid.

menjadi kepinginan dan prioritas NATO dengan mengimplementasikan RAP terhadap Rusia. mengenai kepinginan dan prioritas NATO tersebut diungkapkan oleh NATO Secretary General, Jens Stoltenberg, dalam Wales Summit pada tahun 2014.

*“The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our territories and our populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. We stand ready to act together and decisively to defend freedom and our shared values of individual liberty, human rights, democracy, and the rule of law”*¹⁶⁶

Pernyataan tersebut mengemukakan mengenai kepinginan dan prioritas NATO terkait dengan kebijakan yang dibuat yakni mengutamakan perlindungan dan pertahanan teritori aliansi dari berbagai serangan atau ancaman, hal tersebut kembali pada pedoman pasal dari didirikannya NATO, yakni *Article 5*, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu pihak negara anggota akan dianggap serangan terhadap semua negara anggota. Selain itu NATO memiliki kepinginan nilai yang dianut sebagai sebuah aliansi yang menjunjung nilai kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi dan kepatuhan hukum yang telah ditetapkan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa NATO menjunjung pula hukum internasional yang NATO anggap telah dilanggar oleh Rusia dengan melakukan intervensi dan aneksasi terhadap Crimea di tahun 2014.

Pernyataan lainnya yang tidak kalah penting adalah pernyataan NATO sebagai aliansi yang memberikan jaminan keamanan pada seluruh negara anggota. Hal ini penting untuk diinfokan kepada masyarakat domestik aliansi dan masyarakat internasional dikarenakan efek dari pernyataan

¹⁶⁶ Wales Summit Declaration, Op.Cit.

tersebut akan membawa rasa aman terhadap negara anggota, terutama yang memiliki posisi rentan terhadap ancaman langsung dari Rusia seperti negara-negara Baltik dan Polandia yang berbatasan langsung dengan Rusia.

*“We are reaffirming our strong commitment to collective defence and to ensuring security and assurance for all Allies;”*¹⁶⁷

Bagian yang penting juga ialah menyatakan kepada internasional mengenai kredibilitas yang dimiliki oleh *deterrer*. NATO harus menunjukkan bahwa kredibilitasnya tinggi, bahwa NATO memiliki kapabilitas militer yang sedang digunakan dalam operasi tertentu yang memperlihatkan bahwa dalam RAP, NATO sedang melakukan sesuatu yang bernilai ancaman. Selain NATO juga harus menunjukan bahwa negara anggota memiliki komitmen yang tinggi di dalam RAP ini.

*“All Allies are contributing to this defensive effort and they will continuously rotate air, maritime and land forces in the region and conduct additional exercises, 28 for 28, through 2015. At the same time, we are enhancing the NATO Response Force’s capabilities, including through the development of a new Very High Readiness Joint Task Force, the VJTF. We welcome the establishment of an interim VJTF coordinated by SACEUR with forces predominantly from Germany, Norway and the Netherlands, available to the Alliance early in 2015.”*¹⁶⁸

Pernyataan tersebut mengungkapkan mengenai penunjukkan komitmen negara anggota dalam RAP, yakni ketika diungkapkannya bahwa seluruh negara anggota berjumlah 28 turut mengeluarkan partisipasi dan usaha dalam melaksanakan berbagai operasi dan misi yang

¹⁶⁷ Wales Summit Declaration, Op.Cit.

¹⁶⁸ NATO, 2014, “Statement of Foreign Minister on Readiness Action Plan”, diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_115551.htm pada tanggal 7 Desember 2017 18.03 WIB.

dilakukan. Selain itu juga meskipun tidak lengkap tetapi pada pernyataan kali itu terdapat menunjukkan kredibilitas dalam bentuk kapabilitas NATO melalui diperkuatnya NATO Response Force melalui VJTF di tahun 2015.

Rusia perlu mengetahui pula bahwa RAP merupakan suatu respon militer dan politik yang ditujukan kepada Rusia. Sehingga diperlukannya pernyataan langsung bahkan berulang-ulang mengenai hal tersebut agar tidak terjadi mispersepsi dan miskomunikasi terhadap pihak-pihak lain.

Seperti halnya dalam pernyataan berikut yang turut pula menjelaskan mengenai tujuan dibuatnya RAP.

“It responds to the challenges posed by Russia and their strategic implications. The Plan strengthens NATO's collective defence. It also strengthens our crisis management capability. The Plan will contribute to ensuring that NATO remains a strong, ready, robust, and responsive. Alliance capable of meeting current and future challenges from wherever they may arise.”¹⁶⁹

Komunikasi melalui pernyataan juga menjadi sarana bagi NATO untuk menunjukkan tentang apa yang tidak diinginkan dan apa yang diinginkan oleh NATO terhadap Rusia. dalam pernyataan berikut NATO berusaha untuk menjelaskan apa yang diinginkan terhadap Rusia terkait tindakannya terhadap Ukraina dan Crimea, yakni NATO menginginkan aneksasi yang dilakukan terhadap Crimea merupakan pelanggaran serius dalam hukum internasional sehingga NATO ingin Rusia untuk berhenti dan menarik pasukannya dari Ukraina dan sepanjang perbatasan Ukraina dan yang lebih penting adalah himbauan terhadap Rusia yang diungkapkan

¹⁶⁹ Wales Summit Declaration, Op.Cit., hal. 2.

NATO bahwa Rusia perlu untuk mengambil langkah penting untuk menjaga keamanan, hak dan kebebasan di daerah kawasan.

*“We condemn in the strongest terms Russia's escalating and illegal military intervention in Ukraine and demand that Russia stop and withdraw its forces from inside Ukraine and along the Ukrainian border. This violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity is a serious breach of international law and a major challenge to Euro-Atlantic security. We do not and will not recognise Russia's illegal and illegitimate 'annexation' of Crimea. We demand that Russia comply with international law and its international obligations and responsibilities; end its illegitimate occupation of Crimea; We demand that Russia take the necessary measures to ensure the safety, rights and freedoms of everyone living on the peninsula.”*¹⁷⁰

Public statements menjadi saran komunikasi yang penting untuk menyampaikan apa yang dianggap NATO sebagai prioritas dalam aliansinya, serta jaminan terhadap aliansi terutama bagi mereka yang kemungkinan terancamnya lebih tinggi juga harus diungkapkan dalam pernyataan dari *leader* NATO untuk membuat masyarakat aliansi menjadi tenang dan merasa aman, hingga yang paling penting adalah memastikan bahwa melalui pernyataan-pernyataan tersebut Rusia dapat mengetahui apa yang diharapkan oleh NATO terhadap Rusia dan bagaimana kredibilitas yang dimiliki oleh NATO terhadap Rusia di RAP.

5.2.2 Communication through actions

Dalam mengartikulasikan kredibilitas terhadap Rusia secara lebih nyata, NATO memerlukan dua kegiatan yakni, *joint exercises* dan *forward presence* untuk mampu menyampaikan ancaman nyata dan dapat terjadi.

¹⁷⁰ Wales Summit Declaration, Op.Cit.hal. 4.

Joint exercises dalam NATO dilakukan secara rutin dalam RAP dimulai secara intensif pada Desember 2014.

1. *Black Eagle*

Black Eagle merupakan operasi latihan yang dilakukan oleh United Kingdom dan Polandia pada tahun 2014. Operasi ini dilakukan oleh pasukan tentara United Kingdom dan Polandia berjumlah lebih dari 2000 *troops*, termasuk 20 Challenger dan 56 Leopard tanks yang dikerahkan dalam latihan Black Eagle di Zagan, Polandia selama 18 hari.¹⁷¹ *Black Eagle* ini menjadi bukti komitmen terbesar United Kingdom terhadap kawasan dan aliansi semenjak tahun 2008.¹⁷² Latihan ini memuat mengenai operasi untuk melatih kemampuan pengerahan kekuatan yang dapat dilakukan secara cepat oleh kedua pihak untuk mendukung aliansi.¹⁷³ Diantaranya menguji mengenai tingkat responsivitas, interoperabilitas dan penggunaan alat lapis baja serta mekanisme latihan pasukan infanteri. Latihan ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan tank yang mumpuni salah satunya Leopard yang merupakan tank terbaik di dunia dengan kemampuannya yang spesifik sehingga memiliki nilai ancaman lebih yang mampu dikomunikasikan NATO terhadap Rusia.

Sesi latihan tersebut menjadi bentuk komunikasi nyata melalui tindakan sebagai sebuah peringatan bagi Rusia bahwa United Kingdom

¹⁷¹ Joe Trevithick, "*British Tanks Practice for War With Russia*", diakses dari: https://www.realcleardefense.com/articles/2014/11/28/british_tanks_practice_for_war_with_russia_107576.html pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 06.33 WIB.

¹⁷² BBC, "*British Army in NATO Black Eagle Exercise*", diakses dari: <http://www.bbc.com/news/uk-30142764> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 06.35 WIB.

¹⁷³ Ibid.

memiliki komitmen terbesar yang pernah ditunjukkan untuk mendukung NATO dalam mengimplementasikan RAP serat melindungi bagian wilayah timur aliansi yang terancam oleh tindakan intervensi Rusia di Ukraina. Latihan ini menjadi penting dikarenakan merupakan latihan yang secara cepat segera dilakukan oleh aliansi di tahun 2014 untuk menunjukkan bahwa NATO memiliki kredibilitas serta serius dan siap untuk menggunakan keabilitasnya sebagai persiapan dalam menghadapi Rusia. latihan ini memperlihatkan mengenai tekad negara anggota yang memfokuskan pada dukungan terwujudnya langkah assurance untuk mempertahankan wilayah aliansi. Keamanan teritori menjadi kepentingan utama NATO sehingga kredibilitas menjadi hal utama untuk ditunjukkan pada Rusia bahwa NATO masih *'alive and ready'* untuk bertahan dan meyerang.

2. *Steadfast Javelin II*

Latihan *Steadfast Javelin II* dilakukan selama kurun waktu seminggu dengan melibatkan 2000 troops yang terdiri dari 10 negara anggota.¹⁷⁴ Latihan tersebut dilaksanakan di berbagai tempat namun khususnya di wilayah timur aliansi yakni, Estonia, Latvia, Lithuania dan Polandia dengan melakukan persiapan latihan terlebih dahulu di Jerman sebelum melakukan latihan di negara perbatasan tersebut.¹⁷⁵ Latihan dengan banyak kontribusi dari negara anggota ini berfokus pada penguatan

¹⁷⁴ NATO, "*NATO Exercise Steadfast Javelin II*", diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112999.htm pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.12 WIB.

¹⁷⁵ Ibid.

interoperabilitas antara kekuatan udara dan darat, khususnya dalam aerial combat.¹⁷⁶ Di tahun 2015, latihan *Steadfast Javelin* kembali dilaksanakan dengan memfokuskan pada kesiapan pasukan Estonia dalam merespon krisis. Namun latihan ini memiliki jumlah kontribusi yang lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya. Di tahun 2015 tersebut latihan melibatkan lebih dari 7000 personil tentara dengan total 13 ribu dengan pasukan Estonia pada 4 Mei hingga 15 Mei 2015.¹⁷⁷ Latihan tersebut berfokus pada pengujian dan kesiapan secara permanen pasukan untuk merespon krisis dan ancaman secara cepat. Dilakukan dengan menggunakan beberapa *military equipments* salah satunya, pesawat SU-22, Eurofighter Typhoon, Hawk dan pesawat A-10.¹⁷⁸

Latihan tersebut mengkomunikasikan kepada Rusia mengenai kredibilitas yang dimiliki oleh NATO sebagai aliansi militer. Bahwa NATO memiliki komitmen dari negara anggota untuk berpartisipasi ketika pasukan dibutuhkan dan menunjukkan jika NATO siap untuk mengerahkan kapabilitas yang dimiliki untuk merespon dengan cepat terhadap serangan dari Rusia. Operasi ini penting untuk dilakukan dikarenakan semakin besar jumlah pasukan dan conventional forces yang dikerahkan akan menunjukkan semakin solidnya aliansi untuk bersatu mempertahankan setiap negara anggota kapan pun dan dimana pun.

3. *Iron Sword*

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ NATO, "*Steadfast Javelin Kicks Off in Estonia*", diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_119257.htm pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.21 WIB.

¹⁷⁸ Ibid.

Iron Sword merupakan latihan militer yang dilaksanakan di Lithuania pada tahun 2014. Latihan tersebut dilakukan dengan kontribusi dari 9 negara anggota dengan kurun waktu selama dua minggu mengadakan latihan militer di Lithuania.¹⁷⁹ Kontribusi dilakukan oleh lebih dari 2280 personil dari Kanada, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Jerman, Lithuania, Luxemburg, United Kingdom dan Amerika Serikat yang memfokuskan pada interoperabilitas unit NATO serta melatih kesiapan dalam operasi pertahanan dan penyerangan.¹⁸⁰ Latihan tersebut menggunakan kapabilitas pesawat tempur yang diutamakan oleh F-16 Fighting Falcon DAN f-15.¹⁸¹

Latihan ini mengkomunikasikan mengenai keputusan NATO untuk serius dalam menegakkan ancaman kapabilitas dan *political resolve* yang dimiliki seiring dengan menanggapi tingkat aktifitas militer Rusia yang meningkat di Kaliningrad. Operasi ini menyampaikan bahwa NATO tidak gentar akan aktivitas militer yang meningkat dilakukan oleh Rusia.

4. *Dragoon Ride*

Operasi ini merupakan latihan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan pasukan negara anggota bagian timur. Amerika Serikat yang merupakan negara kontribusi utama dalam operasi ini mengirimkan pasukan berupa 1st Brigade Combat Team dan 1st Cavalry Division kepada Estonia, Latvia, Lithuania dan Polandia untuk latihan tersebut dengan

¹⁷⁹ Reuters, "*Iron Sword 2014 NATO Stages Massive Military Drill in Lithuania*", diakses dari: <https://www.rt.com/news/201771-lithuania-iron-sword-wargame/> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.36 WIB.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid.

penggunaan kekuatan utamanya US Army Stryker.¹⁸² Tujuan dari latihan tersebut utamanya adalah untuk menunjukkan kepada internasional mengenai senjata yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan NATO serta bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara militer dengan warga sipil di seluruh Eropa bahwa Amerika Serikat memberikan jaminan terhadap keamanan masyarakat.¹⁸³ Latihan ini menjadi penting untuk mengkomunikasikan bukan saja kepada Rusia mengenai komitmen Amerika Serikat, tetapi juga kepada masyarakat Eropa bahwa terdapat jaminan yang diberikan Amerika Serikat bahwa mereka akan melindungi masyarakat aliansi dari ancaman apapun.

5. *Joint Warrior*

Joint Warrior merupakan salah satu latihan naval terbesar yang dilakukan negara anggota NATO di tahun 2015. Latihan tersebut dilakukan dengan kontribusi dari 15 negara anggota dengan dipimpin oleh United Kingdom yang melakukan latihan berfokus pada anti submarine warfare.¹⁸⁴ NATO Standing Naval *Forces* mengerahkan lebih dari 40 kapal tempur dan kapal selam serta 70 pesawat dengan total 13 ribu tentara yang berpartisipasi dalam latihan tersebut.¹⁸⁵ Beberapa hal yang diuji dalam latihan tersebut adalah pengumpulan dan penerapan mengenai

¹⁸² Dan Lanothe, 2015, "In Show of Force, the Army's Operation Dragoon Ride Rolls Through Europe", diakses dari https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/03/24/in-show-of-force-the-armys-operation-dragoon-ride-rolls-through-europe/?utm_term=.9ea11a6a2779 pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.50 WIB.

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ BBC, "UK Led Exercise Joint Warrior to be 'Biggest Ever'", diakses dari <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-32252012> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 08.02 WIB.

¹⁸⁵ NATO, "NATO Ships Complete Participation in Exercise Joint Warrior", diakses dari https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_119006.htm?selectedLocale=en pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 08.09 WIB.

intelijen guna menginformasikan operasi kepada pasukan aliansi, mencari dan menemukan kekuatan dari kekuatan lawan, pengekseskusan serangan berskala besar terhadap lawan dan sebagainya.¹⁸⁶ Latihan tersebut memiliki arti penting untuk dikomunikasikan kepada Rusia, dikarenakan latihan tersebut menunjukkan bahwa NATO berkembang menjadi lebih kuat dalam melakukan berbagai operasi penyerangan dan menunjukkan bahwa NATO memiliki kapabilitas bidang maritim yang perlu untuk diwaspadai oleh Rusia mengingat jumlah pasukan dan peralatan yang dikerahkan pun tidak sedikit.

6. *Baltops*

Pada 5 hingga 20 Juni 2015, negara anggota NATO yang berjumlah 17 negara anggota berkontribusi dalam latihan *Baltops* di wilayah negara-negara Baltik.¹⁸⁷ Sebanyak 50 kapal dengan lebih dari 4500 *troops* dikerahkan untuk melakukan latihan yang berfokus pada operasi amfibi, yakni operasi yang mampu melakukan misi melalui laut kemudian menuju darat. Latihan tersebut akan dimulai dari arah wilayah Polandia kemudian menuju daerah negara-negara Baltik melalui Laut Baltik.¹⁸⁸ Latihan ini menjadi latihan penting bagi aliansi untuk memperkuat kemampuan dalam bekerjasama antara negara anggota untuk melindungi aliansi. Latihan *Baltops* memberikan pesan bahwa NATO mampu untuk beroperasi bersama sebagai aliansi dalam operasi amfibi

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Reuters, "49 NATO Vessel, 5600 Troops Gear Up for Major US Led Drills in Baltics", diakses dari <https://www.rt.com/news/265021-nato-baltops-exercise-baltic/> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 08.37 WIB.

¹⁸⁸ Ibid.

yang memperlihatkan bahwa mariner NATO menjadi aset kuat karena mampu menggunakan elemen darat dan lautan untuk beroperasi. Ancaman dapat muncul dari mana saja, operasi amfibi tersebut menyampaikan pada Rusia bahwa NATO *capable* dalam melakukan serangan amfibi sebagai alternatif dalam memasuki *battlespace*.

7. *Sabre Strike*

Latihan *Sabre Strike* merupakan latihan militer darat yang dilakukan NATO dengan kontribusi dari 13 negara anggota dengan troops lebih dari 6000 pasukan tentara di negara-negara Baltik dan Polandia.¹⁸⁹

Tujuan latihan ini adalah memfasilitasi kerjasama antara Estonia, Latvia, Lithuania dan Polandia untuk meningkatkan kemampuan militer dalam operasi gabungan dalam segala misi.¹⁹⁰ Latihan tersebut merupakan latihan terbesar tahun 2015 yang pernah dilakukan di Lithuania.¹⁹¹ *Sabre Strike* ini telah dilaksanakan selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat melalui USAREUR (*United States Army Europe*) semenjak tahun 2011.¹⁹² Namun semenjak ancaman meningkat dari intervensi Rusia di Ukraina, jumlah *troops* yang digunakan semakin meningkat. *Sabre Strike* 2015 merupakan latihan tahunan yang dilakukan berfokus pada negara-negara Baltik dan adanya peningkatan jumlah *troops* dan negara yang berkontribusi dalam operasi ini menunjukkan bahwa kepentingan NATO salah satunya adalah

¹⁸⁹ James Avery, "Saber Strike 2015 Begins in Lithuania", diakses dari <https://www.dvidshub.net/news/165862/saber-strike-2015-begins-lithuania> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 09.16 WIB.

¹⁹⁰ Ibid.

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² Ibid.

untuk melindungi negara-negara Baltik yang merupakan negara pecahan Uni Soviet dan berbatasan langsung dengan Rusia.

8. *Noble Jump*

Latihan *Noble Jump* merupakan salah satu latihan militer terpenting dalam RAP. *Noble Jump* merupakan latihan mengenai pengerahan VJTF untuk pertama kalinya. Latihan pertama kali VJTF dilakukan pada 10 hingga 21 Juni 2015 dengan pengerahan lebih dari 2100 troops dari kontribusi 9 negara anggota.¹⁹³ Unit militer yang dikerahkan terdiri dari pasukan udara yang berasal dari Belanda, Republik Ceko, pasukan infanteri dari Jerman dan Norwegia, pasukan khusus Polandia dan Lithuania hingga helicopter dari Amerika Serikat.¹⁹⁴ *Noble Jump* berfokus pada tingkat kesiapan aliansi, perencanaan gerakan cepat dalam merespon krisis, verifikasi personil, peralatan dan kendaraan. Latihan tersebut memperlihatkan bahwa prioritas utama dari RAP NATO adalah untuk meningkatkan kesiapan aliansi dalam merespon krisis secara cepat, terutama VJTF yang merupakan latihan yang dapat menunjukkan kepada Rusia bahwa NATO memiliki pasukan yang siap untuk bertindak dalam menghadapi medan perang dan mampu untuk beroperasi di bawah kondisi perang.

9. *Trident Juncture*

¹⁹³ SHAPE, 2015, "*NATO Spearhead Force Deploys for First Time, Exercise Noble Jump Underway*", diakses dari <https://shape.nato.int/nato-spearhead-force-deploys-for-first-time--exercise-noble-jump-underway> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 09.53 WIB.

¹⁹⁴ Ibid.

Trident Juncture 2015 merupakan latihan terbesar yang pernah dilakukan NATO selama berpuluh-puluh tahun. Latihan ini memuat pelatihan terhadap pasukan dari NRF dan pasukan aliansi lainnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan pasukan dalam merespon krisis dan ancaman. Dengan diadakannya latihan ini maka NRF dan pasukan lainnya mampu untuk bekerjasama dengan baik, berkolaborasi dengan pasukan dari setiap negara anggota dan untuk menghadapi krisis yang sedang terjadi beserta dengan partner-partner NATO lainnya.¹⁹⁵ Pelatihan ini tidak berfokus pada bidang darat atau naval tertentu, tetapi mencakup semua leemn yakni udara, daratan dan maritim.¹⁹⁶ Beberapa contoh lebih detail mengenai latihan tersebut yakni melakukan operasi ofensif mengenai penyelamatan sandera, melakukan pembersihan ranjau, serta melakukan serangan infanteri.¹⁹⁷ Pasukan yang digunakan dalam latihan militer tersebut mencakup sekitar lebih dari 140 pesawat tempur dan 60 kapal serta lebih dari 230 unit.¹⁹⁸ Personil yang dikerahkan merupakan jumlah personil terbanyak dikerahkan dalam latihan oleh NATO, yakni sebanyak lebih dari 36 ribu personil tentara dengan negara partisipasi lebih dari 30 negara, termasuk beberapa negara partner NATO.¹⁹⁹

Latihan *Trident Juncture* memberikan pesan kepada Rusia bahwa kredibilitas yang dimiliki oleh NATO tinggi. Kapabilitas militer yang dikerahkan dalam latihan tersebut merupakan kapabilitas militer yang

¹⁹⁵ NATO, “*Exercise Trident Juncture 2015*”, Fact Sheet (pdf), hal. 1.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ NATO, 2015, “*Trident Juncture Shows NATO Capabilities ‘Are Real and Ready’*”, diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_124265.htm%20 pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 10.36 WIB.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Ibid.

mempunyai arti strategis tersendiri yang digunakan dalam latihan militer bersama dengan partisipasi negara aliansi beserta negara partner NATO dalam jumlah pasukan yang tinggi dan komitmen yang tinggi pula. Dapat dikatakan pula bahwa latihan ini merupakan latihan terpenting NATO sejak diimplementasikannya RAP yang mengkomunikasikan pada Rusia bahwa kapabilitas yang membawa ancaman NATO bersifat nyata, siap dan akan terjadi jika Rusia melakukan tindakan yang di luar batas dengan mengancam keamanan aliansi.

Selain *joint exercises* untuk mengkomunikasikan kredibilitas dan kepentingan NATO terhadap Rusia, terdapat tindakan lain yang mampu untuk menyampaikan bentuk kredibilitas NATO nyata dan tinggi, yakni melalui *forward presence*. Dalam RAP di *adaptive measures*, NATO mendirikan multinational NATO Headquarters atau NFIU (*NATO Force Integration Units*) di wilayah timur aliansi, yakni Bulgaria, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania dan Slovakia. Kepentingan dan tugas utama NATO adalah untuk menjaga keamanan aliansi. Adanya multinational headquarters tersebut bertujuan untuk mewakili kehadiran NATO secara permanen di dalam negara-negara tersebut. NFIU memiliki tugas untuk membantu dalam penyebaran dan pengerahan pasukan aliansi secara cepat ke bagian wilayah timur, membantu dalam melakukan koordinasi pelatihan yang direncanakan dan mendukung perencanaan pertahanan kolektif aliansi.²⁰⁰ Meskipun bukan

²⁰⁰ NATO, "*NATO Force Integration Unit Fact Sheet*", diakses dari: <https://www.jfcbnato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet> pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 12.15 WIB.

basis militer, namun didirikannya NFIU tersebut menjadi wadah untuk koordinasi dalam kegiatan militer ke depannya ketika NATO secara lebih luas dan terperinci mengerahkan pasukan untuk memperkuat *forward presence* pada Warsaw Summit di tahun 2016 dengan implementasinya pada tahun 2017. Adanya *joint exercise* dan pembentukan NFIU di beberapa negara anggota NATO menunjukkan bahwa NATO memiliki kredibilitas yang tinggi. NATO memperlihatkan kepada Rusia dan internasional bahwa NATO memiliki ancaman yang nyata dan siap untuk dikerahkan karena pasukan NATO memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan baik melalui *joint exercise* tersebut. Serta dibentuknya NFIU terlihat bahwa NATO mengartikulasikan bahwa ini merupakan langkah pertama dalam membangun *forward presence* dan *rapid response* yang lebih kuat ke depannya untuk menghadapi ancaman dari Rusia. Dalam konteks tersebut maka aksi NATO digunakan untuk memberikan sinyal bahwa NATO sangat serius mengenai penegakan ancaman dan komitmen. Dengan kombinasi dari *public statement* yang dilakukan oleh *political leader* NATO dan tindakan militer yang dilaksanakan di kawasan telah memperlihatkan bahwa NATO sedang melakukan *conventional deterrence* yang kuat kepada Rusia.

5.3. Respon Rusia Mengenai Readiness Action Plan

Melalui berbagai tindakan dan operasi yang diimplementasikan dari RAP, Rusia memiliki respon tersendiri terhadap hal tersebut. Dengan berbagai aktivitas militer yang dilakukan NATO, Rusia meningkatkan pertahanan dan keamanannya di berbagai wilayah perbatasan Rusia.

Beberapa aktivitas militer terperinci dilakukan guna merespon tindakan militer NATO dalam RAP. Salah satunya di tahun 2016 Rusia mengemukakan akan menciptakan tiga divisi militer baru dan membawa lima resimen rudal nuklir ke beberapa daerah Rusia yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu sebagai perlawanan terhadap apa yang dilakukan NATO yang meningkatkan kekuatannya, seperti peningkatan kehadiran militer NATO dalam negara-negara Baltik dan adanya latihan militer yang dekat dengan perbatasan.²⁰¹ Presiden Rusia, Vladimir Putin juga mengungkapkan bahwa akan adanya countermeasures dalam merespon tindakan NATO dengan salah satunya melakukan penempatan balistik misil di Kaliningrad.²⁰² Pada umumnya Rusia mengungkapkan bahwa tindakan NATO tidak membantu memperbaiki keamanan dan stabilitas di Eropa namun memicu tindakan sebaliknya. Namun dengan *conventional deterrence* yang dilakukan oleh NATO hingga ke depan telah menunjukkan setidaknya Rusia tidak melakukan agresinya atau tidak melanggar apa yang menjadi isi *Article 5* NATO. Rusia sejauh ini belum melewati 'red line' dengan melanggar *Article 5* tersebut. Sulit untuk tidak mengambil tindakan pencegahan atas tindakan negara lain yang dapat mengancam keamanan sendiri, namun dengan *conventional deterrence* tersebut setidaknya aliansi telah

²⁰¹ Aljazeera, "Russia Vows Response to NATO Plan In Poland and Baltics", diakses dari: <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/russia-hit-nato-east-europe-expansion-plan-160504175351330.html> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 14.28 WIB.

²⁰² DW, "Putin Promises Countermeasures in Response to NATO Expansion", diakses dari: <http://www.dw.com/en/putin-promises-countermeasures-in-response-to-nato-expansion/a-36465534> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 14.30 WIB.

memberikan Rusia 'lebih banyak alasan' untuk tidak melakukan apa yang ditakutkan oleh NATO.

Rusia mengemukakan bahwa dalam menanggapi apa yang mereka sebut sebagai '*NATO threats*', Rusia berencana untuk memperluas dan mengembangkan *mobile nuclear missile patrol*. Adanya *mobile nuclear missile patrol* tersebut diperuntukkan bagi wilayah Eropa terutama perbatasan Eropa dan Rusia. Hal tersebut disampaikan melalui Chief General Staff dan Deputy Defence Minister, bahwa tindakan Rusia tersebut dilakukan dengan patokan bahwa Rusia akan terus mengembangkan *strategic nuclear forces* milik Rusia sebagai bentuk pencegahan terhadap ancaman agresi yang ditujukan terhadap Rusia.²⁰³ Terutama pada tahun-tahun tersebut ketika ancaman semakin diperlihatkan muncul dari wilayah perbatasan tetangga, yakni NATO.

Mengenai respon yang ditujukan dari Rusia terhadap beberapa negara anggota NATO secara spesifik diperlihatkan ketika Rusia mengerahkan pasukannya di perbatasan Polandia dan negara-negara Baltik, pengerahan pasukan tersebut bukan saja pengerahan dalam jumlah kecil namun mengerahkan batalion baru untuk *forward presence* dalam menjaga wilayah Rusia yang terancam akan peningkatan militer NATO, terutama di kawasan Laut Baltik.²⁰⁴ Bahkan secara spesifik, Rusia melakukan pengintaian terhadap beberapa negara yang berkontribusi dalam

²⁰³ Independent, "Russia to Expand Mobile Nuclear Missile Patrols Near European Borders to Respod to NATO Threats" dapat diakses dari <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-nuclear-missile-patrols-europe-nato-tensions-exercises-ukraine-sanctions-crimea-a7478966.html?am> pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 15.50 WIB.

²⁰⁴ Aljazeera, "Russia Vows Response to NATO Plan in Poland and Baltics" dapat diakses dari <http://www.aljazeera.com/amp/news/2016/05/russia-hit-nato-east-europe-expansion-plan-160504175351330.html> pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 15.56 WIB.

peningkatan militer NATO di wilayah perbatasan Rusia, yakni seperti halnya Amerika Serikat. Peristiwa tersebut ditunjukkan ketika Rusia secara terang-terangan melakukan penerbangan dengan jet tempurnya 10 meter di atas kapal perang Amerika Serikat di kawasan Laut Baltik.

Ketika Amerika Serikat mengerahkan pasukan dalam kegiatan NATO *Forward Presence* di Polandia, Rusia merespon tindakan tersebut melalui pernyataan dari Presiden Vladimir Putin. Vladimir Putin menyatakan bahwa tindakan yang didasarkan pada kegiatan NATO dalam mengimplementasikan RAP merupakan suatu tindakan ancaman yang mengancam kepentingan-kepentingan dan keamanan Rusia, terutama hal tersebut dilakukan dengan berbagai kontribusi dari banyak negara-negara lainnya yang bahkan salah satu diantaranya bukan berasal dari negara Eropa. Reaksi lainnya yang ditunjukkan Rusia adalah ketika NATO melakukan peningkatan militer di wilayah kawasan lautnya, yakni Laut Baltik dan Laut Hitam. Adanya pengerahan pasukan dan *vehicle* dilakukan oleh Rusia dalam latihan Kaukasus tahun 2016. Pengerahan tersebut lebih detailnya dilakukan dengan 15 kapal perang Rusia yang ditempatkan di Laut Hitam beserta 2 *missile carrier* dan 2 kapal selam yang mampu untuk membawa jenis modern *cruise missile* Rusia Kalibr-NK yang mampu untuk mencapai jangkauan 3.000 km.²⁰⁵ Vladimir Putin bahkan mengemukakan bahwa tindakan NATO semakin memperburuk keadaan dengan meningkatkan ancaman melalui peningkatan militer di wilayah perbatasan Rusia yang ditambahkan dengan pernyataan berikut.

²⁰⁵ RT, "Russia to Respond to NATO Black Sea Force By Deploying New Weapons", dapat diakses dari <http://www.rt.com/politics/329414-russia-to-respond-to-nato/amp/> pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 16.07 WIB.

“There are two threats here for us, for Russia. The first is the deployment of missile interceptors in the immediate vicinity of our borders in eastern European countries, and the second threat is that anti-missile launch pads could be converted into launch pads for attack missiles.”²⁰⁶

Hal tersebut mengemukakan bahwa Rusia merasa terancam dan mengeluarkan beberapa tindakan yang bukan saja dipicu oleh adanya peningkatan militer NATO di wilayah perbatasan melalui RAP tetapi juga dikarenakan segala bentuk tindakan NATO, melalui *conventional forces* dan *missile defences* yang mengancam keamanan Rusia dan dianggap sebagai tindakan yang agresif untuk dilakukan. Menanggapi hal tersebut, NATO tidak hanya berulang kali mengemukakan terhadap Rusia bahwa apa yang dilakukan NATO bukanlah tindakan yang mengacu pada konfrontasi, melainkan ditujukan kepada peningkatan kekuatan di wilayah timur aliansi sebagai respon terhadap tindakan Rusia yang melakukan aneksasi terhadap Crimea. Serta dukungan Rusia terhadap separatistis dalam perang di Ukraina timur. Pada umumnya Rusia mengungkapkan bahwa tindakan NATO tidak membantu memperbaiki keamanan dan stabilitas di Eropa namun memicu langkah timbal balik. Namun dengan *conventional deterrence* yang dilakukan oleh NATO hingga ke depan telah menunjukkan setidaknya Rusia tidak melakukan agresinya atau melanggar apa yang menjadi isi *Article 5* NATO. Rusia sejauh ini belum melewati ‘*red line*’ dengan melanggar *article* tersebut. Sulit untuk tidak mengambil tindakan pencegahan atas tindakan negara lain yang dapat mengancam keamanan sendiri, namun dengan *conventional deterrence* tersebut

²⁰⁶ RT, “Russia Will Respond to NATO Expansion to Keep Strategic Balance-Putin”, dapat diakses dari <http://www.rt.com/news/392166-putin-stone-nato-expansion/amp/> pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 16.15 WIB.

setidaknya aliansi telah memberikan Rusia 'lebih banyak alasan' untuk tidak melakukan apa yang ditakutkan oleh NATO.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dinamika hubungan NATO dan Rusia berada di titik rendah akibat kebijakan Rusia untuk melakukan intervensi hingga melakukan aneksasi terhadap Crimea di tahun 2014. Akibat adanya tindakan Rusia tersebut yang dianggap NATO telah melanggar hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan maka NATO di tahun 2014 melalui Wales Summit membuat *Readiness Action Plan* sebagai respon NATO terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia. RAP tersebut memuat dua langkah, yakni *assurance measures* dan *adaptive measures*. *Assurance measures* merupakan langkah untuk menjamin keamanan pertahanan darat, air dan udara negara anggota yang memiliki geografis dekat dengan Rusia sedangkan *adaptive measures* merupakan langkah dalam membentuk struktur pertahanan NATO untuk memperkuat kemampuan negara anggota dalam menanggapi krisis yang akan terjadi.²⁰⁷ RAP tersebut penulis teliti implementasinya menggunakan *conventional deterrence* dari Michael Gerson dan Daniel Whiteneck.

Implementasi RAP pada tahun 2014 hingga tahun 2016 dilakukan melalui variabel *credibility* dengan indikator *military capability* dan *political resolve*, yakni NATO menggunakan kapabilitas militer berupa *conventional forces* yang dimiliki NATO. Penggunaan *conventional forces* tersebut dimaksudkan

²⁰⁷ Ibid, "*Wales Summit Declaration*", hal. 7.

agar ketika Rusia melakukan kontak untuk menyerang negara anggota maka NATO dapat secara cepat mampu untuk menghadang ancaman dan mematkan ancaman di medan tempur sebelum tindakan lebih jauh yang lebih mengancam dilakukan oleh lawan. Sehingga NATO dalam tujuan tersebut menggunakan *conventional forces* yang bersifat *deployable* dan *fast response* untuk kontak langsung dengan lawan, yakni salah satunya dilakukan melalui misi patrol udara Baltik, memperkuat NRF, pengintaian melalui AWACS. Penggunaan kapabilitas tersebut disertai oleh komitmen seluruh negara anggota untuk berpartisipasi secara politik melalui *Political Guidance* dalam *Defence Planning* di RAP serta kontribusi tidak langsung dengan pengerahan pasukan dan alutsista yang dilakukan oleh negara anggota sebagai wujud partisipasi pengiriman pasukan dan perangkat militer ketika diperlukan untuk kontak langsung, selain itu komitmen lainnya dilakukan dalam kontribusi secara langsung dengan dengan setiap negara anggota menyumbangkan 2% dari GDP kepada NATO untuk meningkatkan dan mempertahankan kekuatan militer NATO yang juga menjadi anggaran untuk mengimplementasikan RAP.

Implementasi RAP lainnya juga diwujudkan melalui variabel *strategic communication* dengan indikator *communication through words* dan *communication through actions*, yakni dengan Secretary General NATO mengeluarkan pernyataan mengenai prioritas dan kepentingan NATO yakni keamanan teritori dan hak asasi manusia serta nilai demokrasi dan hukum internasional yang patut untuk dijaga. Selain itu jaminan terhadap aliansi juga disebutkan terutama bagi negara-negara seperti Polandia dan negara Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia dan memiliki sejarah dekat di masa

Perang Dingin. Hal yang lebih penting juga dinyatakan oleh NATO mengenai kredibilitas yang dimiliki oleh NATO tentang komitmen seluruh negara anggota dalam partisipasinya di RAP dan penguatan NRF dalam RAP.

Adanya kegiatan militer dalam RAP seperti halnya *joint exercises* terutama di bagian wilayah timur aliansi dan *forward presence* dengan pendirian NFIU menjadikan NATO lebih kuat dalam melakukan *conventional deterrence*.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi RAP NATO terhadap Rusia di tahun 2014 hingga 2016 merupakan sebuah bentuk *conventional deterrence* dengan terimplementasikannya RAP melalui variabel dari teori yakni *credibility* dan *strategic communications* dengan indikator berupa *military capability* dan *political resolve* serta *communication through words* dan *communication through actions*.

6.2.Saran

1. Saran Akademis

Dalam kaitannya di penelitian penulis ini, penulis selanjutnya dapat meneliti lebih rinci lagi mengenai implementasi RAP NATO terhadap Rusia. Untuk penelitian kedepannya, penulis dapat meneliti mengenai implementasi RAP NATO dengan perspektif teori yang berbeda.

2. Saran Praktis

Penulis merasa bahwa komitmen yang ditekankan dalam RAP kurang tinggi sehingga NATO seharusnya dapat lebih menunjukkan *political will* secara jelas dan lebih rinci dari sebelumnya. Penulis juga berharap bahwa NATO dan Rusia berusaha menjalin dialog kembali lebih

dalam mengenai hubungan keduanya agar kawasan Laut Baltik kembali menjadi kawasan yang lebih aman dan kooperatif dari yang sekarang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Colby, Elbridge. 2007. *Restoring Deterrence*. National Intelligence and the Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction.

Kaufmann, William. 1954. *The Requirements of Deterrence*. Center of International Studies Princeton University.

Schelling, Thomas. *The Strategy of Conflict*. Harvard University, Cambridge Massachusetts.

Jurnal

Anderson, Justin, Jeffrey Larsen dan Polly Holdorf, *Extended Deterrence and Allied Assurance: Key Concepts and Current Challenges for US Policy*. Institute for National Security Studies, Usaf Academy Colorado (pdf).

Brooke Holland, Louisa. *NATO'S military response to Russia: November 2016 update*. Number 07276, House of Commons Library (pdf).

Centre for Historical Analysis and Conflict Research, *A Difficult Game to Play*.

Slim Road, Camberley (pdf).

Dagdeverenis, Dimitrios. *NATO Response to Russia After Crimea*.

Bridgibgeurope.net (pdf).

Foxall, Andrew. 2014. *A Fateful Summit: The Future of NATO's Relationship With Russia*. Russia Studies Centre Policy Paper Volume 1 2014 (pdf).

Fleischer, Pawet. 2015. *NATO Defence Planning Process Implications for Defence Posture*. Academic Security Forum (pdf).

Gerson, Michael dan George Whiteneck. 2009. *Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War*. Strategy Studies CAN (pdf).

L. Slantchev, Branislav. *Introduction to International Relations: Deterrence and Compellence*. Department of Political Science, University of California San Diego (pdf).

Larrabee, Stephen. 2013. *The Baltic States and NATO Membership*. RAND (pdf).

Li Huat, LTC Lee. *Will Strengthening The SAF Mean Strengthening Singapore's Deterrence As A Non-Nuclear State*. Pointer Journal of The Singapore Armed Forces Vol. 41 No.4 (pdf).

Mihkelson, Marko. *Baltic-Russia Relations in Light of Expanding NATO and EU*. Foreign Affairs Committee of the Parliament of Estonia (pdf).

NATO. *A Short History of NATO*. North Atlantic Treaty Organization Public Diplomacy Division (pdf).

NATO, "*Exercise Trident Juncture 2015*", Fact Sheet (pdf).

NATO Parliamentary Assembly. 2015. *NATO's Readiness Action Plan*. Defence and Security Committee (pdf).

NATO, *Policy Recommendations of the NATO Parliamentary Assembly 2014*,
(pdf).

NATO. *Wales Summit Declaration 5 September 2014* (pdf).

Sollai, Andrei. *NATO-Russia Relation A Brief Analysis*. Departmen of Political
Science International Relation (pdf).

Website

Aircraft, *NATO to Deploy AWACS Aircraft to Monitor Ukrainian Crisis*, diakses
dari: <http://www.airforce-technology.com/news/newsnato-to-deploy-awacs-aircraft-to-monitor-ukrainian-crisis-4193394/> pada tanggal 6
Desember 2017.

Aljazeera, *Russia Vows Response to NATO Plan in Poland and Baltics*, dapat
diakses dari [htt://www.aljazeera.com/amp/news/2016/05/russia-hit-nato-east-europe-expansion-plan-160504175351330.html](http://www.aljazeera.com/amp/news/2016/05/russia-hit-nato-east-europe-expansion-plan-160504175351330.html), pada tanggal 16
Jnauari 2018.

Atlantic Council, *Admiral NATO's Standing Naval Forces are the Alliance's
First Response*, diakses dari:
[http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/admiral-nato-s-standing-
naval-forces-are-the-alliance-s-first-responders](http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/admiral-nato-s-standing-naval-forces-are-the-alliance-s-first-responders) pada tanggal 6 Desember
2017.

Avery, James. *Saber Strike 2015 Begins in Lithuania*, diakses dari <https://www.dvidshub.net/news/165862/saber-strike-2015-begins-lithuania> pada tanggal 6 Desember 2017.

BBC, *British Army in NATO Black Eagle Exercise*, diakses dari: <http://www.bbc.com/news/uk-30142764> pada tanggal 6 Desember 2017.

BBC, *UK Led Exercise Joint Warriro to be 'Biggest Ever*, diakses dari <http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-32252012> pada tanggal 6 Desember 2017.

Brookings, 2014, *NATO Seceretary General: Russia's Annexation on Crimea is Illegal and Illegitimate*, dapat diakses dari <https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2014/03/19/nato-secretary-general-russias-annexation-of-crimea-is-illegal-and-illegitimate/>, pada tanggal 10 Mei 2017.

Council on Foreign Relations, *The Lost Logic of Deterrence*, dapat diakses dari <http://www.cfr.org/world/lost-logic-deterrence/p30092>, pada tanggal 13 Mei 2017.

CBS, *NATO Send AWACS to Monitor Ukraine Borders*, diakses dari: <https://www.cbsnews.com/news/nato-awacs-ukraine-borders-poland-romania-tension-with-russia-mounts-over-crimea/> pada tanggal 6 Desember 2017.

CNN, *Georgia Russia Conflict*, dapat diakses dari <http://edition.cnn.com/2014/03/13/world/europe/2008-georgia-russia-conflict/index.html>, pada tanggal 10 Oktober 2017.

CNN, *What Is Article 5*, dapat diakses dari <http://edition.cnn.com/2017/07/06/politics/what-is-article-5-nato-trump/index.html>, pada tanggal 10 Oktober 2017.

CNN Money, 2016, *Which NATO Members Are Falling Short on Military Spending*, dapat diakses dari <http://money.cnn.com/2016/04/15/news/nato-spending-countries/index.html> pada tanggal 7 Desember 2017.

CNN Money, 2017, *How NATO is Funded and Who's Pays What*, dapat diakses dari <http://money.cnn.com/2017/05/25/news/nato-funding-explained-trump/index.html> pada tanggal 7 Desember 2017.

Damien McElroy, *Ukraine receives half price gas and \$15 billion to stick with Russia*, dapat diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10523225/Ukraine-receives-half-price-gas-and-15-billion-to-stick-with-Russia.html> pada tanggal 11 Oktober 2017.

Dan Alexe, *NATO Tries to Remend Ties With Russia at Meeting in Brussels*, dapat diakses dari <https://www.neweurope.eu/article/nato-tries-remend-ties-russia-meeting-brussels/> pada tanggal 12 Oktober 2017.

Dan Lanothe, 2015, *In Show of Force, the Army's Operaion Dragoon Ride Rolls Through Europe*, diakses dari

https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2015/03/24/in-show-of-force-the-armys-operation-dragoon-ride-rolls-through-europe/?utm_term=.9ea11a6a2779 pada tanggal 6 Desember 2017.

Euractiv, *Russia Says Suspended NATO Ties Boosts Terrorists*, dapat diakses dari

<http://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-says-suspended-nato-ties-boosts-terrorists/>, pada tanggal 29 April 2017.

History, *Formation of NATO*, dapat diakses dari

<http://www.history.com/topics/cold-war/formation-of-nato-and-warsaw-pact> pada tanggal 10 Oktober 2017.

Independent, 2014, *Full List of Incidents Involving Russian Military and NATO*

Since March 2014, dapat diakses dari

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/full-list-of-incidents-involving-russian-military-and-nato-since-march-2014-9851309.html>, pada tanggal 11 Mei 2017.

Independent, *Russia to Expand Mobile Nuclear Missile Patrols Near European*

Borders to Respond to NATO Threats, dapat diakses dari

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-nuclear-missile-patrols-europe-nato-tensions-exercises-ukraine-sanctions-crimea-a7478966.html?am>, pada tanggal 16 Januari 2018.

Julian Borger, *NATO-Russia Council Talks Fail to Iron Out Differences*, dapat

diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2016/apr/20/nato-russia-council-talks-fail-iron-out-differences-jens-stoltenberg> pada tanggal 12 Oktober 2017.

Joe Trevithick, *British Tanks Practice for War With Russia*, diakses dari:
https://www.realcleardefense.com/articles/2014/11/28/british_tanks_practice_for_war_with_russia_107576.html pada tanggal 6 Desember 2017

Marcel de Haas, *NATO-Russia Relations After the Georgian Conflict*, dapat diakses dari https://www.researchgate.net/publication/237778527_NATO-Russia_Relations_after_the_Georgian_Conflict, pada tanggal 10 Oktober 2017.

NATO, *A Political and Military Alliance*, dapat diakses dari <http://www.nato.int/nato-welcome/index.html>, pada tanggal 10 Oktober 2017.

NATO, *Consensus Decision-Making at NATO* diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49178.htm pada tanggal 11 Januari 2018.

NATO, *Funding*, diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm pada tanggal 11 Januari 2018.

NATO, *Member Countries*, dapat diakses dari http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm, pada tanggal 10 Oktober 2017.

NATO, *NATO Defence Planning Process*, dapat diakses dari https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_49202.htm pada tanggal 5 Desember 2017.

NATO, *NATO Air Policing*, diakses dari: <https://www.ac.nato.int/page5931922/-nato-air-policing> pada tanggal 6 Desember 2017.

NATO, *NATO after ISAF- Staying Succesful Together*, dapat diakses dari http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94321.htm pada tanggal 11 Oktober 2017.

NATO, *NATO Defence Planning Process*, diakses dari: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_49202.htm pada tanggal 5 Desember 2017.

NATO, *NATO Exercise Steadfast Javelin II*, diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_112999.htm pada tanggal 6 Desember 2017.

NATO, *NATO Force Integration Unit Fact Sheet*, diakses dari: <https://www.jfcbs.nato.int/page5725819/nato-force-integration-units/nato-force-integration-units-fact-sheet> pada tanggal 6 Desember 2017.

NATO, *NATO Member Countries*, diakses dari: https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm pada tanggal 11 Januari 2018.

NATO, *NATO-Russia Council*, diakses dari http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm, pada tanggal 10 Oktober 2017.

NATO, *NATO Secretary General*, diakses dari:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50094.htm pada tanggal 6
Desember 2017.

NATO, *NATO Ships Complete Participation in Exercise Joint Warrior*, diakses
dari
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_119006.htm?selectedLocale=en
pada tanggal 6 Desember 2017.

NATO, *Statement by NATO Foreign Minister*, dapat diakses dari
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_108501.htm, pada tanggal 12
Maret 2017.

NATO, 2014, *Statement of Foreign Minister on Readiness Action Plan*, dapat
diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_115551.htm
pada tanggal 7 Desember 2017.

NATO, *Steadfast Javelin Kicks Off in Estonia*, diakses dari
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_119257.htm pada tanggal 6
Desember 2017.

NATO, *Structure*, diakses dari: <https://www.nato.int/cps/su/natohq/structure.htm>
pada tanggal 11 Januari 2018.

NATO, 2015, *Trident Juncture Shows NATO Capabilities 'Are Real and Ready*,
diakses dari https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_124265.htm%20
pada tanggal 6 Desember 2017.

NATO, *The DJSE Concept*, dapat diakses dari
<https://www.nato.int/fchd/FCHD/djse.html> pada tanggal 7 Desember 2017.

NATO, *The North Atlantic Treaty*, dapat diakses dari
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm, pada tanggal
10 Oktober 2017.

NATO, *Troops Contribution*, diakses dari:
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_50316.htm pada tanggal 11
Januari 2018.

Nick Thompson, *Ukraine: Everything You Need To Know About How We Got
Here*, dapat diakses dari
[http://edition.cnn.com/2015/02/10/europe/ukraine-war-how-we-got-
here/index.html](http://edition.cnn.com/2015/02/10/europe/ukraine-war-how-we-got-here/index.html) pada tanggal 11 Oktober 2017.

Project of the Nuclear Age Peace Foundation, *Deterrence*, dapat diakses dari
[http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-
weapons/history/cold-war/strategy/strategy-deterrence.htm](http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/cold-war/strategy/strategy-deterrence.htm), pada tanggal
13 Mei 2017.

RAND, *Reinforcing Deterrence on NATO's Eastern Flank*, diakses dari:
[https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/R
R1253/RAND_RR1253.pdf](https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/R1253/RAND_RR1253.pdf) pada tanggal 6 Desember 2017.

RadioFreeEurope, *NATO to Deploy AWACS Over Poland*, diakses dari:
[https://www.rferl.org/a/nato-awacs-ukraine-poland-romania
crimea/25292191.html](https://www.rferl.org/a/nato-awacs-ukraine-poland-romania-crimea/25292191.html) pada tanggal 6 Desember 2017.

Reuters, *49 NATO Vessel, 5600 Troops Gear Up for Major US Led Drills in Baltics*, diakses dari <https://www.rt.com/news/265021-nato-baltops-exercise-baltic/> pada tanggal 6 Desember 2017.

Reuters, *Iron Sword 2014 NATO Stages Massive Military Drill in Lithuania*, diakses dari: <https://www.rt.com/news/201771-lithuania-iron-sword-wargame/> pada tanggal 6 Desember 2017.

Reuters, *NATO to Triple Baltic Air Patrol*, diakses dari: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-nato/nato-to-triple-baltic-air-patrol-from-next-month-idUSBREA371WH20140408> pada tanggal 6 Desember 2017.

Reuters, *Putin Says Annexation of Crimea Partly a Response to NATO Enlargement*, dapat diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-nato/putin-says-annexation-of-crimea-partly-a-response-to-nato-enlargement-idUSBREA3G22A20140417> pada tanggal 11 Oktober 2017.

RT, *Russia to Respond to NATO Black Sea Force By Deploying New Weapons*, dapat diakses dari <http://www.rt.com/politics/329414-russia-to-respond-to-nato/amp/>, pada tanggal 16 Januari 2018.

RT, *Russia Will Respond to NATO Expansion to Keep Strategic Balance-Putin*, dapat diakses dari <http://www.rt.com/news/392166-putin-stone-nato-expansion/amp/>, pada tanggal 16 Januari 2018.

SHAPE, 2015, *NATO Spearhead Force Deploys for First Time, Exercise Noble Jump Underway*, diakses dari <https://shape.nato.int/nato-spearhead-force->

deploys-for-first-time--exercise-noble-jump-underway pada tanggal 6
Desember 2017.

SHAPE, *NATO Response Force/Very High Readiness Joint Task Force*, diakses
dari: [https://www.shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-](https://www.shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-joint-task-force)
[joint-task-force](https://www.shape.nato.int/nato-response-force--very-high-readiness-joint-task-force) pada tanggal 6 Desember 2017.

The Guardian, 2016, *NATO and Russia Playing Danger Game With Military*
Build-up, dapat diakses dari
[https://www.theguardian.com/world/2016/oct/27/military-build-up-along-](https://www.theguardian.com/world/2016/oct/27/military-build-up-along-russias-border-no-cause-for-alarm)
[russias-border-no-cause-for-alarm](https://www.theguardian.com/world/2016/oct/27/military-build-up-along-russias-border-no-cause-for-alarm), pada tanggal 10 Mei 2017.





NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

Wales Summit Declaration

Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales

05 Sep. 2014 - | Press Release (2014) 120 Issued on 05 Sep. 2014 |

Last updated: 26 Sep. 2016 15:49

1. We, the Heads of State and Government of the member countries of the North Atlantic Alliance, have gathered in Wales at a pivotal moment in Euro-Atlantic security. Russia's aggressive actions against Ukraine have fundamentally challenged our vision of a Europe whole, free, and at peace. Growing instability in our southern neighbourhood, from the Middle East to North Africa, as well as transnational and multi-dimensional threats, are also challenging our security. These can all have long-term consequences for peace and security in the Euro-Atlantic region and stability across the globe.
2. Our Alliance remains an essential source of stability in this unpredictable world. Together as strong democracies, we are united in our commitment to the Washington Treaty and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. Based on solidarity, Alliance cohesion, and the indivisibility of our security, NATO remains the transatlantic framework for strong collective defence and the essential forum for security consultations and decisions among Allies. The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our territories and our populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. As stated in the Transatlantic Declaration that we issued today, we are committed to further strengthening the transatlantic bond and to providing the resources, capabilities, and political will required to ensure our Alliance remains ready to meet any challenge. We stand ready to act together and decisively to defend freedom and our shared values of individual liberty, human rights, democracy, and the rule of law.
3. Today we reaffirm our commitment to fulfil all three core tasks set out in our Strategic Concept: collective defence, crisis management, and cooperative security. Here in Wales, we have taken decisions to meet the challenges of today and tomorrow. We are reaffirming our strong commitment to collective defence and to ensuring security and

assurance for all Allies; we are adapting our operations, including in Afghanistan, in light of progress made and remaining challenges; and we are strengthening our partnerships with countries and organisations around the globe to better build security together.

4. Every day, our troops deliver the security that is the foundation of our prosperity and our way of life. We pay tribute to all the brave men and women from Allied and partner nations who have served, and continue to serve, in NATO-led operations and missions. We owe an eternal debt of gratitude to all those who have lost their lives or been injured, and we extend our profound sympathy to their families and loved ones.
5. In order to ensure that our Alliance is ready to respond swiftly and firmly to the new security challenges, today we have approved the NATO Readiness Action Plan. It provides a coherent and comprehensive package of necessary measures to respond to the changes in the security environment on NATO's borders and further afield that are of concern to Allies. It responds to the challenges posed by Russia and their strategic implications. It also responds to the risks and threats emanating from our southern neighbourhood, the Middle East and North Africa. The Plan strengthens NATO's collective defence. It also strengthens our crisis management capability. The Plan will contribute to ensuring that NATO remains a strong, ready, robust, and responsive Alliance capable of meeting current and future challenges from wherever they may arise.
5. The elements of the Plan include measures that address both the continuing need for assurance of Allies and the adaptation of the Alliance's military strategic posture.
7. The assurance measures include continuous air, land, and maritime presence and meaningful military activity in the eastern part of the Alliance, both on a rotational basis. They will provide the fundamental baseline requirement for assurance and deterrence, and are flexible and scalable in response to the evolving security situation.
3. Adaptation measures include the components required to ensure that the Alliance can fully address the security challenges it might face. We will significantly enhance the responsiveness of our NATO Response Force (NRF) by developing force packages that are able to move rapidly and respond to potential challenges and threats. As part of it, we will establish a Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), a new Allied joint force that will be able to deploy within a few days to respond to challenges that arise, particularly at the periphery of NATO's territory. This force should consist of a land component with appropriate air, maritime, and special operations forces available. Readiness of elements of the VJTF will be tested through short-notice exercises. We will also establish an appropriate command and control presence and some in-place force enablers on the territories of eastern Allies at all times, with contributions from Allies on a rotational basis, focusing on planning and exercising collective defence scenarios. If required, they will also facilitate reinforcement of Allies located at NATO's periphery for deterrence and collective defence. We will further enhance NATO's ability to quickly and effectively reinforce those Allies, including through preparation of infrastructure,

prepositioning of equipment and supplies, and designation of specific bases. Adequate host nation support will be critical in this respect. We will also ensure that our Allied forces maintain the adequate readiness and coherence needed to conduct NATO's full range of missions, including deterring aggression against NATO Allies and demonstrating preparedness to defend NATO territory. We will enhance our Standing Naval Forces to support maritime situational awareness and to conduct the full spectrum of conventional maritime operations.

9. We will ensure that the current NATO Command Structure remains robust, agile, and able to undertake all elements of effective command and control for simultaneous challenges; this includes a regional focus to exploit regional expertise and enhance situational awareness. Contributing Allies will raise the readiness and capabilities of the Headquarters Multinational Corps Northeast and will also enhance its role as a hub for regional cooperation. We will enhance our intelligence and strategic awareness and we will place renewed emphasis on advance planning.
0. We will establish an enhanced exercise programme with an increased focus on exercising collective defence including practising comprehensive responses to complex civil-military scenarios. The Connected Forces Initiative (CFI) we agreed in Chicago will be instrumental in ensuring full coherence of the training and exercise elements of the Readiness Action Plan.
 1. Development and implementation of the adaptation measures will be done on the basis of the evolving strategic environment in the regions of concern, including in the eastern and southern peripheries of the Alliance, which will be closely monitored, assessed, and prepared for.
 2. We have tasked our Defence Ministers to oversee the expeditious implementation of the Readiness Action Plan, which will begin immediately.
 3. We will ensure that NATO is able to effectively address the specific challenges posed by hybrid warfare threats, where a wide range of overt and covert military, paramilitary, and civilian measures are employed in a highly integrated design. It is essential that the Alliance possesses the necessary tools and procedures required to deter and respond effectively to hybrid warfare threats, and the capabilities to reinforce national forces. This will also include enhancing strategic communications, developing exercise scenarios in light of hybrid threats, and strengthening coordination between NATO and other organisations, in line with relevant decisions taken, with a view to improving information sharing, political consultations, and staff-to-staff coordination. We welcome the establishment of the NATO-accredited Strategic Communications Centre of Excellence in Latvia as a meaningful contribution to NATO's efforts in this area. We have tasked the work on hybrid warfare to be reviewed alongside the implementation of the Readiness Action Plan.
 4. We agree to reverse the trend of declining defence budgets, to make the most effective use of our funds and to further a more balanced sharing of costs and responsibilities. Our overall security and defence depend both on how much we spend and how we

spend it. Increased investments should be directed towards meeting our capability priorities, and Allies also need to display the political will to provide required capabilities and deploy forces when they are needed. A strong defence industry across the Alliance, including a stronger defence industry in Europe and greater defence industrial cooperation within Europe and across the Atlantic, remains essential for delivering the required capabilities. NATO and EU efforts to strengthen defence capabilities are complementary. Taking current commitments into account, we are guided by the following considerations:

- Allies currently meeting the NATO guideline to spend a minimum of 2% of their Gross Domestic Product (GDP) on defence will aim to continue to do so. Likewise, Allies spending more than 20% of their defence budgets on major equipment, including related Research & Development, will continue to do so.
 - Allies whose current proportion of GDP spent on defence is below this level will:
 - halt any decline in defence expenditure;
 - aim to increase defence expenditure in real terms as GDP grows;
 - aim to move towards the 2% guideline within a decade with a view to meeting their NATO Capability Targets and filling NATO's capability shortfalls.
 - Allies who currently spend less than 20% of their annual defence spending on major new equipment, including related Research & Development, will aim, within a decade, to increase their annual investments to 20% or more of total defence expenditures.
 - All Allies will:
 - ensure that their land, air and maritime forces meet NATO agreed guidelines for deployability and sustainability and other agreed output metrics;
 - ensure that their armed forces can operate together effectively, including through the implementation of agreed NATO standards and doctrines.
5. Allies will review national progress annually. This will be discussed at future Defence Ministerial meetings and reviewed by Heads of State and Government at future Summits.
5. We condemn in the strongest terms Russia's escalating and illegal military intervention in Ukraine and demand that Russia stop and withdraw its forces from inside Ukraine and along the Ukrainian border. This violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity is a serious breach of international law and a major challenge to Euro-Atlantic security. We do not and will not recognise Russia's illegal and illegitimate 'annexation' of Crimea. We demand that Russia comply with international law and its international obligations and responsibilities; end its illegitimate occupation of Crimea; refrain from aggressive actions against Ukraine; withdraw its troops; halt the flow of weapons,

equipment, people and money across the border to the separatists; and stop fomenting tension along and across the Ukrainian border. Russia must use its influence with the separatists to de-escalate the situation and take concrete steps to allow for a political and a diplomatic solution which respects Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and internationally recognised borders.

7. We are deeply concerned that the violence and insecurity in the region caused by Russia and the Russian-backed separatists are resulting in a deteriorating humanitarian situation and material destruction in eastern Ukraine. We are concerned about discrimination against the native Crimean Tatars and other members of local communities in the Crimean peninsula. We demand that Russia take the necessary measures to ensure the safety, rights and freedoms of everyone living on the peninsula. This violence and insecurity also led to the tragic downing of Malaysia Airlines passenger flight MH17 on 17 July 2014. Recalling United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 2166, Allies call upon all states and actors in the region to ensure immediate, safe, and unrestricted access to the crash site of MH17 to allow resumption of the investigation and the repatriation of the remains and belongings of the victims still present at the site. Those directly and indirectly responsible for the downing of MH17 should be held accountable and brought to justice as soon as possible.
3. We are also concerned by Russia's pattern of disregard for international law, including the UN Charter; its behaviour towards Georgia and the Republic of Moldova; its violation of fundamental European security arrangements and commitments, including those in the Helsinki Final Act; its long-standing non-implementation of the Conventional Armed Forces in Europe Treaty (CFE); and its use of military and other instruments to coerce neighbours. This threatens the rules-based international order and challenges Euro-Atlantic security. In addition, these developments may potentially have long-term effects on stability in the Black Sea region, which remains an important component of Euro-Atlantic security. Russia's current actions are contrary to the principles on which the established confidence building mechanisms in the Black Sea were built. We will continue to support, as appropriate, regional efforts by Black Sea littoral states aimed at ensuring security and stability.
9. While Russia continues to intervene militarily, arm separatists, and foment instability in Ukraine, we support the sanctions imposed by the European Union (EU), the G7, and others, which are an essential part of the overall international effort to address the destabilizing behaviour of Russia, bring it to deescalate, and arrive at a political solution to the crisis created by its actions. Amongst these are measures taken by Allies including Canada, Norway and the United States, as well as the EU decisions to limit access to capital markets for Russian state-owned financial institutions, restrict trade in arms, establish restrictions for export of dual use goods for military end uses, curtail Russian access to sensitive defence and energy sector technologies, and other measures.

0. Allies have had, and will continue in the course of our ongoing work, a strategic discussion regarding Euro-Atlantic security and Russia. This discussion provides the basis for NATO's vision regarding our approach to, and the mechanisms of the Alliance's relations with, Russia in the future.
1. For more than two decades, NATO has strived to build a partnership with Russia, including through the mechanism of the NATO-Russia Council, based upon the NATO-Russia Founding Act and the Rome Declaration. Russia has breached its commitments, as well as violated international law, thus breaking the trust at the core of our cooperation. The decisions we have taken at the Summit demonstrate our respect for the rules-based European security architecture.
 2. We continue to believe that a partnership between NATO and Russia based on respect for international law would be of strategic value. We continue to aspire to a cooperative, constructive relationship with Russia, including reciprocal confidence building and transparency measures and increased mutual understanding of NATO's and Russia's non-strategic nuclear force postures in Europe, based on our common security concerns and interests, in a Europe where each country freely chooses its future. We regret that the conditions for that relationship do not currently exist. As a result, NATO's decision to suspend all practical civilian and military cooperation between NATO and Russia remains in place. Political channels of communication, however, remain open.
 3. The Alliance does not seek confrontation and poses no threat to Russia. But we cannot and will not compromise on the principles on which our Alliance and security in Europe and North America rest. NATO is both transparent and predictable, and we are resolved to display endurance and resilience, as we have done since the founding of our Alliance. The nature of the Alliance's relations with Russia and our aspiration for partnership will be contingent on our seeing a clear, constructive change in Russia's actions which demonstrates compliance with international law and its international obligations and responsibilities.
 4. An independent, sovereign, and stable Ukraine, firmly committed to democracy and the rule of law, is key to Euro-Atlantic security. At a time when Ukraine's security is being undermined, the Alliance continues its full support for Ukraine's sovereignty, independence and territorial integrity within its internationally recognised borders. The broad support for United Nations General Assembly Resolution 68/262 on the Territorial Integrity of Ukraine, demonstrates the international rejection of Russia's illegal and illegitimate 'annexation' of Crimea. We are extremely concerned by the further escalation of aggressive actions in eastern Ukraine. We see a concerted campaign of violence by Russia and Russian-backed separatists aimed at destabilising Ukraine as a sovereign state.
 5. We commend the people of Ukraine for their commitment to freedom and democracy and their determination to decide their own future and foreign policy course free from outside interference. We welcome the holding of free and fair Presidential elections on

25 May 2014 under difficult conditions and the signature of the Association Agreement with the European Union on 27 June 2014, which testify to the consolidation of Ukraine's democracy and its European aspiration. In this context, we look forward to the elections to the Verkhovna Rada in October 2014.

5. We encourage Ukraine to further promote an inclusive political process, based on democratic values and respect for human rights, minorities, and the rule of law. We welcome President Poroshenko's Peace Plan and call on all parties to meet their commitments, including those made in Geneva and Berlin. We call on Russia to engage in a constructive dialogue with the Ukrainian government. We actively support ongoing diplomatic efforts towards a sustainable political solution to the conflict which respects Ukraine's sovereignty, independence, and territorial integrity within its internationally recognised borders.
7. We commend and fully support the actions of other international organisations that are contributing to de-escalation and pursuing a peaceful solution to the crisis, in particular the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and the EU. We welcome the swift deployment of the OSCE Special Monitoring Mission, which must be able to operate unhindered and have access to all regions of Ukraine in order to fulfil its mandate. We also welcome the decision by the EU to launch a Common Security and Defence Policy mission to assist Ukraine in the field of civilian security sector reform, including police and the rule of law.
3. Recognising the right of Ukraine to restore peace and order and to defend its people and territory, we encourage the Ukrainian armed forces and security services to continue to exercise the utmost restraint in their ongoing operation so as to avoid casualties among the local civilian population.
9. Ukraine is a long-standing and distinctive partner of the Alliance. At our meeting here in Wales, we met with President Poroshenko and issued a joint statement. We highly value Ukraine's past and present contributions to all current Allied operations as well as to the NATO Response Force. We encourage and will continue to support Ukraine's implementation of wide-ranging reforms through the Annual National Programme, in the framework of our Distinctive Partnership. We have launched additional efforts to support the reform and transformation of the security and defence sectors and promote greater interoperability between Ukraine's and NATO forces. These efforts are designed to enhance Ukraine's ability to provide for its own security. We welcome Ukraine's participation in the Partnership Interoperability Initiative and Ukraine's interest in the enhanced opportunities within the Initiative, and look forward to its future participation.
0. Russia's illegitimate occupation of Crimea and military intervention in eastern Ukraine have raised legitimate concerns among several of NATO's other partners in Eastern Europe. Allies will continue to support the right of partners to make independent and sovereign choices on foreign and security policy, free from external pressure and coercion. Allies also remain committed in their support to the territorial integrity,

independence, and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia and the Republic of Moldova.

1. In this context, we will continue to support efforts towards a peaceful settlement of the conflicts in the south Caucasus, as well as in the Republic of Moldova, based upon these principles and the norms of international law, the UN Charter, and the Helsinki Final Act. The persistence of these protracted conflicts continues to be a matter of particular concern, undermining the opportunities for citizens in the region to reach their full potential as members of the Euro-Atlantic community. We urge all parties to engage constructively and with reinforced political will in peaceful conflict resolution, within the established negotiation frameworks.
2. We are deeply concerned by the growing instability and mounting transnational and multi-dimensional threats across the Middle East and North Africa region. These threats directly affect the security of the people living there, as well as our own security. Peace and stability in this region are essential for the Alliance. Therefore, we emphasise the need for lasting calm and an end to violence. We continue to support the legitimate aspirations of the peoples in this region for peace, security, democracy, justice, prosperity, and the preservation of their identity. We will continue to closely monitor the situation and explore options for possible NATO assistance to bilateral and international efforts to promote stability and contribute to the response to the growing crisis in, and threats from, the Middle East region.
3. The so-called Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) poses a grave threat to the Iraqi people, to the Syrian people, to the wider region, and to our nations. We are outraged by ISIL's recent barbaric attacks against all civilian populations, in particular the systematic and deliberate targeting of entire religious and ethnic communities. We condemn in the strongest terms ISIL's violent and cowardly acts. If the security of any Ally is threatened, we will not hesitate to take all necessary steps to ensure our collective defence. The rapid deterioration of the security situation in Iraq and ISIL's expanding threat underline the necessity for a political solution based upon an inclusive Iraqi government with cross-sectarian representation. Additionally, in light of the dramatic humanitarian consequences of this crisis and its repercussions on regional stability and security, many Allies have already provided, and are offering, security and humanitarian assistance to Iraq on a bilateral basis.
4. We re-affirm NATO's continued commitment to the NATO-Iraq partnership, through which we will revitalise our effort to help Iraq build more effective security forces. That partnership encompasses, within the existing Individual Partnership and Cooperation Programme, cooperation in the areas of: political dialogue; education and training; response to terrorism; defence institution building; border security; and communications strategy. Allies and partners should continue to help coordinate humanitarian assistance to Iraq through the appropriate channels. We welcome the role that the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre is playing. We have also agreed that NATO will help coordinate among Allies and partners security

assistance support to Iraq; this could also include helping coordinate the provision of lift to deliver assistance. Should the Iraqi government request it, NATO will stand ready to consider measures in the framework of NATO's Defence and Related Security Capacity Building Initiative with an eye to launching such an effort in the near term. NATO will support ongoing bilateral efforts of Allies and partners by soliciting and coordinating, on a voluntary basis, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance assets. Additionally, Allies will seek to enhance their cooperation in exchanging information on returning foreign fighters.

5. We continue to follow the ongoing crisis in Syria with grave concern. We condemn in the strongest terms the campaign of violence against the Syrian people by the Assad regime, which caused the current chaos and devastation in this country. We call on the Syrian government to fully comply with the provisions of all relevant UNSCRs and to immediately commit to a genuine political transition in accordance with the 30 June 2012 Geneva Communiqué. We believe a negotiated political transition is essential to bring an end to the bloodshed. We highlight the important role of the moderate opposition to protect communities against the dual threats of the Syrian regime's tyranny and ISIL's extremism. More than three years of fighting have had dramatic humanitarian consequences and a growing impact on the security of regional countries. Despite possible destabilising effects on their economies and societies, NATO member Turkey, our regional partner Jordan, as well as neighbouring Lebanon, are generously hosting millions of refugees and displaced Syrians. The deployment of Patriot missiles to defend the population and territory of Turkey is a strong demonstration of NATO's resolve and ability to defend and deter any potential threat against any Ally.
5. We welcome the successful completion by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)-United Nations Joint Mission and Allies of the removal and elimination of Syria's declared chemical weapons, as called for in UNSCR 2118 and OPCW Executive Council decisions. NATO Allies played a key role in ensuring this success as well as in the destruction of the chemical materials themselves. We remain highly concerned by continuing reports of the use of chemicals as weapons in Syria. Twelve chemical weapon production facilities are still awaiting destruction and questions remain concerning the completeness and accuracy of Syria's chemical weapons declaration. We urge the Assad government to answer all outstanding questions regarding its declaration to the OPCW, to address all remaining issues, and to take action to ensure full compliance with its obligations under the Chemical Weapons Convention, UNSCR 2118, and OPCW Executive Council decisions.
7. ISIL has, with its recent advance into Iraq, become a transnational threat. The Assad regime has contributed to the emergence of ISIL in Syria and its expansion beyond. ISIL's presence in both Syria and Iraq is a threat to regional stability. It has become a key obstacle to political settlement in Syria and a serious risk to the stability and territorial integrity of Iraq. The people of Syria and Iraq and elsewhere in the region

need the support of the international community to counter this threat. A coordinated international approach is required.

3. We are deeply concerned by the ongoing violence and the deteriorating security situation in Libya, which threaten to undermine the goals for which the Libyan people have suffered so much and which pose a threat to the wider region. We urge all parties to cease all violence and engage without delay in constructive efforts aimed at fostering an inclusive political dialogue in the interest of the entire Libyan people, as part of the democratic process. Recognising the central role of the UN in coordinating international efforts in Libya, we strongly support the ongoing efforts of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) to achieve an immediate ceasefire, scale down tensions, and contribute to national reconciliation. Our Operation Unified Protector demonstrated NATO's determination, together with regional Arab partners, to protect the Libyan people. On the basis of NATO's decision in October 2013, following a request by the Libyan authorities, we continue to stand ready to support Libya with advice on defence and security institution building and to develop a long-term partnership, possibly leading to Libya's membership in the Mediterranean Dialogue, which would be a natural framework for our cooperation.
3. While Mali has re-established a constitutional order, we recognise that terrorist acts and the trafficking of arms, drugs, and people across the Sahel-Sahara region threaten regional and our own security. We welcome the efforts of the UN and underscore the importance of a strong commitment by the international community to address the complex security and political challenges in this region. In this respect, we welcome the comprehensive Sahel strategies of the African Union and the EU. We also welcome the robust and credible military commitment of Allies in the Sahel-Sahara region, which contributes to the reaffirmation of the sovereignty and territorial integrity of the African countries concerned, and to the security of the Alliance. NATO is prepared to explore, upon request by the countries concerned, where it can contribute to address these challenges, in full coordination with UN, EU, regional and bilateral efforts.
3. In the strategically important Western Balkans region, democratic values, the rule of law, and good neighbourly relations continue to play a pivotal role in maintaining lasting peace and stability. The Alliance remains fully committed to the stability and security of the region, and we will continue to actively support the Euro-Atlantic aspirations of countries in this region. Allies and their Western Balkans partners actively contribute to the maintenance of regional and international peace, including through regional cooperation formats.

We welcome Serbia's progress in building a stronger partnership with NATO and encourage Belgrade to continue on this path. We also welcome the progress achieved in Kosovo and encourage further efforts to strengthen democratic institutions and the rule of law throughout a multi-ethnic Kosovo. The 8 June 2014 parliamentary elections were largely in line with international standards and an important milestone. We look

forward to the expeditious formation of a representative and inclusive government, committed to the EU-facilitated Belgrade-Pristina dialogue. We welcome the improvement of the security situation and the progress achieved through the dialogue. We commend both parties for their commitment to the Belgrade-Pristina agreement of 19 April 2013 and encourage continued work on its full implementation.

1. We met yesterday in an expanded meeting on Afghanistan and, together with our International Security and Assistance Force (ISAF) partners, we issued a Wales Summit Declaration on Afghanistan.
2. For over a decade, NATO Allies and partner nations from across the world have stood shoulder to shoulder with Afghanistan in the largest operation in the history of the Alliance. This unprecedented effort has enhanced global security and contributed to a better future for Afghan men, women, and children. We honour the Afghan and international personnel who have lost their lives or been injured in this endeavour.
3. With the end of ISAF in December 2014, the nature and scope of our engagement with Afghanistan will change. We envisage three parallel, mutually reinforcing strands of activity: in the short term, NATO Allies and partner nations stand ready to continue to train, advise, and assist the Afghan National Security Forces (ANSF) after 2014 through the non-combat Resolute Support Mission; in the medium term, we reaffirm our commitment to contribute to the financial sustainment of the ANSF; in the long term, we remain committed to strengthening NATO's partnership with Afghanistan. We count on Afghanistan's commitment and cooperation.
4. We recognise the particular importance of advancing regional cooperation and good neighbourly relations for the security and stability of Afghanistan. We remain determined to support the Afghan people in their efforts to build a stable, sovereign, democratic, and united country, where rule of law and good governance prevail, and in which human rights for all, especially the rights of women, including their full participation in decision making, and those of children, are fully protected. Working with the Government of Afghanistan and the wider international community, our goal remains to never again be threatened by terrorists from within Afghanistan. Our commitment to Afghanistan will endure.
5. We commend the Kosovo Force (KFOR) for the successful conduct of its mission over the past 15 years, in accordance with UNSCR 1244. KFOR will continue to contribute to a safe and secure environment and freedom of movement in Kosovo in close cooperation with the Kosovo authorities and the EU, as agreed. KFOR will also continue to support the development of a peaceful, stable and multi-ethnic Kosovo. The Alliance will continue to assist the Kosovo Security Force with advice on the ground and will keep the nature of further support under review.
5. We will continue to maintain KFOR's robust and credible capability to carry out its mission. Sustained improvement in the security situation and the successful implementation of agreements reached in the EU-facilitated dialogue between Belgrade and Pristina will allow NATO to consider a possible change in its force posture.

Any reduction of our troop presence will be measured against clear benchmarks and indicators, and will remain conditions-based and not calendar-driven.

7. Operation Active Endeavour in the Mediterranean will continue to adapt to meet evolving security risks in an area of essential strategic interest to the Alliance. Somalia-based piracy has not been eradicated. NATO has contributed to a steady reduction in pirate activity off the coast of Somalia through Operation Ocean Shield, working in coordination with the relevant international actors, including the EU and other nations, in line with the relevant decisions taken. We have agreed to continue NATO's counter piracy involvement off the coast of Somalia until the end of 2016, utilising a focused presence to optimise the use of NATO assets. Both of these operations contribute to enhancing the Alliance's maritime situational awareness, interoperability, and engagement with partners.
3. The greatest responsibility of the Alliance is to protect and defend our territory and our populations against attack, as set out in Article 5 of the Washington Treaty. No one should doubt NATO's resolve if the security of any of its members were to be threatened. NATO will maintain the full range of capabilities necessary to deter and defend against any threat to the safety and security of our populations, wherever it should arise.
9. Deterrence, based on an appropriate mix of nuclear, conventional, and missile defence capabilities, remains a core element of our overall strategy.
0. As long as nuclear weapons exist, NATO will remain a nuclear alliance. The strategic nuclear forces of the Alliance, particularly those of the United States, are the supreme guarantee of the security of the Allies. The independent strategic nuclear forces of the United Kingdom and France have a deterrent role of their own and contribute to the overall deterrence and security of the Alliance. The circumstances in which any use of nuclear weapons might have to be contemplated are extremely remote.
1. The Allies' conventional forces make essential contributions to the deterrence of a broad range of threats. They contribute to providing visible assurance of NATO's cohesion as well as the Alliance's ability and commitment to respond to the security concerns of each and every Ally.
2. Missile defence can complement the role of nuclear weapons in deterrence; it cannot substitute for them. The capability is purely defensive.
3. Arms control, disarmament, and non-proliferation continue to play an important role in the achievement of the Alliance's security objectives. Both the success and failure of these efforts can have a direct impact on the threat environment of NATO. In this context, it is of paramount importance that disarmament and non-proliferation commitments under existing treaties are honoured, including the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, which is a crucial element of Euro-Atlantic security. In that regard, Allies call on Russia to preserve the viability of the INF Treaty through ensuring full and verifiable compliance.
4. The threat to NATO populations, territory, and forces posed by the proliferation of

ballistic missiles continues to increase and missile defence forms part of a broader response to counter it. At our Summit in Lisbon in 2010 we decided to develop a NATO Ballistic Missile Defence (BMD) capability to pursue our core task of collective defence. Missile defence will become an integral part of the Alliance's overall defence posture and contribute to the indivisible security of the Alliance.

5. The aim of this capability is to provide full coverage and protection for all NATO European populations, territory, and forces against the increasing threats posed by the proliferation of ballistic missiles, based on the principles of indivisibility of Allies' security and NATO solidarity, equitable sharing of risks and burdens, as well as reasonable challenge, taking into account the level of threat, affordability, and technical feasibility, and in accordance with the latest common threat assessments agreed by the Alliance. Should international efforts reduce the threats posed by ballistic missile proliferation, NATO missile defence can and will adapt accordingly.
5. At our Summit in Chicago in 2012, we declared the achievement of an Interim NATO BMD Capability as an operationally significant first step, offering maximum coverage, within available means, to defend our populations, territory, and forces across southern NATO Europe against a ballistic missile attack. NATO Interim BMD is operationally capable.
7. Today we are pleased to note that the deployment of Aegis Ashore in Deveselu, Romania is on track to be completed in the 2015 timeframe. Aegis Ashore will be offered to NATO and will provide a significant increase in NATO BMD capability. We are also pleased to note the forward deployment of BMD-capable Aegis ships to Rota, Spain. Building on the Interim Capability, the additional Aegis BMD-capable ships could be made available to NATO.
3. Today we are also pleased to note that additional voluntary national contributions have been offered, and that several Allies are developing, including through multinational cooperation, or are acquiring further BMD capabilities that could become available to the Alliance. Our aim remains to provide the Alliance with a NATO operational BMD that can provide full coverage and protection for all NATO European populations, territory, and forces, based on voluntary national contributions, including nationally funded interceptors and sensors, hosting arrangements, and on the expansion of the Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) capability. Only the command and control systems of ALTBMDB and their expansion to territorial defence are eligible for common funding.
3. We note the potential opportunities for cooperation on missile defence, and encourage Allies to explore possible additional voluntary national contributions, including through multinational cooperation, to provide relevant capabilities, as well as to use potential synergies in planning, development, procurement, and deployment. We also note that BMD features in two Smart Defence projects.
3. As with all of NATO's operations, full political control by Allies over military actions undertaken pursuant to this capability will be ensured. To this end, we will continue to

deepen political oversight of NATO BMD as the capability develops. We welcome the completion of the Alliance's review of the arrangements for NATO Interim BMD Capability and note that the Alliance will be ready to make use of additional Allied contributions as they are made available to the Alliance. We also task the Council to regularly review the implementation of the NATO BMD capability, including before the Foreign and Defence Ministers' meetings, and prepare a comprehensive report on progress and issues to be addressed for its future development by our next Summit.

1. We remain prepared to engage with third states, on a case-by-case basis, to enhance transparency and confidence and to increase ballistic missile defence effectiveness. Initial steps have been made and could lead to various forms of engagement with third states on missile defence. As we did in Chicago in 2012, we reaffirm that NATO missile defence is not directed against Russia and will not undermine Russia's strategic deterrence capabilities. NATO missile defence is intended to defend against potential threats emanating from outside the Euro-Atlantic area.
2. The Alliance reaffirms its long-standing commitment to conventional arms control as a key element of Euro-Atlantic security and emphasises the importance of full implementation and compliance to rebuild trust and confidence. Russia's unilateral military activity in and around Ukraine has undermined peace, security, and stability across the region, and its selective implementation of the Vienna Document and Open Skies Treaty and long-standing non-implementation of the Conventional Armed Forces in Europe Treaty (CFE) have eroded the positive contributions of these arms control instruments. Allies call on Russia to fully adhere to its commitments. Allies are determined to preserve, strengthen, and modernise conventional arms control in Europe, based on key principles and commitments, including reciprocity, transparency, and host nation consent.
3. At our last Summit in Chicago we set ourselves the ambitious goal of NATO Forces 2020: modern, tightly connected forces equipped, trained, exercised, and commanded so as to be able to meet NATO's Level of Ambition and so that they can operate together and with partners in any environment. We judge that the goal remains valid and reaffirm our commitment to delivering it. The Readiness Action Plan complements and reinforces NATO Forces 2020 by improving our overall readiness and responsiveness.
4. NATO needs, now more than ever, modern, robust, and capable forces at high readiness, in the air, on land and at sea, in order to meet current and future challenges. We are committed to further enhancing our capabilities. To this end, today we have agreed a Defence Planning Package with a number of priorities, such as enhancing and reinforcing training and exercises; command and control, including for demanding air operations; intelligence, surveillance, and reconnaissance; NATO's ballistic missile defence capability, in accordance with the decisions taken at the 2010 Lisbon and 2012 Chicago Summits, including the voluntary nature of national contributions; cyber defence; as well as improving the robustness and readiness of our land forces for both

collective defence and crisis response. Fulfilment of these priorities will increase the Alliance's collective capabilities and better prepare NATO to address current and future threats and challenges. We have agreed this Package in order to inform our defence investments and to improve the capabilities that Allies have in national inventories. In this context, NATO joint air power capabilities require longer-term consideration.

5. We continue to emphasise multinational cooperation. Following the Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) initiative launched at our Chicago Summit, work is on track to deliver an initial operational capability to support NATO operations and NATO Response Force rotations from 2016 onwards. In this context, we note the progress in the development of the Alliance Ground Surveillance capability that will become available for operational deployment in 2017. Furthermore, NATO's Airborne Early Warning and Control Force will continue to be modernised to maintain its full operational capability. JISR exemplifies the advantages of multinational cooperation in capability development and employment among Allies, which allow for significant operational and cost benefits. In this spirit, several Allies are establishing a multinational MQ-9 remotely-piloted air system users group, in particular to enhance interoperability and reduce overall costs.
5. In a similar vein, we highlight the fact that, since we launched the Smart Defence initiative at our Chicago Summit, an ever growing number of multinational projects have been set up to help Allies harmonise requirements, pool resources, and achieve tangible benefits in terms of operational effectiveness as well as cost efficiency. We are building on this positive momentum, in particular to address Alliance priority capability requirements. Specifically, two groups of Allies have agreed to work on, respectively, increasing the availability of air-to-ground Precision Guided Munitions, and on the provision of a deployable airbase capability, and have signed Letters of Intent to this effect. A further two groups of Allies have decided to establish concrete projects for improving JISR information exchange in operations and ballistic missile defence, including naval training.
7. Today we have also endorsed the NATO Framework Nations Concept. It focuses on groups of Allies coming together to work multinationally for the joint development of forces and capabilities required by the Alliance, facilitated by a framework nation. Its implementation will contribute to providing the Alliance with coherent sets of forces and capabilities, particularly in Europe. It will help demonstrate European Allies' willingness to do more for our common security and also improve the balance of the provision of capabilities between the United States and European Allies as well as among European Allies themselves. To implement this concept, today, a group of ten Allies, facilitated by Germany as a framework nation and focusing on capability development, have, through a joint letter, committed to working systematically together, deepening and intensifying their cooperation in the long term, to create, in various configurations, a number of multinational projects to address Alliance priority areas across a broad spectrum of capabilities. They will initially concentrate on creating

coherent sets of capabilities in the areas of logistics support; chemical, biological, radiological and nuclear protection; delivering fire-power from land, air, and sea; and deployable headquarters. Another group of seven Allies, facilitated by the United Kingdom as a framework nation, have also agreed today to establish the Joint Expeditionary Force (JEF), a rapidly deployable force capable of conducting the full spectrum of operations, including high intensity operations. The JEF will facilitate the efficient deployment of existing and emerging military capabilities and units. Additionally, a group of six Allies, facilitated by Italy as a framework nation and based on regional ties, will focus on improving a number of Alliance capability areas, such as stabilisation and reconstruction, provision of enablers, usability of land formations, and command and control. Other groupings are being developed in line with the Framework Nations Concept.

3. Two Allies have announced their intention to establish a Combined Joint Expeditionary Force, to be delivered from 2016 and to be available for the full spectrum of operations, including at high intensity.
9. We continue to build on the experience gained in recent operations and improve our interoperability through the Connected Forces Initiative (CFI). Today we have endorsed a substantial CFI Package consisting of six key deliverables, including the high-visibility exercise Trident Juncture 2015, with 25,000 personnel to be hosted by Spain, Portugal, and Italy; a broader and more demanding exercise programme from 2016 onwards; and a deployable Special Operations Component Command headquarters. As a key component in delivering NATO Forces 2020, the CFI addresses the full range of missions, including the most demanding, thereby demonstrating the continued cohesion and resolve of the Alliance. It provides the structure for Allies to train and exercise coherently; reinforces full-spectrum joint and combined training; promotes interoperability, including with partners; and leverages advances in technology, such as the Federated Mission Networking framework, which will enhance information sharing in the Alliance and with partners in support of training, exercises and operations.
0. In this context, NATO will continue to work closely with the EU, as agreed, to ensure that our Smart Defence and the EU's Pooling and Sharing initiatives are complementary and mutually reinforcing, and to support capability development and interoperability with a view to avoiding unnecessary duplication and maximising cost- effectiveness. We welcome the efforts of NATO nations and EU member states, in particular in the areas of strategic airlift and air-to-air refuelling, medical support, maritime surveillance, satellite communication, and training, as well as efforts of several nations in the area of remotely piloted aircraft systems. We also welcome the national efforts in these and other areas by European Allies and partners, which will benefit both organisations. The success of our efforts will continue to depend on mutual transparency and openness between the two organisations. We encourage making the fullest use of existing NATO-EU mechanisms to this effect.
1. The geopolitical and economic importance of the maritime domain in the 21st century

continues to grow. NATO needs to adapt to a complex, more crowded, rapidly evolving, and increasingly unpredictable maritime security environment. This necessitates a strengthening of the Alliance's maritime capabilities, which should not be seen in isolation but as an integral part of NATO's larger toolbox to safeguard the Alliance's interests. We will therefore continue to intensify and expand our implementation of the Alliance Maritime Strategy, further enhancing the Alliance's effectiveness in the maritime domain and its contributions to deterrence and collective defence, crisis management, cooperative security, and maritime security. We will reinvigorate NATO's Standing Naval Forces by making their composition and the duration of national contributions more flexible and, in principle, no longer using them for protracted operations or for operations with low-end tasks. In addition, we will enhance their education, training, and exercise value, especially at the high end of the spectrum. We will also investigate ways to enhance further the effectiveness of the full range of Alliance maritime capabilities. Greater co-ordination, cooperation, and complementarity with relevant international organisations, including the EU, in line with the relevant decisions taken, as well as work with partner and non-partner nations, will be an important element of the implementation of the Alliance Maritime Strategy. We welcome the adoption of the EU's Maritime Security Strategy in June 2014, which will potentially contribute to the security of all Allies.

2. As the Alliance looks to the future, cyber threats and attacks will continue to become more common, sophisticated, and potentially damaging. To face this evolving challenge, we have endorsed an Enhanced Cyber Defence Policy, contributing to the fulfillment of the Alliance's core tasks. The policy reaffirms the principles of the indivisibility of Allied security and of prevention, detection, resilience, recovery, and defence. It recalls that the fundamental cyber defence responsibility of NATO is to defend its own networks, and that assistance to Allies should be addressed in accordance with the spirit of solidarity, emphasizing the responsibility of Allies to develop the relevant capabilities for the protection of national networks. Our policy also recognises that international law, including international humanitarian law and the UN Charter, applies in cyberspace. Cyber attacks can reach a threshold that threatens national and Euro-Atlantic prosperity, security, and stability. Their impact could be as harmful to modern societies as a conventional attack. We affirm therefore that cyber defence is part of NATO's core task of collective defence. A decision as to when a cyber attack would lead to the invocation of Article 5 would be taken by the North Atlantic Council on a case-by-case basis.
3. We are committed to developing further our national cyber defence capabilities, and we will enhance the cyber security of national networks upon which NATO depends for its core tasks, in order to help make the Alliance resilient and fully protected. Close bilateral and multinational cooperation plays a key role in enhancing the cyber defence capabilities of the Alliance. We will continue to integrate cyber defence into NATO operations and operational and contingency planning, and enhance information

sharing and situational awareness among Allies. Strong partnerships play a key role in addressing cyber threats and risks. We will therefore continue to engage actively on cyber issues with relevant partner nations on a case-by-case basis and with other international organisations, including the EU, as agreed, and will intensify our cooperation with industry through a NATO Industry Cyber Partnership. Technological innovations and expertise from the private sector are crucial to enable NATO and Allies to achieve the Enhanced Cyber Defence Policy's objectives. We will improve the level of NATO's cyber defence education, training, and exercise activities. We will develop the NATO cyber range capability, building, as a first step, on the Estonian cyber range capability, while taking into consideration the capabilities and requirements of the NATO CIS School and other NATO training and education bodies.

4. NATO recognises the importance of inclusive, sustainable, innovative, and globally competitive defence industries, which include small and medium-sized enterprises, to develop and sustain national defence capabilities and the defence technological and industrial base in the whole of Europe and in North America.
5. The proliferation of nuclear weapons and other weapons of mass destruction (WMD), as well as their means of delivery, by states and non-state actors continues to present a threat to our populations, territory, and forces. The Alliance is resolved to seek a safer world for all and to create the conditions for a world without nuclear weapons in accordance with the goals of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) in a way that promotes international stability and is based on the principle of undiminished security for all. Addressing serious proliferation challenges remains an urgent international priority.
5. We call on Iran to seize the opportunity of the extension of the Joint Plan of Action until 24 November 2014 to make the strategic choices that will restore confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme. We continue to call on Iran to comply fully with all its international obligations, including all relevant Resolutions of the United Nations Security Council and the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors. We also underscore the importance of Iran's cooperation with the IAEA to resolve all outstanding issues, in particular those related to possible military dimensions of its nuclear programme.
7. We are deeply concerned by the nuclear and ballistic missiles programmes and proliferation activities of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and call on it to comply fully with all relevant UNSCRs and the 2005 Joint Statement of the Six-Party Talks. We call on the DPRK to abandon all its existing nuclear and ballistic missile programmes in a complete, verifiable, and irreversible manner and immediately cease all related activities. We strongly condemn the DPRK's December 2012 launch, which used ballistic missile technology, the nuclear test carried out by the DPRK in February 2013, and the various launches of short- and medium-range ballistic missiles since February 2014. We call on the DPRK to refrain from any further nuclear tests, launches using ballistic missile technology, or other provocations.

3. The upcoming 2015 NPT Review Conference is an opportunity for parties to reaffirm support for this Treaty and for its non-proliferation, disarmament and peaceful uses pillars. Allies support efforts towards the success of this conference. We call for universal adherence to, and compliance with, the NPT and the Additional Protocol to the IAEA Safeguards Agreement and call for full implementation of UNSCR 1540 and welcome further work under UNSCR 1977. We call on all states to commit to combating effectively the proliferation of WMD through the universalisation of the Chemical Weapons Convention, the Biological and Toxin Weapons Convention, the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty and through the Proliferation Security Initiative. We also call on all States to continue strengthening the security of nuclear materials and of radioactive sources within their borders, as they were called on to do by the Nuclear Security Summits of 2010 (Washington), 2012 (Seoul), and 2014 (The Hague). We will also ensure that NATO is postured to counter Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) threats, including through the Combined Joint CBRN Defence Task Force.
9. Terrorism poses a direct threat to the security of the citizens of NATO countries and to international stability and prosperity more broadly, and will remain a threat for the foreseeable future. It is a global threat that knows no border, nationality, or religion – a challenge that the international community must fight and tackle together. We reaffirm our commitment to fight terrorism with unwavering resolve in accordance with international law and the principles of the UN Charter. NATO Allies are exposed to a wide range of terrorist threats. NATO has a role to play, including through our military cooperation with partners to build their capacity to face such threats, and through enhanced information sharing. Without prejudice to national legislation or responsibilities, the Alliance strives at all times to remain aware of the evolving threat from terrorism; to ensure that it has adequate capabilities to prevent, protect against, and respond to terrorist threats; and to engage with partners and other international organisations, as appropriate, promoting common understanding and practical cooperation in support of the UN Global Counter-Terrorism Strategy, including in areas such as Explosive Risk Management. Building on our Defence Against Terrorism Programme of Work, we will continue to improve our capabilities and technologies, including to defend against Improvised Explosive Devices and CBRN threats. We will keep terrorism and related threats high on NATO's security agenda.
0. NATO Allies form a unique community of values, committed to the principles of individual liberty, democracy, human rights, and the rule of law. The Alliance is convinced that these shared values and our security are strengthened when we work with our wide network of partners around the globe. We will continue to engage actively to enhance international security through partnership with relevant countries and other international organisations, in accordance with our Berlin Partnership Policy.
1. Partnerships are, and will continue to be, essential to the way NATO works. Partners have served with us in Afghanistan, Kosovo, and other operations, sacrificing alongside

Alliance troops, and work with us in combating terrorism and piracy. Partners make significant contributions to our practical cooperation activities in a number of different areas, including Trust Funds. Together with our partners, we have built a broad cooperative security network. Allies are resolved to maintain and build on this legacy, as our partnerships play a crucial role in the promotion of international peace and security. At this Summit, we therefore collectively pledge to strengthen the political dialogue and practical cooperation with our partners who share our vision for cooperative security in an international order based on the rule of law. We will continue to build defence capacity and interoperability through such initiatives as the Defence Education Enhancement Programme and the Professional Development Programme. We will also continue to promote transparency, accountability, and integrity in the defence sectors of interested nations through the Building Integrity programme.

2. This year we celebrate twenty years of the Partnership for Peace (PfP). PfP and the Euro-Atlantic Partnership Council are, and will continue to be, a part of our vision of a Europe whole, free, and at peace. They have forged political ties across Europe, through the Caucasus and into Central Asia; they have also been the foundation for practical cooperation to address common threats to our shared security, including in the field of human security. This cooperation was driven, at heart, by the common values and principles to which Allies and partners have all committed in the PfP founding documents. They include the promise to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, to respect internationally recognised borders, and to settle disputes by peaceful means. These principles are as important as ever today and must be upheld unequivocally across the Euro-Atlantic community.
3. We reaffirm our commitment to the Mediterranean Dialogue (MD) and Istanbul Cooperation Initiative (ICI) and the principles that underpin them; MD and ICI remain two complementary yet distinct partnership frameworks. We look forward to deepening our political dialogue and practical cooperation in both fora, building on many years of steady progress. We remain open to welcoming new members from the Mediterranean and the broader Middle East region to these frameworks.
4. This year we also celebrate twenty years of the Mediterranean Dialogue. Today, as the Mediterranean region faces huge security challenges with wide-ranging implications for Euro-Atlantic security, the importance of this forum, which brings together key countries from NATO's southern border, is clearer than ever. Enhancing the political dimension of MD will help to address the challenges of the region. We stand ready to continue working with our MD partners to make the most of the opportunities offered by their partnership with NATO, including individual partnership and cooperation programmes.
5. We also celebrate ten years of the Istanbul Cooperation Initiative, which has helped to promote understanding and security cooperation with our partners in the Gulf region. We encourage our ICI partner countries to be proactive in taking full advantage of the

opportunities offered by their partnership with NATO, including individual partnership and cooperation programmes.

5. We will also intensify efforts to engage with and reach out to those partners across the globe that can contribute significantly to addressing shared security concerns. The Berlin Partnership Policy has created increased opportunities for these countries to work individually with NATO at the political and practical level. We welcome that some of our partners across the globe have seized these opportunities by providing support to operations and engaging in security cooperation and dialogue to enhance common understanding of our shared security interests.
7. We will likewise look to further develop relations with relevant regional international organisations, such as the Gulf Cooperation Council and the Arab League, and be open to engaging with others, including in the context of regional crisis situations.
3. As combat operations end in Afghanistan, we will ensure that the bonds forged between Allied and partner nations' armed forces remain as strong as ever. We have fought together. Now we will focus on preparing and training together. We have therefore adopted a comprehensive Partnership Interoperability Initiative to enhance our ability to tackle security challenges together with our partners. Here in Wales, our Defence Ministers launched the Interoperability Platform, meeting with 24 partners ¹ that have demonstrated their commitment to reinforce their interoperability with NATO. These partners have been invited to work with us to take forward dialogue and practical cooperation on interoperability issues. Defence Ministers also met with five partners ² that make particularly significant contributions to NATO operations to discuss further deepening dialogue and practical cooperation as part of the enhanced opportunities within the Partnership Interoperability Initiative. We stand ready to consider the addition of other partners as their contributions and interests warrant.
9. Today we have decided to launch a Defence and Related Security Capacity Building Initiative to reinforce our commitment to partner nations and to help the Alliance to project stability without deploying large combat forces, as part of the Alliance's overall contribution to international security and stability and conflict prevention. The Initiative builds upon NATO's extensive expertise in supporting, advising and assisting nations with defence and related security capacity building. Building on our close cooperation and following their requests, we have agreed to extend this initiative to Georgia, Jordan, and the Republic of Moldova. We are also ready to consider requests from interested partners and non-partners, as well as to engage with international and regional organisations, with an interest in building their defence and related security capacity through this demand-driven initiative. We reaffirm NATO's readiness to provide defence and related security capacity advisory support for Libya when conditions permit. We will pursue these efforts in complementarity and close cooperation with other international organisations, in particular the UN, the EU, and the OSCE, as appropriate. Some partner nations themselves can bring unique partner insight and contributions to NATO capacity building efforts. We welcome the appointment of

NATO's Deputy Secretary General as Special Coordinator for Defence Capacity Building, as well as the establishment of a military hub in the NATO Command Structure, to help ensure a timely, coherent and effective NATO response, taking into account efforts by partners and individual Allies, on a voluntary basis.

- J. We attach great importance to ensuring women's full and active participation in the prevention, management, and resolution of conflicts, as well as in post-conflict efforts and cooperation. We remain committed to preventing conflict-related sexual and gender-based violence. Since our last Summit in Chicago, we have made significant progress in implementing UNSCR 1325 on Women, Peace and Security and related resolutions. We are now implementing the results of the Review of the Practical Implications of UNSCR 1325 for the Conduct of Operations. A revised Policy and Action Plan on Women, Peace and Security have been developed with our partners in the Euro-Atlantic Partnership Council and with other partners³. The establishment of a permanent position of NATO Special Representative for Women, Peace and Security underscores the Alliance's active engagement and commitment to this agenda. NATO's cooperation with partner nations, international organisations, and civil society has been strengthened and should be further enhanced. Our ongoing efforts to integrate gender perspectives into Alliance activities throughout NATO's three core tasks will contribute to a more modern, ready, and responsive NATO. We have directed the Council to submit a progress report on NATO's implementation of UNSCR 1325 and related resolutions for our next Summit.
1. We recall NATO's firm commitment to the implementation of UNSCR 1612 and related resolutions on the protection of children affected by armed conflict and remain deeply concerned about the damaging effects of armed conflicts on children. NATO will continue to carry out its responsibilities as part of the wider international effort and to build on initiatives already taken to properly integrate this issue into the planning and conduct of its operations and missions, as well as its training, monitoring, and reporting. Therefore, in close cooperation with the UN, NATO will assess how to ensure it is sufficiently prepared whenever and wherever the issue of Children and Armed Conflict is likely to be encountered.
2. The Open Door Policy under Article 10 of the Washington Treaty is one of the Alliance's great successes. Successive rounds of NATO enlargement have enhanced the security and stability of all our nations. The steady progress of Euro-Atlantic integration fosters reform, strengthens collective security, and ensures the stability necessary for prosperity. NATO's door will remain open to all European democracies which share the values of our Alliance, which are willing and able to assume the responsibilities and obligations of membership, which are in a position to further the principles of the Treaty, and whose inclusion will contribute to the security of the North Atlantic area. We reaffirm our strong commitment to the Euro-Atlantic integration of the partners that aspire to join the Alliance, judging each on its own merits. Decisions on enlargement are for NATO itself. We encourage partners to continue to implement the

necessary reforms and decisions to advance their aspirations and prepare for membership, and we will continue to offer political and practical support to their efforts. Today we have endorsed decisions that take forward our Open Door Policy based on progress by individual partners that aspire to join the Alliance.

3. NATO recognises Georgia's significant efforts to strengthen its democracy and to modernise its military forces and defence institutions. We welcome the democratic development of Georgia, including through the peaceful transfer of power following parliamentary and presidential elections in 2012 and 2013, respectively. We encourage Georgia to continue implementation of reforms, including consolidating democratic institutions, taking forward judicial reforms, and ensuring full respect for the rule of law. NATO highly appreciates Georgia's sizeable contribution to the ISAF operation and recognises the sacrifices Georgian troops have made in Afghanistan. Together with Georgia's offer to participate in the NATO Response Force, these contributions demonstrate Georgia's role as a contributor to our shared security. At the 2008 Bucharest Summit we agreed that Georgia will become a member of NATO and we reaffirm all elements of that decision, as well as subsequent decisions. Since then, Georgia has made significant progress and has come closer to NATO by implementing ambitious reforms and making good use of the NATO-Georgia Commission and Annual National Programme. We note that Georgia's relationship with the Alliance contains the tools necessary to continue moving Georgia forward towards eventual membership. Today we have endorsed a substantial package for Georgia that includes defence capacity building, training, exercises, strengthened liaison, and enhanced interoperability opportunities. These measures aim to strengthen Georgia's defence and interoperability capabilities with the Alliance, which will help Georgia advance in its preparations towards membership in the Alliance.
4. We reiterate our continued support to the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its internationally recognised borders. We welcome Georgia's full compliance with the EU-mediated cease-fire agreement and other multilateral measures to build confidence. We welcome Georgia's commitment not to use force and call on Russia to reciprocate. We continue to call on Russia to reverse its recognition of the South Ossetia and Abkhazia regions of Georgia as independent states and to withdraw its forces from Georgia. We encourage all participants in the Geneva talks to play a constructive role as well as to continue working closely with the OSCE, the UN, and the EU to pursue peaceful conflict resolution in the internationally recognised territory of Georgia.
5. We welcome the significant progress made by Montenegro in its reforms, its constructive role in the Western Balkans region and the contribution that it makes to international security, including its contribution to our engagement in Afghanistan. In recognition of Montenegro's progress towards NATO membership, the Alliance has agreed to open intensified and focused talks with Montenegro, and agreed that Foreign Ministers will assess Montenegro's progress no later than by the end of 2015 with a

view to deciding on whether to invite Montenegro to join the Alliance. These talks will be conducted in conjunction with the Membership Action Plan (MAP) process. In the meantime, we look to Montenegro to continue its efforts to address the remaining challenges, particularly with respect to rule of law and completing security sector reform. We also welcome the increase in public support in Montenegro for NATO membership and encourage continued efforts in this area.

5. We reiterate the agreement at our 2008 Bucharest Summit, as we did at subsequent Summits, to extend an invitation to the former Yugoslav Republic of Macedonia⁴ to join the Alliance as soon as a mutually acceptable solution to the name issue has been reached within the framework of the UN, and strongly urge intensified efforts towards that end. An early solution, and subsequent membership, will contribute to security and stability in the region. We encourage and support the continuation of reform efforts within the country, particularly with a view to ensuring effective democratic dialogue, media freedom, judicial independence, and a fully-functioning multi-ethnic society based on full implementation of the Ohrid Framework Agreement. We also encourage further efforts to develop good neighbourly relations. We appreciate the former Yugoslav Republic of Macedonia's long-standing contribution to our operations and its active role in regional cooperation. We value the former Yugoslav Republic of Macedonia's long-standing commitment to the NATO accession process.
7. We continue to fully support the membership aspirations of Bosnia and Herzegovina. We look forward to free and fair general elections in October, which we hope will lead to an efficient and effective government coalition, ready to address the issues related to the country's Euro-Atlantic aspirations. We acknowledge the efforts undertaken since 2012 to come to a political agreement on registering the immovable defence property to the state. We remain concerned that little progress has been achieved to comply with the condition set by NATO Foreign Ministers in Tallinn in April 2010. As Allied Foreign Ministers will keep developments under active review, we encourage the leadership of Bosnia and Herzegovina to take the necessary steps in that regard so that its first MAP cycle can be activated as soon as possible. We appreciate Bosnia and Herzegovina's contributions to NATO-led operations, and we commend its constructive role in regional dialogue and security.
3. Here in Wales, our Foreign Ministers have met their counterparts from Bosnia and Herzegovina, Georgia, Montenegro, and the former Yugoslav Republic of Macedonia. Ministers discussed the progress made by these countries, the Euro-Atlantic integration process, and other key Summit issues, including the international security situation. NATO is grateful to these partners for the significant contributions that they continue to make to NATO's objectives and to international security and stability.
3. In light of NATO's operational experiences and the evolving complex security environment, a comprehensive political, civilian, and military approach is essential in crisis management and cooperative security. Furthermore, it contributes to the effectiveness of our common security and defence, without prejudice to Alliance

collective defence commitments. Today we reaffirm our decisions taken at the Lisbon and Chicago Summits. The comprehensive approach is conducive to more coherence within NATO's own structures and activities. Furthermore, NATO has developed a modest but appropriate civilian capability in line with Lisbon Summit decisions. As part of NATO's contribution to a comprehensive approach by the international community, we will enhance cooperation with partner nations and other actors, including other international organisations, such as the UN, the EU and the OSCE, as well as non-governmental organisations, in line with decisions taken. We will ensure that comprehensive approach-related lessons learned, including from ISAF, will be carried forward and applied in various strands of work and new initiatives, including, as appropriate, the Readiness Action Plan, the Connected Forces Initiative, the Defence and Related Security Capacity Building Initiative, and the Partnership Interoperability Initiative.

0. In the spirit of the comprehensive approach and in light of a changing security environment in Europe, our Foreign Ministers met with the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, the OSCE Chairman-in-Office and the Secretary General of the Council of Europe to discuss closer cooperation. At a time when the values and principles that underpin the major institutions in the Euro-Atlantic area are being challenged, Allies emphasised the need to work together to ensure our shared goal of a Europe whole, free and at peace. We look forward to continuing the dialogue to advance this further.
1. NATO's cooperation with the United Nations (UN) strengthens international security. We welcome our regular political dialogue on areas of common interest. We are encouraged by the growing practical cooperation between the staffs of our organisations, including exchanges of best practices and lessons learned in operations, training and exercises, and sharing of expertise. We are committed to exploring ways to reinforce our practical support to UN peace operations, including by enhancing cooperation between NATO and the UN in building defence and related security capacity.
2. The European Union (EU) remains a unique and essential partner for NATO. The two organisations share common values and strategic interests. In a spirit of full mutual openness, transparency, complementarity, and respect for the autonomy and institutional integrity of both NATO and the EU, and as agreed by the two organisations, we will continue to work side-by-side in crisis management operations, broaden political consultations, and promote complementarity of the two organisations to enhance common security and stability. The current strategic environment has highlighted the need for further strengthening our strategic partnership and reinforcing our joint efforts and our common message.
3. NATO recognises the importance of a stronger and more capable European defence, which will lead to a stronger NATO, help enhance the security of all Allies and foster an equitable sharing of the burden, benefits and responsibilities of Alliance membership.

- In this context, we welcome the EU member states' decisions to strengthen European defence and crisis management, including at the European Council in December 2013.
4. We look forward to continued dialogue and cooperation between NATO and the EU. Our consultations have broadened to address issues of common concern, including security challenges like cyber defence, the proliferation of weapons of mass destruction, counter-terrorism, and energy security. We will also seek to work more closely together in several other areas, including maritime security, defence and related security capacity building, and addressing hybrid threats, in line with decisions taken.
 5. Non-EU Allies continue to make significant contributions to the EU's efforts to strengthen its capacities to address common security challenges. For the strategic partnership between NATO and the EU, non-EU Allies' fullest involvement in these efforts is essential. We encourage further mutual steps in this area to support a strengthened strategic partnership.
 5. We welcome the Secretary General's report on NATO-EU relations. We encourage him to continue to work closely with the EU High Representative and the leaders of other EU institutions across the broad spectrum of the NATO-EU strategic partnership and provide a report to the Council in time for the next Summit.
 7. As demonstrated most recently by its activities in the framework of the Russia-Ukraine crisis, the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) plays an important role in addressing the security challenges in the Euro-Atlantic area. We fully support efforts undertaken by the OSCE and continue to work closely with the OSCE in areas such as conflict prevention and resolution, post conflict rehabilitation and in addressing new security threats. We are committed to further enhancing our cooperation, both at the political and operational level, in all areas of common interest.
 3. We welcome the increasing emphasis by the African Union (AU) on addressing transnational security threats, and its growing efforts to build the African capacity to rapidly respond to emerging conflicts. We encourage deeper political and practical cooperation between NATO and the AU to support the African Union in establishing a more robust African peace and security capacity. Based on the AU's request, NATO will continue to provide technical support and stands ready to explore, in consultation with the AU, opportunities to expand our logistical, training, and planning assistance in support of African peacekeepers. We welcome the recent progress in establishing a sound legal framework for NATO-AU cooperation.
 9. A stable and reliable energy supply, the diversification of routes, suppliers and energy resources, and the interconnectivity of energy networks remain of critical importance. While these issues are primarily the responsibility of national governments and other international organisations, NATO closely follows relevant developments in energy security, including in relation to the Russia-Ukraine crisis and the growing instability in the Middle East and North Africa region. We will continue to consult on and further develop our capacity to contribute to energy security, concentrating on areas where NATO can add value. In particular, we will enhance our awareness of energy

developments with security implications for Allies and the Alliance; further develop NATO's competence in supporting the protection of critical energy infrastructure; and continue to work towards significantly improving the energy efficiency of our military forces, and in this regard we note the Green Defence Framework. We will also enhance training and education efforts, continue to engage with partner countries, on a case-by-case basis, and consult with relevant international organisations, including the EU, as appropriate. Today we have noted a progress report on NATO's role in energy security and we task the Council to continue to refine NATO's role in energy security in accordance with the principles and guidelines agreed at the Bucharest Summit and the direction provided by subsequent Summits and the Strategic Concept. We task the Council to produce a further progress report for our next Summit.

- J. Key environmental and resource constraints, including health risks, climate change, water scarcity, and increasing energy needs will further shape the future security environment in areas of concern to NATO and have the potential to significantly affect NATO planning and operations.
1. At the 2010 Lisbon Summit, Allies agreed on an ambitious reform programme, encompassing reviews of the Agencies and NATO Command Structure; resource reform; Headquarters reform; and an end-to-end review of all structures engaged in NATO capability development. Heads of State and Government took stock of progress at the 2012 Chicago Summit. Since then, NATO has continued to reform by instituting new policies, overhauling its structures, and streamlining procedures to improve efficiency and to ensure our Alliance is responsive and agile against the diverse challenges and threats it faces.
2. NATO has adapted to drive further financial reform, harnessed the best efforts of our International Staff and International Military Staff, developed its NATO Command Structure, and achieved a greater level of coherence between its Agencies. While significant progress has been made in the reform of the Alliance, ongoing initiatives still need to be fully delivered and further efforts will be required. We have tasked further work in the areas of delivery of common funded capabilities, reform governance and transparency and accountability, especially in the management of NATO's financial resources. We look forward to a further report on progress on these reforms by the time of our next Summit.
3. We express our appreciation for the generous hospitality extended to us by the Government of the United Kingdom and the people of Wales. The decisions we have taken at our Summit will help to keep our nations and populations safe, the bond between Europe and North America strong, and our region and the world stable. We will meet again in Poland in 2016.

1. Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bosnia and Herzegovina, Finland, Georgia, Ireland, Japan, Jordan, Kazakhstan, Republic of Korea, Republic of Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, New Zealand, Serbia, Sweden, Switzerland, the

former Yugoslav Republic of Macedonia⁴, Ukraine, and the United Arab Emirates.

2. Australia, Finland, Georgia, Jordan, and Sweden.
3. Afghanistan, Australia, Japan, Jordan, New Zealand and the United Arab Emirates.
4. Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name.

NATO's Readiness Action Plan

At the NATO Wales Summit in September 2014, Allied leaders approved a Readiness Action Plan to ensure the Alliance is ready to respond swiftly and firmly to new security challenges. The plan provides a comprehensive package of measures to respond to the changes in the security environment in and near Europe. It responds to the challenges posed by Russia. It also responds to threats emanating from the Middle East and North Africa.

“The Readiness Action Plan is the biggest reinforcement of our collective defence since the end of the Cold War. And it is my top priority to implement this plan in full and on time.”

– NATO Secretary General Jens Stoltenberg, 20 November 2014

The Readiness Action Plan contains two pillars:

- Assurance Measures** - increased military presence and activity for assurance and deterrence.
- Adaptation Measures** - changes to the Alliance's long-term military posture and capabilities.

Assurance Measures

As set out in the Wales Summit Declaration, assurance measures include the “continuous air, land, and maritime presence and military activity in the eastern part of the Alliance... on a rotational basis”. All 28 Allies contribute to the effort. The measures can be scaled up or down depending on the security situation.

As part of the Assurance Measure NATO has:

- Increased from four to sixteen the number of fighter jets on air-policing patrols over the Baltics. Canada, Germany, the Netherlands and Portugal currently provide the planes.
- Commenced AWACS surveillance flights over the territory of our eastern Allies.
- Sent more ships on patrol to the Baltic Sea, the Black Sea and the Mediterranean.
- Deployed ground troops to the eastern parts of the Alliance for training and exercises, on a rotational basis.
- Conducted over 200 NATO and national exercises in Europe so far this year. Major exercises included: *Black Eagle* in Poland (20 Oct-5 Dec: 2,000 British and Polish troops), *Steadfast Javelin I* in Estonia (16-23 May: 6,000 troops from nine Allied countries), *Steadfast Javelin II* in the Baltics, Germany and Poland (2-8 Sept: 2,000 troops from ten Allied countries), *Iron Sword* in Lithuania (2-14 November: 2,280 troops from nine Allied countries).
- Several Allies have also sent ground and air forces to Eastern Europe for training and exercises on a bilateral basis. For example, the United States has deployed troops from the US Army's 1st Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division to Estonia, Latvia, Lithuania and Poland with tanks, mechanized vehicles, and other heavy military equipment.

Adaptation Measures

Adaptation measures will enhance NATO's military posture and readiness levels. They include:

- Enhancing the NATO Response Force (NRF) to make it more responsive and capable. Its land component will be restructured to consist of a number of force packages of land, air and sea forces which can move at short notice in order to rapidly respond to threats. Taken together, the NRF land forces could constitute up to a division size force.

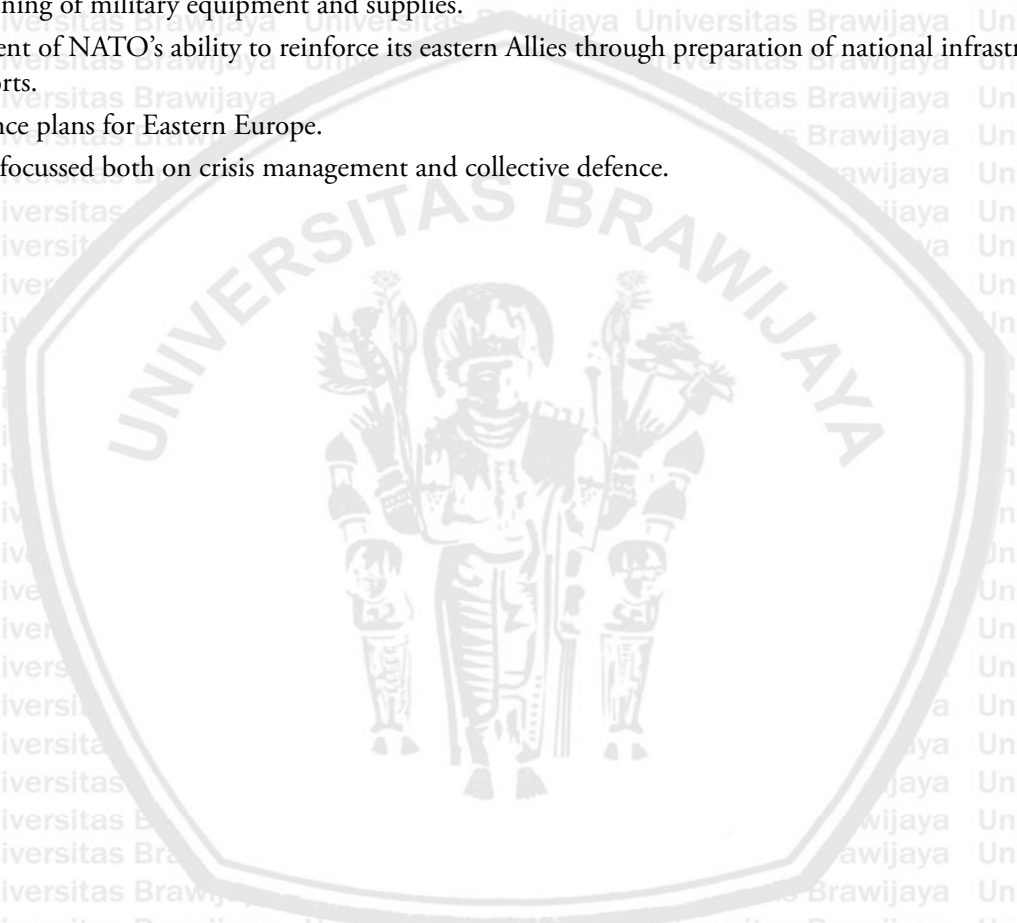
pository.ub.



A

repository.ub.

- As part of restructuring the NRE, the creation of a new quick reaction “Spearhead Force” (Very High Readiness Joint Task Force) of several thousand ground troops supported by air, maritime and special forces, able to deploy within a few days. NATO is working to stand up the new force in early 2016.
- Enhancing NATO’s Standing Naval Forces with more ships and more types of ships.
- The establishment of a multinational NATO command and control presence and reception facilities on the territories of the eastern Allies (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania) at all times, with personnel from Allies on a rotational basis, focusing on planning and exercising collective defence.
- Raising the readiness and capabilities of the Headquarters Multinational Corps Northeast in Szczecin in Poland and enhancing its role as a hub for regional cooperation.
- The pre-positioning of military equipment and supplies.
- The improvement of NATO’s ability to reinforce its eastern Allies through preparation of national infrastructure, such as airfields and ports.
- Updating defence plans for Eastern Europe.
- More exercises focussed both on crisis management and collective defence.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Public diplomacy division (PDD) - press and media section

Tel.: +32(0)2 707 1010/1002

Email: moc@hq.nato.int

#NATO #DefMin

NATO's Readiness Action Plan

"In order to ensure that our Alliance is ready to respond swiftly and firmly to the new security challenges, today we have approved the NATO Readiness Action Plan. It provides a coherent and comprehensive package of necessary measures to respond to the changes in the security environment on NATO's borders and further afield that are of concern to Allies.

It responds to the challenges posed by Russia and their strategic implications. It also responds to the risks and threats emanating from our southern neighbourhood, the Middle East and North Africa.

"The Plan strengthens NATO's collective defence. It also strengthens our crisis management capability. The Plan will contribute to ensuring that NATO remains a strong, ready, robust, and responsive Alliance capable of meeting current and future challenges from wherever they may arise."

- NATO Wales Summit declaration, 5 September 2014

NATO's Readiness Action Plan includes immediate reinforcements of NATO's presence in the eastern part of the Alliance, which have been in place since May 2014 ("assurance measures"), and longer-term changes to NATO's force posture which are currently being implemented ("adaptation measures"). The adaptation measures will increase our readiness and allow the Alliance to deal with any security challenges, including those emanating from the east and the south.

Assurance Measures - immediate increased military presence and activity for assurance and deterrence in the eastern part of the Alliance.

Adaptation Measures - changes to the Alliance's long-term military posture and capabilities to enable it to respond more quickly to emergencies wherever they arise.

Assurance Measures

The assurance measures are a series of land, sea and air activities in, on and around the territory of NATO Allies in Central and Eastern Europe, designed to reinforce their defence, reassure their populations and deter potential aggression. These are a direct result of Russia's aggressive actions in Ukraine.

All 28 Allies are contributing to these measures on a rotational basis. The measures can be stepped up or reduced as necessary, depending on the security situation.

Since May 2014, as part of the Assurance Measures NATO has:

- Increased the number of fighter jets on air-policing patrols over the Baltic States, and deployed fighter jets to Romania and Poland.
- Belgium, Italy, Norway and the United Kingdom took over air-policing duties on 1 May 2015.
- Portugal and the United States have also deployed aircraft to Romania for training purposes.
- Commenced regular AWACS surveillance flights over the territory of our eastern Allies, and maritime patrol aircraft flights along our eastern borders.
- Conducted intensified maritime patrols in the Baltic Sea, the Black Sea and the Mediterranean with the Standing NATO Maritime Groups and Standing NATO Mine Counter-Measures Groups.
- Deployed ground troops to the eastern parts of the Alliance for training and exercises, on a rotational basis.

pository.ub.



- Conducted more exercises focused on crisis management and collective defence. Major exercises in 2015 include *Joint Warrior* (11 – 23 April: naval exercise in the North Atlantic - 13,000 troops); *Dynamic Mongoose* (4 – 15 May: anti-submarine warfare exercise off Norway - 5,000 troops); *Baltops* (5 – 20 June: naval and amphibious exercise in the Baltic Sea - 4,500 troops); *Sabre Strike* (8 – 19 June: land exercise in the Baltic states and Poland - 3,000 troops); *Noble Jump* (10 – 21 June: first deployment test for the new high readiness force to Poland - 2,100 troops); *Trident Joust* (17 – 28 June: headquarter exercise in Bulgaria, Romania and Italy - 1,500 troops) and *Trident Juncture* (21 October – 6 November: Italy, Portugal and Spain - 25,000 troops).
- Several Allies have also sent ground and air forces to Eastern Europe for training and exercises on a bilateral basis. For example, the United States moved hundreds of troops and vehicles through Eastern Europe with operation Dragoon Ride in April 2015. In May 2015, France is sending Leclerc tanks and infantry fighting vehicles to Poland for training, and Germany announced plans to send 1,700 troops to the region.

Adaptation Measures

Adaptation measures are longer-term changes to NATO's forces and command structure which will make the Alliance better able to react swiftly and decisively to sudden crises, whether these arise to the east or the south.

They include:

- Making the NATO Response Force (NRF) more responsive and capable.
The NRF will be roughly doubled from the current level of 13,000 troops, depending on the task it is needed for. This will include land, sea, air and special forces components.
At the same time, a new quick-reaction "Spearhead Force" (Very High Readiness Joint Task Force, or VJTF) of around 5,000 ground troops supported by air, maritime and special forces will be created. Their lead elements will be able to start deploying in just 48 hours.
The Spearhead and NRF forces will be based in their home countries, but be able to deploy from there to wherever they are needed for exercises or crisis response. Leadership and membership of the VJTF and NRF will rotate on an annual basis. Germany, the Netherlands and Norway have already established an interim Spearhead force, while the full force is scheduled to stand up in 2016. Six Allies - France, Germany, Italy, Poland, Spain and the United Kingdom - have already offered to serve as lead nations.
- Enhancing NATO's Standing Naval Forces with more ships and more types of ships.
- Establishing multinational NATO command and control posts on the territories of the eastern Allies (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania), manned on a rotational basis.
These NATO Force Integration Units (NFIUs) would be staffed by national and NATO specialists. Their task would be to improve cooperation and coordination between NATO and national forces, and prepare and support exercises and any deployments needed.
- Raising the readiness and capabilities of the Headquarters Multinational Corps Northeast in Szczecin in Poland and enhancing its role as a hub for regional cooperation.
- Pre-positioning military supplies on the territory of eastern Allies.
- Improving NATO's ability to reinforce its eastern Allies through preparation of national infrastructure, such as airfields and ports.
- Updating defence plans for Eastern Europe.

Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section – Media Operations Centre (MOC)

Tel.: +32(0)2 707 1010/1002

E-mail: mailbox.moc@hq.nato.int

www.nato.int

pository.ub.

NATO's Readiness Action Plan



"In order to ensure that our Alliance is ready to respond swiftly and firmly to the new security challenges, today we have approved the NATO Readiness Action Plan. It provides a coherent and comprehensive package of necessary measures to respond to the changes in the security environment on NATO's borders and further afield that are of concern to Allies.

It responds to the challenges posed by Russia and their strategic implications. It also responds to the risks and threats emanating from our southern neighbourhood, the Middle East and North Africa.

"The Plan strengthens NATO's collective defence. It also strengthens our crisis management capability. The Plan will contribute to ensuring that NATO remains a strong, ready, robust, and responsive Alliance capable of meeting current and future challenges from wherever they may arise."

- NATO Wales Summit declaration, 5 September 2014



NATO's Readiness Action Plan includes immediate reinforcement of NATO's presence in the eastern part of the Alliance, which has been in place since May 2014 ("assurance measures"), and longer-term changes to NATO's force posture ("adaptation measures"). The adaptation measures will increase our readiness and allow the Alliance to deal with any security challenges, including those from the east and the south.

Assurance Measures - immediate increased military presence and activity for assurance and deterrence in the eastern part of the Alliance.

Adaptation Measures - changes to the Alliance's long-term military posture and capabilities to enable it to respond more quickly to emergencies wherever they arise.

Assurance Measures

The assurance measures are a series of land, sea and air activities in, on and around the territory of NATO Allies in Central and Eastern Europe, designed to reinforce their defence, reassure their populations and deter potential aggression. These are a direct result of Russia's aggressive actions in Ukraine.

All 28 Allies are contributing to these measures on a rotational basis. The measures can be stepped up or reduced as necessary, depending on the security situation.

Since May 2014, Assurance Measures have included:

- NATO has increased the number of fighter jets on air-policing patrols over the Baltic States, and deployed fighter jets to Romania and Poland.
- Hungary and Germany took over air-policing duties from Belgium, Italy, Norway and the United Kingdom in September 2015.
- Portugal and the United States have also deployed aircraft to Romania for training.
- NATO has conducted AWACS surveillance flights over the territory of our eastern Allies, and maritime patrol aircraft flights along our eastern borders.
- NATO has intensified maritime patrols in the Baltic Sea, the Black Sea and the Mediterranean with the Standing NATO Maritime Groups and Standing NATO Mine Counter-Measures Groups.
- NATO has deployed ground troops to the eastern parts of the Alliance for training and exercises, on a rotational basis.
- NATO has conducted more exercises focused on crisis management and collective defence. Major exercises in 2015 include *Joint Warrior* (11 – 23 April: naval exercise in the



North Atlantic - 13,000 troops); *Dynamic Mongoose* (04 –15 May: anti -submarine warfare exercise off Norway - 5,000 troops); *Baltops* (05 – 20 June: naval and amphibious exercise in the Baltic Sea - 4,500 troops); *Sabre Strike* (08 – 19 June: land exercise in the Baltic states and Poland - 6,000 troops); *Noble Jump* (10 – 21 June - 2,100 troops); *Trident Joust* (17 – 28 June: headquarter exercise in Bulgaria, Romania and Italy - 1,500 troops) and *Trident Juncture* (21 October – 06 November: Italy, Portugal and Spain - 36,000 troops).

- Several Allies have also sent ground and air forces to Eastern Europe for training and exercises on a bilateral basis.

Adaptation Measures

Adaptation measures are longer-term changes to NATO’s forces and command structure which will make the Alliance better able to react swiftly and decisively to sudden crises, whether these arise from the east or the south.

They include:

- Making the NATO Response Force (NRF) more responsive and capable.
The NRF will be increased to up to 40,000 forces, depending on the task it is needed for. This is more than double from the current level of 13,000 troops. The enhanced NRF will include land, sea, air and special forces presence. At the same time, a new quick-reaction “Spearhead Force” (Very High Readiness Joint Task Force, or VJTF) of around 5,000 ground troops is now up and running. Lead elements are able to start deploying in just two to three days. In June 2015, the Spearhead Force had its first deployment exercise: Noble Jump in Poland. It will be tested again during Exercise Trident Juncture 2015 before it is fully operational next year. The exercise will also certify the NRF Headquarters for 2016: Joint Force Command Brunssum.
The Spearhead and NRF forces will be based in their home countries, but will be able to deploy from there to wherever they are needed for exercises or crisis response. Leadership and composition of the Spearhead Force (or VJTF - Very High Readiness Joint Task Force) and NRF will rotate on an annual basis. In 2016, when the Spearhead force is fully operational, it will be led by Spain.
France, Germany, Italy, Poland, Turkey and the United Kingdom - have already offered to serve as lead nations in the following years.
- Establishing small multinational NATO headquarters - or “NATO Force Integration Units” – NFIUs - on the territories of eastern Allies (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania).
These NATO Force Integration Units (NFIUs) were inaugurated in September 2015. They will be staffed by about 40 national and NATO specialists. Their task is to improve cooperation and coordination between NATO and national forces, and prepare and support exercises and any deployments needed. Two more NFIUs will be set up in Hungary and Slovakia.
- Raising the readiness and capabilities of the Multinational Corps Northeast Headquarters in Szczecin, Poland and enhancing its role as a hub for regional cooperation.
- Establishing a new deployable multinational headquarters for the Southeast in Romania.
- Pre-positioning military supplies on the territory of eastern Allies.
- Improving NATO’s ability to reinforce its eastern Allies through preparation of national infrastructure, such as airfields and ports.
- Setting up a new standing Joint Logistic Support Group Headquarters, to support deployed forces.
- Developing a new concept of advance defence planning.
- Faster political and military decision-making. This includes giving NATO’s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) the authority to prepare troops immediately when Allies decide this is needed.

Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section – Media Operations Centre (MOC)

Tel.: +32(0)2 707 1010/1002

E-mail: mailbox.moc@hq.nato.int

www.nato.int

pository.ub.

NATO's Readiness Action Plan



"In order to ensure that our Alliance is ready to respond swiftly and firmly to the new security challenges, today we have approved the NATO Readiness Action Plan. It provides a coherent and comprehensive package of necessary measures to respond to the changes in the security environment on NATO's borders and further afield that are of concern to Allies.

It responds to the challenges posed by Russia and their strategic implications. It also responds to the risks and threats emanating from our southern neighbourhood, the Middle East and North Africa.

"The Plan strengthens NATO's collective defence. It also strengthens our crisis management capability. The Plan will contribute to ensuring that NATO remains a strong, ready, robust, and responsive Alliance capable of meeting current and future challenges from wherever they may arise."

- NATO Wales Summit declaration, 5 September 2014



NATO's Readiness Action Plan includes increased military activity in the eastern part of the Alliance, which has been in place since May 2014 ("assurance measures"), and longer-term changes to NATO's force posture ("adaptation measures"). The adaptation measures will increase our readiness and responsiveness and allow the Alliance to deal with security challenges, including those from the east and the south.

Assurance Measures - increased military presence and activity for assurance and deterrence in the eastern part of the Alliance.

Adaptation Measures - changes to the Alliance's long-term military posture and capabilities to enable it to respond more quickly to emergencies wherever they arise.

Assurance Measures

The assurance measures are a series of land, sea and air activities in, on and around the territory of NATO Allies in Central and Eastern Europe, designed to reassure their populations and deter potential aggression. These measures are in response to Russia's aggressive actions to NATO's east.

All 28 Allies are contributing to these measures. The measures can be stepped up or reduced as necessary, depending on the security situation.

Since May 2014, Assurance Measures have included:

- Fighter jets on air-policing patrols over the Baltic States, and deployed fighter jets to Romania and Poland.
- Spain and Belgium taking over air-policing duties from Hungary and Germany in January 2016.
- Portugal and the United States deploying aircraft to Romania for training.
- NATO AWACS surveillance flights over the territory of our eastern Allies, and maritime patrol aircraft flights along our eastern borders.
- Intensified NATO maritime patrols in the Baltic Sea, the Black Sea and the Mediterranean with the Standing NATO Maritime Groups and Standing NATO Mine Counter-Measures Groups.
- Deployment of ground troops to the eastern parts of the Alliance for training and exercises, on a rotational basis.
- NATO has conducted more exercises focused on crisis management and collective defence. Over 100 of the nearly 300 exercises conducted in 2015 were in support of NATO's assurance measures.
- Several Allies have also sent ground and air forces to Eastern Europe for training and exercises on a bilateral basis.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Adaptation Measures

Adaptation measures are longer-term changes to NATO's forces and command structure that will improve the Alliance's ability to react swiftly and decisively to sudden crises, whether these arise from the east or the south.

They include:

- **Making the NATO Response Force (NRF) more responsive and capable.**

In 2015, the size of the NRF roughly tripled, from 13,000 to about 40,000 troops. This enhanced NRF includes land, sea, air and special forces components.

At the same time, a new quick-reaction "Spearhead Force" (Very High Readiness Joint Task Force, or VJTF) of around 20,000, of which about 5,000 are ground troops, is now operational and is ready within days to deploy to wherever it is needed. In June 2015, the Spearhead Force participated in its first deployment exercise: Noble Jump in Poland. It was tested again during Exercise Trident Juncture and is now certified as part of the NRF for 2016. The exercise also certified the NRF Headquarters for 2016, Joint Force Command Brunssum.

The Spearhead and NRF forces will be based in their home countries, but will be able to deploy from there to wherever they are needed for exercises or crisis response. Leadership and composition of the Spearhead Force (or VJTF - Very High Readiness Joint Task Force) and NRF will rotate on an annual basis. In 2016, the Spearhead Force will be led by Spain. France, Germany, Italy, Poland, Turkey and the United Kingdom have offered to serve as lead nations in the following years.

- **Establishing small multinational NATO headquarters - or "NATO Force Integration Units" – NFIUs - on the territories of eastern Allies (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, and Romania).**

These NATO Force Integration Units (NFIUs) were activated in September 2015.

They will be staffed by about 40 national and multinational specialists. Their task is to improve cooperation and coordination between NATO and national forces, and prepare and support exercises and any deployments needed.

Two more NFIUs have been approved and will be set up in Hungary and Slovakia.

Additional adaptation measures include

- Raising the readiness and capabilities of the Multinational Corps Northeast Headquarters in Szczecin, Poland and enhancing its role as a hub for regional cooperation.
- Establishing a new multinational headquarters for the Southeast in Romania.
- Pre-positioning military supplies on the territory of eastern Allies.
- Improving NATO's ability to reinforce its eastern Allies through preparation of national infrastructure, such as airfields and ports.
- Setting up a new standing Joint Logistic Support Group Headquarters, to support deployed forces.

Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section

Tel.: +32(0)2 707 5041

E-mail: moc@hq.nato.int

Follow us @NATOpress

www.nato.int

NATO's Readiness Action Plan



"In order to ensure that our Alliance is ready to respond swiftly and firmly to the new security challenges, today we have approved the NATO Readiness Action Plan. It provides a coherent and comprehensive package of necessary measures to respond to the changes in the security environment on NATO's borders and further afield that are of concern to Allies.

It responds to the challenges posed by Russia and their strategic implications. It also responds to the risks and threats emanating from our southern neighbourhood, the Middle East and North Africa.

"The Plan strengthens NATO's collective defence. It also strengthens our crisis management capability. The Plan will contribute to ensuring that NATO remains a strong, ready, robust, and responsive Alliance capable of meeting current and future challenges from wherever they may arise."

- NATO Wales Summit declaration, 5 September 2014



NATO's Readiness Action Plan includes increased military activity in the eastern part of the Alliance, which has been in place since May 2014 ("assurance measures"), and longer-term changes to NATO's force posture ("adaptation measures"). The adaptation measures will increase our readiness and responsiveness and allow the Alliance to deal with security challenges, including those from the east and the south.

Assurance Measures - increased military presence and activity for assurance and deterrence initially in the eastern part of the Alliance, and tailored measures for Turkey since December 2015 - a further demonstration of Allies' resolve to react rapidly and decisively when required.

Adaptation Measures - changes to the Alliance's long-term military posture and capabilities to enable it to respond more quickly to emergencies wherever they arise.

Assurance Measures

The assurance measures are a series of land, sea and air activities in, on and around the territory of NATO Allies in Central and Eastern Europe, and Turkey, designed to reassure their populations and deter potential aggression. These measures are in response to Russia's aggressive actions.

All 28 Allies are contributing to these measures. The measures can be stepped up or reduced as necessary, depending on the security situation.

Assurance Measures include:

- Fighter jets on air-policing patrols.
- Deployment of ground troops to the eastern parts of the Alliance for NATO training and exercises, on a rotational basis.
- NATO AWACS surveillance flights over the territory of our eastern Allies, and maritime patrol aircraft flights along our eastern borders.
- Intensified NATO maritime patrols in the Baltic Sea, the Black Sea and the Mediterranean with the Standing NATO Maritime Groups and Standing NATO Mine Counter-Measures Groups.
- Several Allies have also sent forces to Eastern Europe for training and exercises on a bilateral basis
- NATO has conducted more exercises focused on crisis management and collective defence. Over 100 of the nearly 300 exercises conducted in 2015 were in support of NATO's assurance measures.



repository.ub.

Adaptation Measures

Adaptation measures are longer-term changes to NATO's forces and command structure that improve the Alliance's ability to react swiftly and decisively to sudden crises, whether these arise from the east or the south.

They include:

- **Making the NATO Response Force (NRF) more responsive and capable.**

In 2015, the size of the NRF roughly tripled, from 13,000 to about 40,000 troops. This enhanced NRF includes land, sea, air and special forces components.

Within the NRF, a new quick-reaction "Spearhead Force" (Very High Readiness Joint Task Force, or VJTF) of around 20,000, of which about 5,000 are ground troops, is now operational and is ready within days to deploy to wherever it is needed. In June 2015, the VJTF participated in its first deployment exercise: Noble Jump in Poland. It was tested again during Exercise Trident Juncture and is now certified as part of the NRF for 2016. The exercise also certified the NRF Headquarters for 2016, Joint Force Command Brunssum.

The Spearhead and NRF elements will be based in their home countries, but will be able to deploy from there to wherever they are needed for exercises or crisis response. Leadership and composition of the VJTF and NRF will rotate on an annual basis. For 2016, the Spearhead land force is being led by Spain. The UK is now preparing to lead in 2017.

France, Germany, Italy, Poland and Turkey have offered to serve as lead nations in the following years.

- **Establishing small multinational NATO headquarters - or "NATO Force Integration Units" – NFIUs - on the territories of eastern Allies (Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovakia).**

The first NATO Force Integration Units (NFIUs) were activated in September 2015. NFIUs for Hungary and Slovakia were approved by Defence Ministers in October 2015.

They will be staffed by about 40 national and multinational specialists. Their task is to improve cooperation and coordination between NATO and national forces, and prepare and support NRF exercises and any deployments needed.

Additional adaptation measures include:

- Raising the readiness and capabilities of the Multinational Corps Northeast Headquarters in Szczecin, Poland and enhancing its role as a hub for regional cooperation.
- Establishing a new multinational divisional headquarters for the Southeast in Romania.
- Pre-positioning military supplies on the territory of eastern Allies.
- Improving NATO's ability to reinforce its eastern Allies through preparation of national infrastructure, such as airfields and ports.
- Setting up a new standing Joint Logistic Support Group Headquarters, to support deployed forces.

The Readiness Action Plan has successfully delivered the responsiveness and flexibility required to deal with the changed security environment. As the security environment continues to evolve, the Alliance will continue to respond as necessary. The successful implementation of the Readiness Action Plan paves the way for the adaptation of the Alliance through its ongoing work to strengthen the Alliance's Deterrence and Defence posture.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Public Diplomacy Division (PDD) – Press & Media Section

Tel.: +32(0)2 707 5041

E-mail: moc@hq.nato.int

Follow us @NATOPress

www.nato.int